

# PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Menyoroti kebijakan

Desember 2012



THE WORLD BANK

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**

*Menyoroti kebijakan*

**Desember 2012**



**THE WORLD BANK**



## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan tersebut dalam konteks jangka panjang dan global, serta memberikan penilaian terhadap prospek ekonomi dan kesejahteraan sosial Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia.

Laporan ini disiapkan dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai *Lead Economist* dan *Sector Manager*, Ndiame Diop sebagai *Economic Adviser* dan *Lead Economist* dan Ashley Taylor sebagai *Country Economist*. Tim penyusun terdiri dari Magda Adriani (harga komoditas), Shakira Jones (sektor riil), Fitria Fitriani (perdagangan), Faya Hayati (harga), Brendan Coates (neraca modal dan sektor keuangan), Ahya Ihsan (fiskal) dan Alex Sienaert. Kontribusi tambahan diterima dari Kiyoshi Taniguchi (peraturan pangan), Moez Miaoui dan Stefan Handoyo (*corporate governance*), Edgar Janz dan Astrid Rengganis Savitri (upah minimum), Fook Chuan Eng dan Iwan Gunawan (pencegahan banjir Jakarta), Jon Jellema (survei infrastruktur pedesaan), David Lawrence (pemulihan dari bencana), Djauhari Sitorus, Neni Lestari (perbankan) and The Fei Ming (sektor korporasi). Pengeditan dan produksi dilakukan oleh Alex Sienaert, Arsianti dan Ashley Taylor. Komentar serta masukan terperinci diberikan oleh Jim Brumby, Ndiame Diop, Soekarno Wirokartono, Vivi Alatas, Chris Manning, Sjamsu Rahardja, Bill Wallace, Arian Rahman, Anita Kendrick, Shamima Khan, Sudarno Sumarto dan Mark Vothknecht. Diseminasi diorganisir oleh Dini Sari Djalal, Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim. Akhirnya, dukungan administratif yang sangat berharga diberikan oleh Titi Ananto, Sylvia Njotomihardjo dan Nina Herawati.

Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Arsianti, Soekarno Wirokartono, Wahyoe Soedarmono, Safriza Sofyan, Astrid Rengganis Savitri dan Suryani Amin.

Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development /Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia - AusAID melalui program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan dan bagian dalam merupakan Hak Cipta @ PT Unilever dan Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

### **Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:**

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi [madriani@worldbank.org](mailto:madriani@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi [asiennaert@worldbank.org](mailto:asiennaert@worldbank.org).

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan eksekutif: Menyoroti kebijakan</b>	<b>v</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI</b>	<b>1</b>
1. Pertumbuhan ekonomi global masih tetap lemah, diperkirakan hanya sedikit membaik di tahun 2013	1
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, sedikit melambat di kuartal ketiga	2
3. Ekspor masih tertekan tetapi aliran masuk modal tetap kuat	7
4. Penurunan inflasi terus berlanjut tetapi tekanan dorongan biaya ( <i>cost-push</i> ) muncul pada tahun 2013	9
5. Aliran masuk portofolio investasi asing kembali meningkat sementara pertumbuhan kredit melambat	13
6. Defisit fiskal melebar karena naiknya belanja subsidi dan lemahnya pertumbuhan penerimaan	16
7. Pengambil kebijakan menghadapi serangkaian risiko dari dalam dan luar negeri pada tahun 2013	22
<b>B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA</b>	<b>24</b>
1. Apakah kenaikan upah minimum akan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja di Indonesia	24
a. Tingkat upah minimum dan peraturan perlindungan pekerja di Indonesia	25
b. Pengaruh kenaikan upah minimum terhadap penciptaan lapangan kerja	27
c. Perubahan dalam proses penetapan upah minimum	29
d. Menggunakan visi jangka panjang terhadap penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja	29
2. Membangun ketahanan Jakarta terhadap banjir	31
a. Tingkat keparahan banjir semakin meningkat, membebankan biaya yang signifikan	31
b. Pola cuaca, urbanisasi, penurunan permukaan tanah dan iklim semuanya memainkan peran	33
c. ...tetapi berbagai tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan Jakarta terhadap banjir	34
<b>C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN</b>	<b>37</b>
1. Keberhasilan Indonesia dalam rekonstruksi pasca bencana dan kesiagaan menghadapi bencana	37
a. Tantangan yang dihadapi oleh bencana di Aceh, Nias dan Jawa belum pernah terjadi sebelumnya	37
b. Multi Donor Fund mendukung upaya pemulihan & rekonstruksi yang dipimpin Pemerintah	38
c. Menerapkan pelajaran yang dipetik Indonesia dalam pemulihan pasca bencana	40
2. Infrastruktur desa untuk penyediaan layanan dasar	43
a. Apakah Sensus Infrastruktur Desa dan Mengapa Diperlukan?	43
b. SID menggabungkan beragam indikator untuk menghasilkan indeks kesiapan sisi penawaran ( <i>supply readiness indices</i> )	44
c. Kesiapan Pelayanan Kesehatan yang tertinggi berada di Jawa dan Bali	45
d. ...pola yang sama nampak pada Kesiapan Pelayanan di bidang Pendidikan	47
e. ...dan keduanya berkorelasi kuat dengan Kesiapan Pelayanan di bidang Transportasi	48
f. Perluasan dan Aplikasi Kebijakan	50
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA</b>	<b>51</b>

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Pertumbuhan investasi sejauh ini tetap bertahan terhadap penurunan harga komoditas dan ekspor .....	vi
Gambar 2: Peningkatan tahun 2013 dapat mendorong upah minimum lebih tinggi relatif dibanding negara tetangga.....	viii
Gambar 3: Membaiknya kondisi di AS dan China telah mencapai titik terendah dan kembali bangkit, tetapi belum ada perubahan di zona Eropa atau Jepang .....	2
Gambar 4: Komoditas tetap berada di bawah harga tertingginya, walau sebagian telah meningkat di beberapa bulan terakhir.....	2
Gambar 5: Pertumbuhan PDB riil turun menjadi 6,2 persen (tahun ke tahun) pada kuartal ketiga tahun 2012.....	3
Gambar 6: ...sementara pertumbuhan PDB nominal jatuh ke tingkat terendah sejak September 2009 karena perlambatan pertumbuhan PDB deflator .....	3
Gambar 7: Investasi dan konsumsi swasta tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan .....	4
Gambar 8: Manufaktur tetap kuat pada kuartal ketiga sementara pertumbuhan jasa melambat... 4	4
Gambar 9: Tingkat inventori menunjukkan peningkatan.....	5
Gambar 10: Neraca pembayaran kembali mencatatkan sedikit surplus di kuartal ketiga 2012 .....	7
Gambar 11: Exports masih terus tertekan.....	9
Gambar 12: ...sementara aliran masuk portofolio telah kembali meningkat .....	9
Gambar 13: Inflasi IHK dan inti tetap bertahan pada tingkat yang rendah secara historis .....	9
Gambar 14: Nilai tukar Rupiah melemah cukup besar, tapi lebih rendah dibandingkan dengan kurs rupiah yang dibobot dengan nilai perdagangannya ( <i>trade-weighted</i> ).....	13
Gambar 15: Pasar obligasi meningkat kuat kuartal ini sementara ekuitas bergejolak sejak pertengahan Oktober.....	14
Gambar 16: ...dan depresiasi Rupiah melambat secara riil dan bila dibanding dengan eksportir komoditas lainnya .....	14
Gambar 17: Pertumbuhan kredit melambat sejak Mei .....	14
Gambar 18: Defisit anggaran hingga bulan Oktober meningkat karena tingginya belanja subsidi energi.....	17
Gambar 19: Penerimaan mengalami moderasi karena berlanjutnya perlemahan penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak .....	17
Gambar 20: Volume BBM bersubsidi terus meningkat di tahun 2012 karena tidak adanya reformasi subsidi BBM .....	18
Gambar 21: Konsumsi BBM yang melebihi Kuota terpusat di kota-kota yang padat, daerah-daerah pertambangan dan perbatasan.....	19
Gambar 22: Sisa anggaran tahun 2012 sampai akhir bulan Oktober masih besar.....	19
Gambar 23: Belanja modal dan subsidi akan meningkat pada tahun 2013 .....	20
Gambar 24: Kenaikan ditahun 2013 dapat mendorong upah minimum di atas negara tetangga 24	24
Gambar 25: Sebagian besar angkatan kerja di Indonesia adalah pekerja informal.....	27
Gambar 26: Tetapi bagi pekerja di sektor formal, upah minimum mengindikasikan kenaikan bagi semua .....	27
Gambar 27: Ketidapatuhan cenderung meningkat dengan naiknya upah minimum .....	28
Gambar 28: ...dan perusahaan kecil cenderung lebih tidak patuh .....	28
Gambar 29: Banjir tahun 2007 menyebabkan kerusakan finansial yang cukup besar dan kerugian ekonomi yang jauh lebih tinggi... ..	32
Gambar 30: ...dan kerugian ekonomi itu terfokus kepada perusahaan-perusahaan industri yang lebih besar .....	32
Gambar 31: Daerah-daerah perumahan kumuh yang terkena banjir.....	33
Gambar 32: Banjir tahun 2007 akan lebih ringan bila sarana yang ada berfungsi sepenuhnya ..	35
Gambar 33: Kerangka strategis bagi rekonstruksi bencana yang efektif .....	40
Gambar 34: Kesiapan Pelayanan Kesehatan lebih tinggi di Jawa dan Bali dan rendah di bagian timur Indonesia.....	46
Gambar 35: Pola spasial untuk Kesiapan Pelayanan di bidang Pendidikan sama dengan bidang Kesehatan .....	47
Gambar 36: Daerah dengan Kesiapan Pelayanan yang rendah untuk Kesehatan dan Pendidikan cenderung mempunyai akses transportasi umum yang buruk.....	49
Gambar 37: Setengah kecamatan di Papua tidak memiliki sinyal ponsel.....	49
Gambar 38: Kualitas guru SD dapat bervariasi cukup besar bahkan didalam kecamatan.....	49

## DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan .....	51
Lampiran gambar 2: Kontribusi pengeluaran terhadap PDB .....	51
Lampiran gambar 3: Kontribusi sektor terhadap PDB .....	51
Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil .....	51
Lampiran gambar 5: Indikator konsumen .....	51
Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri .....	51
Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil .....	52
Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran .....	52
Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan .....	52
Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing .....	52
Lampiran gambar 11: Indeks harga komoditas terpilih .....	52
Lampiran gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter .....	52
Lampiran gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen .....	53
Lampiran gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga .....	53
Lampiran gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional .....	53
Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran .....	53
Lampiran gambar 17: Indeks saham regional .....	53
Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar Amerika dan rupiah .....	53
Lampiran gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal .....	54
Lampiran gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika .....	54
Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum .....	54
Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan .....	54
Lampiran gambar 23: Utang pemerintah .....	54
Lampiran gambar 24: Utang luar negeri .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Secara historis harga nominal komoditas masih bertahan tinggi tetapi tren terakhir beragam .....	v
Tabel 2: Dalam skenario <i>baseline</i> pertumbuhan Indonesia diproyeksikan mencapai 6,3 persen untuk tahun 2013 .....	vii
Tabel 3: Berdasarkan scenario dasar pertumbuhan PDB 2012 diproyeksikan sebesar 6,1 persen di 2012, dan meningkat menjadi 6,3 persen di 2013 .....	6
Tabel 4: Tingkat pencairan anggaran hingga akhir bulan Oktober masih rendah .....	18
Tabel 5: Defisit fiskal akan meningkat pada tahun 2012 karena peningkatan belanja subsidi energi dan perlemahan pada penerimaan .....	21
Tabel 6: ... sementara produktivitas pekerja masih tertinggal .....	24
Tabel 7: Indeks gabungan Kesiapan Sisi Penawaran termasuk beragam indikator Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi .....	44
Tabel 8: Beberapa Kesenjangan pada Kesiapan Pelayanan Kesehatan sangat mengejutkan, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan sekunder .....	46
Tabel 9: Kesenjangan Kesiapan Pelayanan Pendidikan indeks menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan kualitas fisik layanan .....	48

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah .....	55
Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran .....	55
Lampiran tabel 3: Sekilas tentang indikator sosial Indonesia .....	56

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Undang-Undang Pangan yang baru di Indonesia .....	10
Kotak 2: Mengapa depresiasi Rupiah tidak membawa dampak yang lebih besar kepada inflasi .....	12
Kotak 3: Perkembangan pada kerangka pengelolaan perusahaan di Indonesia .....	15
Kotak 4: Peraturan Tenaga Kerja: Pengaruh “taraf tanpa kemajuan” .....	28
Kotak 5: Dampak banjir besar tahun 2007 terhadap Jakarta .....	32
Kotak 6: Rekomak – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas pasca bencana .....	39
Kotak 7: Catatan tentang keandalan Peringkat Kesiapan Sisi Penawaran .....	45



## Ringkasan eksekutif: Menyoroti kebijakan



**Kondisi ekonomi global masih lemah dan membaik hanya dengan laju yang lambat**

Menjelang akhir tahun 2012, kondisi ekonomi dunia tampaknya mulai membaik, tetapi dengan laju yang lambat dan tidak merata. Pada kuartal ketiga, pertumbuhan di Amerika Serikat mulai membaik, sementara ekonomi China terus melambat, walaupun PDB-nya masih tumbuh 7,4 persen tahun-ke-tahun. Perekonomian di wilayah Eropa dan Jepang mencatat kontraksi. Data-data terkini di kuartal keempat menunjukkan perkembangan beragam. Data manufaktur dan indeks daya beli manajer (*purchasing managers index*) menunjukkan perkembangan di AS masih mengecewakan dan berlanjutnya perlambatan di Eropa, terutama di Jerman dan Prancis. Tetapi juga terdapat indikasi yang positif bahwa ekonomi China, dan produksi industri berorientasi ekspor di lintas Asia, kini sedang meningkat. Perkembangan ekonomi yang beragam ini menunjukkan perbaikan ekonomi global yang lambat dan kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju, secara umum telah mendukung pasar keuangan. *Spread* (selisih harga beli dan jual saham) ekuitas dan obligasi negara di pasar negara berkembang (*emerging*) telah bergejolak sejak bulan September, tetapi tren keseluruhan sejak pertengahan tahun mengarah kepada meningkatnya harga-harga saham dan mengecilnya *spread*.

**Perlemahan ini telah berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia...**

Seperti halnya eksportir komoditas lainnya, Indonesia secara nyata telah merasakan dampak perlemahan ekonomi global pada tahun 2012 melalui jalur perdagangan. Ekspor tahun berjalan hingga bulan Oktober turun sebesar 6,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2011 dalam dolar AS, sementara permintaan impor terus tumbuh. Akibatnya, secara kumulatif neraca perdagangan sepanjang tahun 2012 hingga bulan Oktober mencatat defisit sebesar 500 juta dolar AS, dibanding surplus sebesar 26 miliar dolar AS pada sepuluh bulan pertama tahun 2011. Penurunan ini telah membebani Rupiah, yang turun sebesar 6,0 persen berdasarkan bobot-perdagangan di tahun 2012.

**Tabel 1: Secara historis harga nominal komoditas masih bertahan tinggi tetapi tren terakhir beragam**

*(harga komoditas dolar AS, persentase perubahan; bagian ekspor, persen)*

	Perubahan ke November 2012 dari:			Bagian ekspor*
	Jan-05	Des-11	Sept-12	
<b>Batu bara</b>	56,6	-24,3	-6,6	14,0
<b>Gas alam</b>	49,7	4,6	8,8	11,6
<b>Minyak sawit</b>	102,5	-20,7	-15,8	9,0
<b>Minyak mentah</b>	147,7	1,7	-3,2	6,5
<b>Karet</b>	151,3	-12,1	-2,1	4,5
<b>Tembaga</b>	143,3	1,9	-4,7	2,5

Catatan: Batu bara Australia, indeks gas alam global Bank Dunia, minyak kelapa sawit Malaysia, minyak mentah Brent, karet Singapura, tembaga yang diperdagangkan di London; Bagian ekspor adalah Januari-Juli 2012

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

...dengan ekspor terkait dengan komoditas terkena dampak penurunan harga-harga global yang terus berlanjut

Sebagian besar penurunan ekspor terkait dengan lemahnya harga-harga komoditas, banyak yang masih tertekan (Tabel 1). Harga minyak sawit turun tajam terutama dalam beberapa bulan terakhir, dengan harga rata-rata bulan November turun 16 persen dibanding bulan September. Harga minyak mentah dan gas alam telah naik sejak pertengahan tahun. Ada tanda-tanda bahwa penurunan harga batu bara, sebesar 24 persen sejak akhir tahun 2011, telah stabil kembali tetapi penurunan yang lalu masih membebani kinerja ekspor kedepan. Harga-harga bahan logam industri, terutama tembaga, telah pulih dari nilai rendahnya pada pertengahan tahun, tetapi sedikit melemah pada bulan November.

Namun ekonomi secara keseluruhan telah terbukti tetap kokoh

Perlemahan ekonomi global dan peningkatan ketidakpastian di tahun 2012 tidak merintang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Hal ini terlihat pada kuartal ketiga, dimana PDB riil meningkat sebesar 6,2 persen tahun-ke-tahun, hanya sedikit di bawah 6,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua, walaupun laju pertumbuhan mengalami perlambatan secara penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal (*seasonally adjusted quarter on quarter*). Pertumbuhan tetap didorong oleh permintaan swasta yang kuat, dimana konsumsi swasta tetap menjadi sumber pertumbuhan dengan peningkatan sebesar 5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga, meningkat dari 5,2 persen pada kuartal kedua.

Investasi mencatat kinerja yang kuat selama tahun 2012 tetapi momentumnya sedikit melambat pada kuartal ketiga

Yang cukup menarik dari pertumbuhan tahun 2012 adalah kuatnya investasi tetap (*fixed investment*), yang selama beberapa waktu telah tumbuh lebih cepat dibanding kelompok pengeluaran yang lain. Sebagai akibatnya, nilai investasi kini mencapai sekitar sepertiga dari PDB nominal, naik dari 25 persen pada tahun 2007. Sejahter ini investasi tidak terpengaruh oleh penurunan harga komoditas maupun ekspor, yang sebelumnya menunjukkan keterkaitan (Gambar 1). Namun momentumnya mulai melemah pada kuartal ketiga dimana investasi riil berkontraksi relatif terhadap kuartal yang lalu (turun 0,4 persen secara penyesuaian musiman), walaupun tetap naik 10 persen tahun-ke-tahun. Persediaan (*inventories*) juga meningkat dalam tiga kuartal berturut-turut, yang dapat menunjukkan permintaan yang lebih rendah dari yang diperkirakan. Bila hal ini berdampak terhadap produksi pada kuartal-kuartal berikutnya, karena perusahaan menggunakan tingkat persediaan yang tinggi tersebut, maka hal ini dapat membebani pertumbuhan.

**Gambar 1: Pertumbuhan investasi sejauh ini tetap bertahan terhadap penurunan harga komoditas dan ekspor** (*persentase perubahan tahun-ke-tahun dalam investasi (riil), harga komoditas (dolar AS) dan nilai ekspor (dolar AS)*)



Catatan: \*Indeks harga tertimbang 6 komoditas ekspor utama

Sumber: BPS, Bank Dunia dan perhitungan staf

Laju inflasi tetap bertahan moderat...

Walaupun laju pertumbuhan tetap kuat, dengan tidak adanya kenaikan yang tajam dalam harga bahan pangan maupun harga-harga yang diatur oleh pemerintah (*administrative prices*), tekanan harga barang konsumsi IHK (*headline*) masih tetap lemah. Inflasi IHK dan inti pada bulan November adalah 4,3 persen dan 4,4 persen tahun-ke-tahun, dengan penurunan kecil yang belakangan terjadi terhadap inflasi IHK disebabkan oleh deflasi harga bahan pangan yang signifikan sejak bulan Juni. Bank Dunia memproyeksikan inflasi IHK akan meningkat menjadi 5,4 persen pada kuartal ke empat tahun 2013 (Tabel 2), di dorong oleh kuatnya permintaan konsumsi, tingginya tingkat pertumbuhan kredit konsumsi dan pengaruh yang terus berlangsung dari penurunan nilai tukar valuta sepanjang 2012. Tingginya peningkatan upah minimum pada tahun 2013 dan dampak reformasi tarif listrik akan menambah tekanan harga yang disebabkan oleh peningkatan

biaya. Dampak langsung terhadap inflasi dari perkembangan ini mestinya kecil, tetapi penting untuk berjaga-jaga terhadap terjadinya pengaruh putaran kedua (tidak langsung) yang lebih sulit untuk diukur.

...dan posisi fiskal secara keseluruhan tetap sehat, walaupun dilemahkan oleh subsidi BBM

Berpindah ke keuangan publik, Bank Dunia memperkirakan defisit 2012 sebesar 2,5 persen, lebih tinggi dari target defisit APBN-P 2,2 persen dari PDB. Namun tingkat defisit ini masih relatif kecil dan posisi fiskal secara agregat masih tetap sehat, dengan APBN 2013 menargetkan defisit yang lebih rendah sebesar 1,7 persen dari PDB. Jumlah utang pemerintah tetap rendah (kemungkinan lebih rendah dari 24 persen dari PDB pada tahun 2012) dan kemajuan pembiayaan tetap kuat.

Pertumbuhan penerimaan negara telah menurun karena melambatnya pertumbuhan PDB nominal, melemahnya penerimaan yang berkaitan dengan komoditas, dan volume produksi minyak mentah yang tidak berubah, walau penerimaan pajak penjualan (PPN) kuat didorong oleh kuatnya konsumsi swasta. Realisasi pengeluaran negara secara keseluruhan diproyeksikan mendekati alokasi APBN-P. Namun realisasi selama tahun 2012 terus menyoroti tantangan dalam memperbaiki alokasi dan kualitas belanja negara. Perbaikan tersebut dapat berperan penting dalam meningkatkan capaian penyediaan layanan publik, tidak hanya pada tingkat agregat tetapi juga untuk menangani ketidakmerataan spasial dalam penyediaan layanan dasar, seperti digaris bawahi oleh Sensus Infrastruktur Desa baru-baru ini.

Realisasi belanja modal dan material masih tertinggal di bawah sasaran, walaupun tumbuh kuat secara nominal. Yang menjadi perhatian kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) dari subsidi energi terus meningkat. Bank Dunia memproyeksikan bahwa subsidi BBM akan melebihi Rp 200 triliun untuk tahun 2012 (atau 20 persen dari jumlah belanja pemerintah, tidak termasuk transfer ke daerah). Jumlah ini cukup jauh di atas subsidi BBM tahun 2011 sebesar Rp 165 triliun. Kuatnya konsumsi dalam negeri telah mendorong penambahan kuota dan biaya semakin meningkat didorong naiknya harga pasar BBM dalam mata uang Rupiah. Subsidi juga membebani neraca perdagangan melalui impor produk-produk hasil penyulingan minyak.

Pertumbuhan yang kuat di atas 6 persen merupakan perkiraan dasar tahun 2013 tetapi risiko-risiko tetap condong kepada perlemahan...

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB untuk tahun 2012 secara keseluruhan pada 6,1 persen, dan naik tipis menjadi 6,3 persen pada tahun 2013 (Tabel 2). Perkiraan dasar (*baseline*) ini mengasumsikan berlanjutnya pertumbuhan dalam konsumsi dan terutama investasi, yang didukung oleh sedikit pemulihan dalam ekspor dengan perlahan-lahan membaiknya pertumbuhan dunia dan harga komoditas yang sedikit meningkat.

**Tabel 2: Dalam skenario *baseline* pertumbuhan Indonesia diproyeksikan mencapai 6,3 persen untuk tahun 2013**

		2010	2011	2012	2013
<b>Produk domestik bruto</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,2	6,5	6,1	6,3
<b>Indeks harga konsumen*</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,3	4,1	4,4	5,4
<b>Neraca APBN**</b>	(Persen dari PDB)	-0,6	-1,1	-2,2	-1,7
<b>Pertumbuhan mitra perdagangan utama</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,8	3,6	3,3	3,6

Catatan \*Iaju inflasi kuartal 4 pada kuartal 4, \*\* Neraca APBN untuk tahun 2012 dan 2013 adalah proyeksi pemerintah

Sumber: BPS lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc. dan staf Bank Dunia

...baik secara eksternal, dengan masih berlanjutnya ketidakpastian perkembangan ekonomi di negara maju dan China...

Risiko-risiko terhadap perkiraan dasar itu tetap condong kepada penurunan. Ketidakpastian *outlook* internasional tetap tinggi dan terdapat risiko-risiko yang cukup besar dari tekanan eksternal yang lebih negatif yang dapat menerpa ekonomi. Hal ini termasuk beban fiskal yang besar atau tekanan terhadap kepercayaan sektor swasta di AS yang bergantung kepada hasil negosiasi "jurang fiskal", peningkatan kembali intensitas tantangan sektor perbankan dan utang di zona Eropa, dan secara khusus, perlambatan yang berlanjut pada ekonomi China. Tambahan ketidakpastian lainnya adalah perkembangan aliran masuk portofolio, yang akhir-akhir ini kembali meningkat ke

obligasi pasar negara berkembang (*emerging market*), termasuk ke Indonesia, dengan catatan tertinggi pembelian bersih oleh investor asing pada bulan November sebesar 2 miliar dolar AS. Bila data ekonomi dunia terus meningkat dan kebijakan moneter tetap longgar secara internasional, kembalinya aliran masuk modal seperti yang terjadi pada tahun 2010 dapat terjadi dan akan menambah tantangan kebijakan.

...dan secara domestik, dengan investasi yang dapat menghadapi tantangan

Secara domestik, terdapat risiko-risiko terhadap kuatnya pertumbuhan investasi yang menjadi faktor penting bagi cepatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak krisis keuangan dunia. Secara historis investasi cenderung memiliki korelasi yang kuat dengan harga-harga komoditas dunia. Karena harga-harga masih jauh dibawah nilai tertingginya pada masa pasca krisis keuangan global, ada kemungkinan investasi akan mulai terbebani dengan penurunan penerimaan yang berkaitan dengan komoditas yang juga dapat berpengaruh terhadap ekonomi secara luas. Karena sifat belanja investasi yang besar dan butuh waktu, dan adanya perbedaan besar antar daerah terhadap ketergantungan komoditas ekonomi daerah di seluruh Indonesia, angka statistik agregat yang terbaru bisa tertunda dan tidak menunjukkan dampak lokal yang signifikan dari hilangnya dorongan harga komoditas yang positif seperti yang terlihat belakangan ini. Dampak tersebut didukung oleh sejumlah bukti *anekdot* di sektor perbankan dan korporasi.

Tetap tingginya ketidakpastian menjadikan pentingnya menjaga kerangka kebijakan yang stabil...

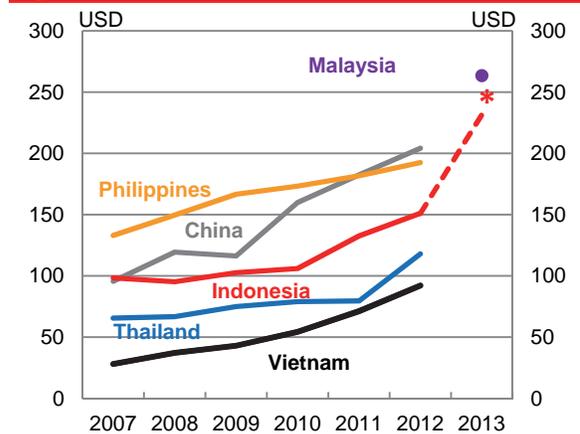
Sektor swasta telah memainkan peranan penting dalam mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat akhir-akhir ini, dengan mendorong pertumbuhan belanja investasi dalam dan luar negeri. Investasi ini umumnya membutuhkan komitmen jangka panjang, yang bergantung kepada tingkat kepercayaan dan kemampuan perencanaan ke depan secara efektif. Sejumlah peraturan perundangan dan hukum yang diumumkan selama tahun 2012 telah meningkatkan kekhawatiran di antara para investor terhadap lingkungan kebijakan dunia usaha domestik dan investasi, yang dapat semakin meningkat menjelang pemilu nasional tahun 2014. Dalam konteks ini, dan dengan pertimbangan risiko (*risk appetite*) investor global yang masih rapuh, upaya untuk menjaga kejelasan dan konsistensi kerangka peraturan, dan secara efektif mengelola komunikasi terhadap reformasi baru, dapat menjadi hal yang menentukan bagi investasi dan ekonomi secara luas.

...yang menyeimbangkan antara kepentingan kesejahteraan kelompok pekerja yang beragam dan outlook bagi lapangan kerja dan investasi

Masalah pasar tenaga kerja telah mencuat ke permukaan pada kuartal yang lalu selama proses tahunan penetapan upah minimum yang rumit dan penuh perdebatan. Sejumlah negosiasi pada tahun ini telah memicu sejumlah protes besar dari buruh dan berakhir dengan peningkatan upah minimum yang besar untuk tahun 2013. Hal ini termasuk peningkatan upah minimum sebesar 44 persen menjadi Rp 2,2 juta per bulan di Jakarta dan sekitarnya. Peningkatan yang besar itu dapat mendorong upah minimum Jakarta ke tingkat atas dibandingkan negara-negara berkembang di Asia (Gambar 2). Selain pengaruh kepada upah dan biaya satuan buruh relatif, secara lebih luas peningkatan itu juga dapat mempengaruhi daya saing Indonesia sebagai basis produksi regional, terutama bagi industri-industri yang sangat bergantung pada input tenaga kerja.

**Gambar 2: Peningkatan tahun 2013 dapat mendorong upah minimum lebih tinggi relatif dibanding negara tetangga...**

(tingkat upah minimum (dolar AS per bulan), beberapa negara Asia Timur)



Catatan: Upah minimum Indonesia menggunakan upah DKI Jakarta (dengan asumsi nilai tukar USD tahun 2013 adalah Rp 9.500), negara lainnya berdasarkan upah minimum dikota besar atau ibukota, tidak disesuaikan dengan produktivitas

Sumber: World Bank Doing Business, 2013, dan laporan media dan peraturan tahun 2013

Walaupun upah minimum penting untuk mengatasi kegagalan pasar tenaga kerja yang dapat menghasilkan dampak yang kurang efisien dan tidak adil, melewati batas tertentu dapat membawa risiko-risiko negatif dan tidak diinginkan. Hal ini termasuk menurunkan insentif bagi penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal dan mendorong segmentasi yang membatasi pekerjaan dan mobilitas sosial. Selain itu, mekanisme penetapan upah minimum, dan besarnya, tidak dapat dipandang secara terpisah. Hal tersebut sesungguhnya sebagai bagian dari banyak faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas lapangan kerja dan keuntungan usaha, termasuk remunerasi non-upah, uang pesangon, jaminan sosial dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pekerjaan kontrak. Banyak hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif terhadap tawar-menawar di pasar tenaga kerja, dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja sektor informal, telah diwakili, dan dengan membuat proses penetapan upah minimum lebih transparan dan mendapat masukan secara teknis.

**Ketidakpastian kebijakan jangka pendek apapun sebaiknya tidak mempengaruhi kebutuhan untuk terus melanjutkan kemajuan dalam peningkatan layanan publik dan akses di seluruh Indonesia, dan terus meningkatkan ketahanan negara terhadap berbagai risiko bencana alam yang dihadapinya**

Sementara risiko-risiko jangka pendek seperti disinggung di atas telah mendominasi debat kebijakan yang belakangan terjadi, sangat penting untuk tidak mengalihkan fokus terhadap kebutuhan dan momentum dalam mencapai kemajuan penanganan tantangan pembangunan jangka menengah. Dalam sejumlah bidang, seperti dalam kesiapan dan rekonstruksi pasca-bencana, telah mencatat kemajuan yang berarti, dengan keberhasilan Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik perumahan, gedung-gedung dan infrastruktur, dan dalam memulihkan nafkah ekonomi. Indonesia juga telah mengembangkan pendekatan-pendekatan dan model-model yang telah terbukti yang dapat digunakan kembali untuk menghadapi bencana berikutnya, baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang rawan akan bencana.

Di bidang lain, masih terdapat banyak hal yang harus dilakukan. Sebagai contoh, sementara kemajuan telah dicapai dalam memenuhi *Millennium Development Goal* pada tingkat nasional, Sensus Infrastruktur Desa (SID) terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah menyoroti gambaran daerah yang lebih meresahkan: masing-masing propinsi, kabupaten/kota, dan desa-desa tidak mencatat tingkat kemajuan yang merata dalam hal penyediaan atau akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Akan tetapi pengumpulan informasi yang rinci dari penelitian tersebut merupakan langkah awal untuk memperbaiki ketimpangan kemajuan melalui identifikasi kebutuhan yang lebih baik dan peningkatan perencanaan dan penargetan sumber daya.

Akhirnya, peristiwa banjir yang melanda Jakarta bersamaan dengan datangnya musim hujan adalah peringatan tepat waktu tentang tantangan-tantangan urbanisasi dan risiko yang akan datang dari dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi banjir sedang dilaksanakan, dari pengerukan sungai dan perbaikan kanal melalui persiapan komunitas dan perencanaan kontingensi, yang membantu kota Jakarta untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Dengan sedikit tambahan investasi untuk mitigasi banjir yang sistematis dan menyeluruh, dan suatu sistem kontingensi dan sosialisasi informasi, Jakarta dapat menjadi sebuah kota yang tahan terhadap banjir.

## A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI



### 1. Pertumbuhan ekonomi global masih tetap lemah, diperkirakan hanya sedikit membaik di tahun 2013

**Momentum ekonomi global membaik, tetapi berjalan lambat dan tidak merata**

Seiring dengan mendekatnya akhir tahun 2012, kondisi ekonomi global sedikit membaik seperti diantisipasi pada Triwulanan edisi bulan Oktober, walau penguatan yang terjadi berjalan sangat lambat dan tidak merata. PDB AS di kuartal ketiga meningkat menjadi 2,7 persen dengan penyesuaian musiman yang disetahunkan (*seasonally adjusted annualized rate, saar*), naik cukup tajam dari 1,3 persen (*saar*) pada kuartal kedua dengan revisi naik yang signifikan dari perkiraan awal sebesar 2 persen. Sebaliknya, ekonomi China terus melambat di kuartal ketiga (tahun-ke-tahun), walau masih tumbuh sebesar 7,4 persen tahun-ke-tahun, dan terdapat beberapa perkembangan positif, seperti dari output industri yang menunjukkan sejumlah percepatan dalam pertumbuhan sedang berlangsung. Sementara faktor yang kurang positif, Zona Eropa masih terus berjuang untuk keluar dari resesinya yang berkepanjangan, dan dengan PDB di kuartal ketiga relatif datar sebesar -0,2 persen (*saar*) ditengah kekhawatiran melambatnya pertumbuhan baik di Jerman - sebagai mesin pertumbuhan wilayah itu - dan Prancis. Ekonomi Jepang juga mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (*saar*) di kuartal ketiga 2012.

**Didukung oleh kebijakan yang akomodatif, hal ini telah mendukung pasar keuangan**

Pergerakan data ekonomi beragam sejak Triwulanan edisi bulan Oktober dan belum menunjukkan akan adanya pemulihan pertumbuhan global dalam waktu dekat yang mengindikasikan masih diperlukan kebijakan moneter yang akomodatif (Gambar 3). Sementara itu, krisis hutang di zona Eropa terus berlangsung namun kekhawatiran terhadap pembiayaan hutang dan krisis di sektor perbankan telah mereda sejak bulan Agustus, seiring dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Eropa. Perpaduan kondisi ini telah membuat tingkat *imbal hasil* obligasi negara-negara maju ke tingkat terendah secara historis, menstabilkan kondisi keuangan di zona Eropa, dan memberikan dukungan terhadap pengambilan resiko untuk berinvestasi, memicu aliran masuk modal yang signifikan ke pasar hutang dan ekuitas negara-negara berkembang (*emerging*). Karenanya, walau pergerakan di pasar keuangan cukup bejolak sejak *Triwulanan* bulan Oktober, harga-harga ekuitas terus bertahan di level yang cukup jauh di atas harga terendahnya di pertengahan tahun dan *spread* obligasi negara telah mengecil kembali ke tingkat yang pernah dicapai di pertengahan tahun 2011.

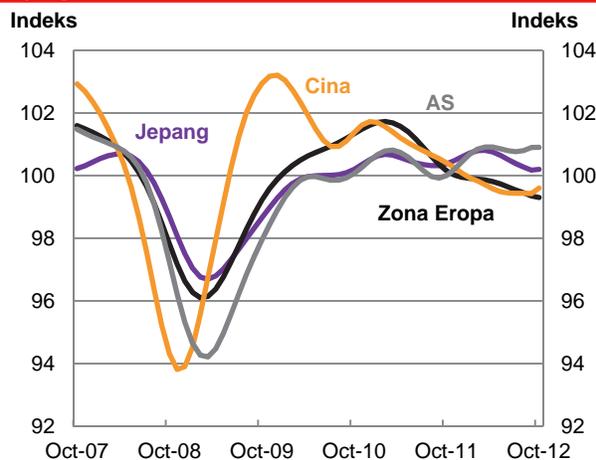
**Pergerakan-pergerakan harga komoditas beragam**

Sejalan dengan masih lemahnya pemulihan pertumbuhan dunia, pergerakan harga-harga komoditas internasional akhir-akhir ini beragam, dan harga-harga sebagian besar ekspor utama Indonesia terus mengalami tekanan (Gambar 4). Harga minyak sawit khususnya turun tajam, dengan harga rata-ratanya di bulan November turun 16 persen dibandingkan September, membawa penurunan keseluruhan hingga November menjadi 21 persen. Harga minyak mentah dan gas alam telah meningkat sejak pertengahan tahun dan ada tanda-tanda penurunan harga batu bara yang sebelumnya cukup besar telah stabil, walau harga masih lebih rendah 20 persen selama tahun 2012. Harga bahan logam industri, terutama tembaga, sedikit membaik dari harga terendahnya di pertengahan tahun walau ada kecenderungan menurun di bulan November.

Tahun 2013 memberikan harapan yang lebih baik bagi pertumbuhan global walaupun tidak besar, dan resiko penurunan tetap ada

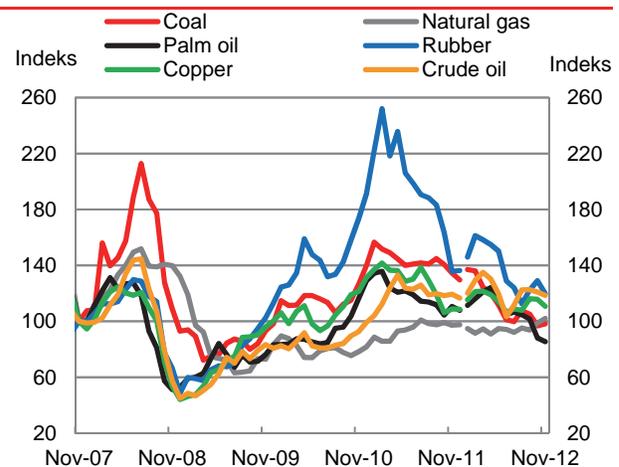
Melihat prospek di tahun 2013, *outlook* ekonomi global diperkirakan membaik secara perlahan, dalam hal ini Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia akan meningkat sebesar 0,3 persen menjadi 3,6 persen. Laju pemulihan krisis keuangan di negara berpenghasilan tinggi diperkirakan akan tetap berjalan lambat; banyak diantaranya masih terbebani oleh hutang yang tinggi hingga menyebabkan perlemahan ekspansi sektor swasta (*deleveraging*) dan konsolidasi fiskal. Karenanya banyak hal bergantung kepada China, dimana risiko perlambatan lebih jauh tetap ada, walaupun bukan skenario dasar. Sementara di kawasan Eropa dan AS terdapat kemungkinan untuk terjadinya skenario yang lebih buruk, seiring dengan berlanjutnya negosiasi di AS dalam upaya menghindari peningkatan pajak yang tajam dan pemotongan belanja yang ditetapkan oleh undang-undang saat ini ("jurang fiskal"), sementara Eropa terus menghadapi tantangan yang terjal untuk menuju hutang yang berkelanjutan. Skenario dasar di tahun 2013 adalah pertumbuhan global membaik tetapi masih samar-samar, oleh karena itu akan terus menjadi resiko, yang akan dibicarakan di akhir Bagian A.

**Gambar 3: Membaiknya kondisi di AS dan China telah mencapai titik terendah dan kembali bangkit, tetapi belum ada perubahan di zona Eropa atau Jepang**  
(indikator utama gabungan OECD, indeks, 100 = tren jangka panjang)



Sumber: OECD

**Gambar 4: Komoditas tetap berada di bawah harga tertingginya, walau sebagian telah meningkat di beberapa bulan terakhir**  
(indeks harga komoditas dolar AS, November 2007=100)



Catatan: Batu bara Australia, index gas alam global Bank Dunia, minyak sawit Malaysia, karet yang diperdagangkan di Singapore, tembaga yang diperdagangkan di London, minyak mentah Brent  
Sumber: Bank Dunia dan perhitungan staf

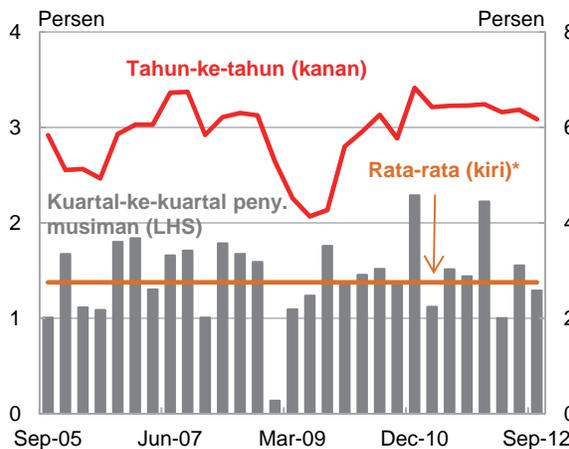
## 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, sedikit melambat di kuartal ketiga

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 6,2 persen tahun ke tahun di kuartal ketiga tahun 2012

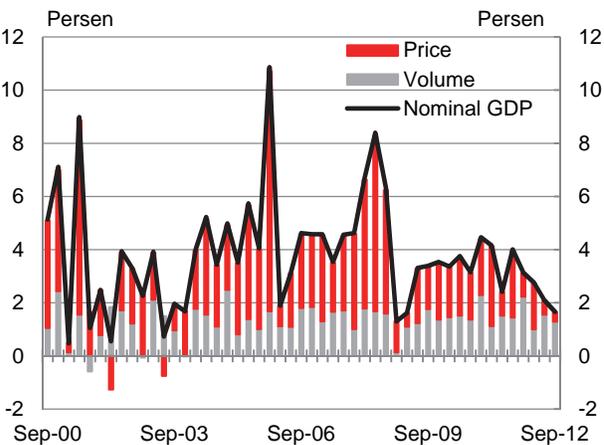
Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terbukti kuat dalam menghadapi perlemahan permintaan eksternal pada tahun 2012. PDB riil tumbuh 6,2 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga. Laju pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari 6,4 persen pada kuartal kedua dan merupakan kuartal kedelapan yang mencatat pertumbuhan di atas 6 persen secara berturut-turut. Dengan penyesuaian musiman (*seasonally-adjusted*) kuartal-ke-kuartal, ekonomi tumbuh sebesar 1,3 persen di kuartal ketiga, turun dari 1,6 persen di kuartal kedua (Gambar 5).

Sementara pertumbuhan PDB riil sedikit menurun, pertumbuhan PDB nominal mencatat penurunan yang cukup besar pada kuartal ketiga, dengan pertumbuhan hanya 9,9 persen (tahun-ke-tahun), lebih rendah dari 12,5 persen di kuartal kedua. Laju pertumbuhan ini adalah yang terendah dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar mencerminkan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan deflator PDB (Gambar 6).

**Gambar 5: Pertumbuhan PDB riil turun menjadi 6,2 persen (tahun ke tahun) pada kuartal ketiga tahun 2012... (pertumbuhan PDB riil, persen)**



**Gambar 6: ...sementara pertumbuhan PDB nominal jatuh ke tingkat terendah sejak September 2009 karena perlambatan pertumbuhan PDB deflator (pertumbuhan PDB nominal kuartal-ke-kuartal penyesuaian musiman, persen)**



Catatan: \* Rata-rata pertumbuhan kuartal-ke-kuartal sejak kuartal dua tahun 2002  
Sumber: BPS dan penyesuaian musiman staf Bank Dunia

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan permintaan dalam negeri melambat tetapi tetap kuat...**

Secara riil, pertumbuhan permintaan dalam negeri mengalami pelemahan di kuartal ketiga menjadi 6,1 persen tahun-ke-tahun, turun dari 7,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua. Konsumsi swasta dan investasi terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mantap (Gambar 7). Sementara konsumsi pemerintah mencatat penurunan yang mengejutkan, turun sebesar 3,2 persen dari tahun-ke-tahun, disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang pemerintah.

**... dengan pertumbuhan investasi melambat**

Tingkat pengeluaran investasi masih cukup tinggi, meningkat sebesar 10 persen tahun-ke-tahun di kuartal ketiga. Akan tetapi investasi sesungguhnya mengalami kontraksi apabila dilihat berdasarkan penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal sebesar 0,4 persen di kuartal ketiga. Kontraksi yang berurutan ini sebagian besar didorong oleh penurunan dalam belanja transportasi luar negeri, permesinan dan peralatan, yang konsisten dengan melemahnya impor barang modal yang terlihat dalam kuartal ini. Investasi gedung (yang merupakan 84 persen dari seluruh investasi) terus tumbuh dengan kuat di kuartal ketiga, meningkat sebesar 8,0 persen tahun-ke-tahun, sejalan dengan kuatnya pertumbuhan yang tercatat pada penjualan semen.

**... dan konsumsi swasta yang meningkat**

Berbeda dari penurunan yang tajam yang terjadi dalam konsumsi pemerintah dan perlambatan dalam investasi, pertumbuhan konsumsi swasta meningkat di kuartal ketiga, naik sebesar 5,7 persen tahun-ke-tahun. Tercatat peningkatan yang kuat pada konsumsi bahan pangan dan non-pangan. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen mencapai tingkat tertinggi di kuartal ini.

**Ekspor masih terus tertekan dan impor mengalami kontraksi tajam**

Tidak seperti kuartal sebelumnya, faktor permintaan eksternal netto kali ini memberikan dukungan positif terhadap pertumbuhan yang terjadi di kuartal ini; ekspor netto naik 2,3 persen terhadap penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal. Akan tetapi, hal ini disebabkan oleh tajamnya penurunan impor yang menetralkan berlanjutnya penurunan yang terjadi pada ekspor di kuartal ketiga. Ekspor barang-barang dan jasa tetap mengalami tekanan turun sebesar 2,4 persen (penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal). Impor secara mengejutkan berkontraksi dengan tajam, turun sebanyak 8,7 persen (penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal). Penurunan impor ini merupakan yang pertama sejak kuartal pertama tahun 2009 dan sepertinya disebabkan oleh melemahnya ekspor, dimana lemahnya ekspor cenderung mengurangi kebutuhan untuk mengimpor barang modal dan setengah jadi untuk bahan *input* (lihat *Triwulanan* edisi bulan Juli 2012).

**Pertumbuhan pada sisi produksi didorong oleh sektor manufaktur...**

Di sisi produksi, kinerja sektor manufaktur cukup kuat, sementara pertumbuhan sektor jasa mengalami perlambatan (Gambar 8). Sektor manufaktur tumbuh menjadi 6,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga, dibanding dengan 5,5 persen tahun-ke-tahun di kuartal kedua. Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja yang kuat dari sektor berorientasi domestik seperti yang terjadi pada industri bahan pangan, minuman dan tembakau (naik 10,4 persen tahun-ke-tahun) dan pupuk, bahan kimia dan karet (naik 15,4 persen tahun-ke-tahun). Namun demikian manufaktur minyak dan gas turun sebesar 5,0 persen tahun-ke-tahun. Sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas, hanya tumbuh 4,6 persen dan terus berkontraksi (-3,5 persen kuartal-ke-kuartal penyesuaian musiman).

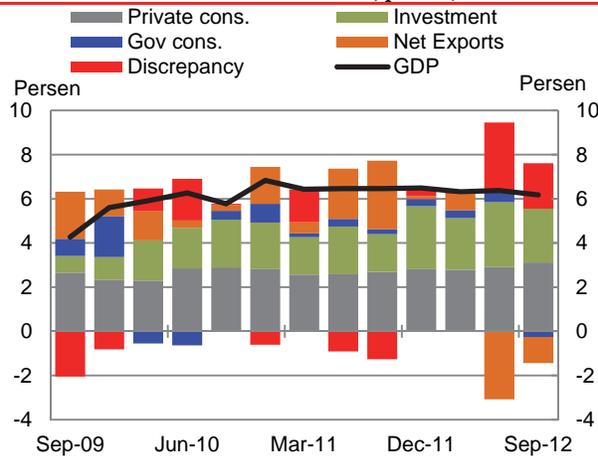
**...sementara sektor jasa mencatat kinerja yang beragam**

Pertumbuhan pada sektor jasa sedikit melambat namun tetap kuat sebesar 7,3 persen tahun-ke-tahun, dibanding 8,1 persen di kuartal kedua. Sektor komunikasi dan transportasi tetap menjadi sektor penghasil jasa yang terkuat (meningkat 10,5 persen tahun-ke-tahun). Terdapat sejumlah pelemahan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran pada kuartal ini.

**Tren indikator-indikator frekuensi tinggi konsisten dengan kuatnya pertumbuhan yang terus berlanjut**

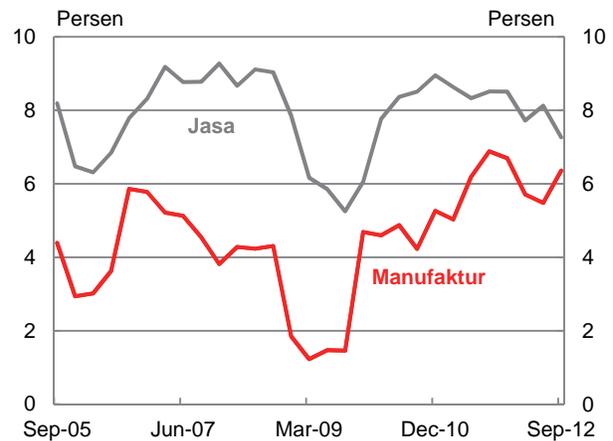
Indikator-indikator frekuensi tinggi secara umum konsisten dengan berlanjutnya pertumbuhan yang kuat. Kuatnya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor terus berlanjut. Penjualan sepeda motor, yang tertekan diawal tahun, bergerak stabil di bulan September dan Oktober. Sementara di sisi produksi, penjualan semen dan produksi industri menunjukkan sejumlah peningkatan di beberapa bulan terakhir, walaupun data terus berfluktuasi.

**Gambar 7: Investasi dan konsumsi swasta tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan (pertumbuhan PDB riil tahun-ke-tahun, persen)**



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 8: Manufaktur tetap kuat pada kuartal ketiga sementara pertumbuhan jasa melambat (perubahan tahun-ke-tahun manufaktur dan jasa, persen)**



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan PDB diproyeksikan pada 6,1 persen untuk tahun 2012 dan 6,3 persen untuk tahun 2013...**

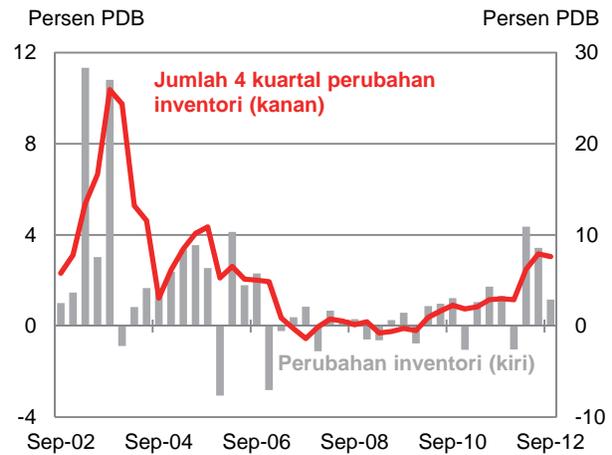
Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tahun 2012 adalah 6,1 (Tabel 3), tidak berubah dari proyeksi sebelumnya di *Triwulanan* Oktober. Namun demikian, komposisi pertumbuhan sedikit menunjukkan beberapa perbedaan dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Permintaan dalam negeri menunjukkan pelemahan dibanding perkiraan yang disebabkan oleh besarnya penurunan belanja pemerintah dan sedikit penurunan investasi selama kuartal ketiga; tetapi ekspor bersih melampaui perkiraan dengan koreksi impor yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Perkiraan untuk tahun 2013 masih tetap pada peningkatan tipis pertumbuhan menjadi 6,3 persen sejalan dengan membaiknya lingkungan eksternal. Secara keseluruhan tidak ada perubahan terhadap proyeksi pertumbuhan tahun 2013, dengan perkiraan konsumsi swasta yang sedikit lebih kuat diimbangi oleh sedikit melemahnya perkiraan ekspor bersih.

...tetapi risiko masih tetap condong kepada penurunan

Risiko-risiko terhadap *outlook* masih condong kepada penurunan terutama bila terjadi tekanan yang lebih besar di pasar keuangan internasional, harga komoditas atau permintaan luar negeri, maka pertumbuhan domestik dapat menjadi dibawah proyeksi dasar (*baseline*). Lebih lanjut, sementara konsumsi swasta tetap kokoh, investasi dapat terkena dampak dari menurunnya harga komoditas dunia serta dari situasi perkembangan terakhir sejumlah regulasi yang cenderung menimbulkan sentimen ketidak pastian, seperti yang akan dibicarakan di bawah.

Lebih lanjut, telah terjadi peningkatan persediaan barang (inventori) seperti ditunjukkan oleh PDB di beberapa kuartal terakhir (Gambar 9), yang dapat mengindikasikan adanya pelemahan permintaan, tidak seperti yang diantisipasi. Jika hal ini berdampak pada produksi pada kuartal-kuartal yang akan datang dimana pengusaha menarik persediaan yang tinggi, dapat membebani pertumbuhan.

**Gambar 9: Tingkat inventori menunjukkan peningkatan (perubahan kuartalan dalam inventori 4-kuartalan dalam inventori, harga berlaku, persentase terhadap PDB)**



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Tabel 3: Berdasarkan scenario dasar pertumbuhan PDB 2012 diproyeksikan sebesar 6,1 persen di 2012, dan meningkat menjadi 6,3 persen di 2013  
(persentase perubahan ,kecuali dinyatakan lain)**

	Tahunan			Tahun berjalan ke kuartal Desember			Revisi Tahunan	
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2012	2013
<b>1. Indikator ekonomi utama</b>								
Total pengeluaran konsumsi	4,5	5,1	5,3	4,6	5,3	4,6	-0,3	0,0
Pengeluaran konsumsi swasta	4,7	5,4	5,1	4,9	5,7	4,6	0,4	0,1
Konsumsi pemerintah	3,2	3,2	6,1	2,8	3,7	4,6	-5,1	-0,4
Pembentukan modal tetap bruto	8,8	10,3	11,2	11,5	9,1	10,7	-2,0	0,0
Ekspor barang dan jasa	13,6	1,1	3,8	7,9	-1,9	7,3	-1,7	-1,8
Impor barang dan jasa	13,3	3,9	3,1	10,1	-1,8	9,1	-3,2	-1,6
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	0,0	0,0
Pertanian	3,0	4,2	3,5	1,9	4,2	3,1	0,3	0,0
Industri	5,3	5,2	5,0	5,5	4,8	4,9	0,3	0,0
Jasa-jasa	8,5	7,6	8,0	8,5	7,3	8,0	-0,2	0,0
<b>2. Indikator eksternal</b>								
Neraca pembayaran (milyar AS\$)	11,9	-0,8	5,5	n/a	n/a	n/a	6,2	2,2
Neraca berjalan (milyar AS\$)	1,7	-19,9	-14,2	n/a	n/a	n/a	1,3	2,2
Neraca perdagangan (milyar AS\$)	23,3	1,3	7,7	n/a	n/a	n/a	1,1	0,9
Neraca keuangan (milyar AS\$)	13,5	20,6	19,7	n/a	n/a	n/a	4,7	0,0
<b>3. Indikator ekonomi lainnya</b>								
Indeks harga konsumen	5,4	4,3	4,9	4,1	4,4	5,4	-0,1	-0,2
Indeks keranjang kemiskinan	8,2	6,5	5,7	6,3	5,3	6,8	-0,3	-1,4
Deflator PDB	8,4	4,9	6,0	7,5	4,1	7,5	-1,6	-1,9
PDB nominal	15,4	11,3	12,7	14,5	10,0	14,5	-1,7	-2,0
<b>4. Asumsi ekonomi</b>								
Kurs nilai tukar (Rupiah/AS\$)	8773	9400	9500	9024	9550	9500	50,0	100,0
Harga minyak mentah Indonesia (AS\$/barel)	112	115	105	111	112	105	0,0	5,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,6	3,3	3,6	2,6	3,3	4,0	0,0	0,0

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional yang dapat melebihi pergerakan volume perdagangan sebenarnya, dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam penggunaan harga. Revisi relatif terhadap proyeksi yang dilakukan pada Triwulanan Oktober 2012

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, BI, CEIC dan Proyeksi Bank Dunia.

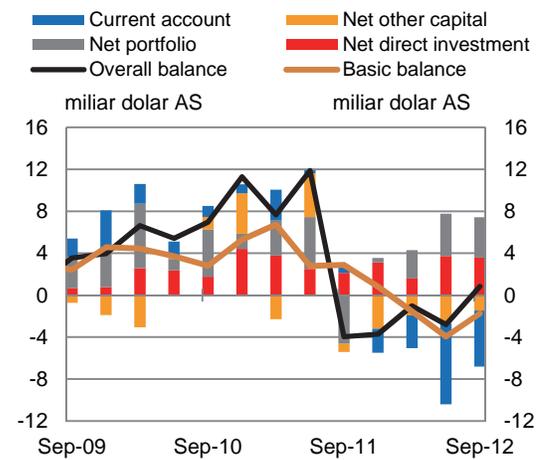
### 3. Ekspor masih tertekan tetapi aliran masuk modal tetap kuat

**Keseluruhan neraca pembayaran kembali mencatat surplus di kuartal ketiga**

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif cepat dan berlanjutnya perlemahan permintaan produk ekspornya telah membebani neraca eksternal. Namun demikian, neraca pembayaran kuartalan secara keseluruhan kembali mencatat surplus di kuartal ketiga untuk pertama kali sejak pertengahan tahun 2011 walau hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu sebesar 800 juta dolar AS. Surplus ini terjadi karena adanya penurunan tajam impor dan mengecilnya defisit neraca berjalan, sementara aliran masuk modal tetap menguat (Gambar 10).

Namun neraca dasar tetap mencatat defisit, karena surplus penanaman modal/FDI tidak cukup menutupi defisit neraca berjalan. Karenanya Indonesia tetap berisiko bila terjadi penurunan aliran modal jangka pendek di tengah peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Dengan defisit neraca berjalan yang diperkirakan semakin menyempit walau dengan kemungkinan kecil untuk kembali menjadi surplus karena ekonomi terus meningkat lebih cepat dibanding mitra-mitra perdagangan utama Indonesia dan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang tetap tinggi, maka upaya untuk menjaga dan meningkatkan aliran masuk investasi asing (FDI) akan menjadi sangat penting.

**Gambar 10: Neraca pembayaran kembali mencatat sedikit surplus di kuartal ketiga 2012 (miliar dolar AS)**



Catatan: Basic balance (neraca dasar) = current account balance (saldo neraca berjalan) + net direct investment (investasi langsung bersih)  
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Ekspor terus melemah di kuartal ketiga**

Lemahnya permintaan luar negeri dan rendahnya harga-harga, khususnya harga komoditas, terus membebani ekspor Indonesia. Ekspor tercatat di angka 46 miliar dolar AS di kuartal ketiga, merupakan nilai terendahnya selama delapan kuartal terakhir dan turun sebesar 5 persen dibanding kuartal kedua. Penurunan ini bersifat luas tetapi lebih nyata terlihat pada ekspor barang tambang dan mineral, dan pada minyak dan gas bumi. Perlemahan ini masih berlanjut ke bulan Oktober, di mana ekspor mencatat sedikit penurunan dibanding September dan turun sebesar 7,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

**Impor turun dengan tajam...**

Setelah tumbuh kuat di paruh pertama tahun 2012, impor berkontraksi tajam di kuartal ketiga menjadi 45,5 miliar dolar AS, turun lebih dari 5 miliar dolar AS dari kuartal kedua dan sebesar 2 persen secara nominal dalam dolar AS dibanding kuartal ketiga tahun 2011 (Gambar 11). Ini merupakan penurunan kuartalan pertama impor dalam tiga tahun terakhir. Namun, di bulan Oktober, impor kembali menguat, naik sebesar 12 persen dibandingkan bulan September didorong oleh naiknya impor energi dan bahan-bahan mentah.

**...yang mencerminkan penurunan produksi selama bulan Ramadhan dan jatuhnya permintaan bagi produk ekspor untuk bahan input**

Penurunan permintaan impor yang tercatat di kuartal ketiga sebagian mencerminkan dampak yang terjadi selama Ramadhan dan Lebaran dibulan Juli dan Agustus. Penurunan impor bahan mentah dan setengah jadi sebesar 10,6 persen kuartal-ke-kuartal merupakan kontributor terbesar terhadap penurunan impor secara keseluruhan, yang merupakan 7,8 persen dari penurunan 10,2 persen (kuartal-ke-kuartal) terhadap total impor. Data yang lebih rinci yang tersedia hingga bulan Agustus menunjukkan bahwa penurunan permintaan bahan mentah dan setengah jadi bersifat luas.

Penurunan ekspor yang terus berlanjut juga telah mempengaruhi permintaan impor barang modal. Impor barang modal turun sebesar 10,9 persen (kuartal-ke-kuartal) di kuartal ketiga, mengurangi seperlima dari jumlah penurunan kuartal-ke-kuartal yang

tercatat pada impor. Impor alat-alat berat dan transportasi, sebagai produk pendukung penting dalam kegiatan di sektor perkebunan dan pertambangan, telah melambat. Sementara, data perdagangan bulan Oktober menunjukkan impor barang modal kembali meningkat dan hal ini merupakan sinyal membaiknya ekspor di kemudian hari, tetapi sehubungan dengan sifat data perdagangan bulanan yang berfluktuasi, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti saat ini.

**Aliran masuk modal tetap kuat dan penanaman modal asing (PMA) terdiversifikasi dengan baik...**

Berbeda dengan neraca perdagangan yang tetap tertekan, Indonesia terus mencatat surplus finansial yang cukup besar, sebesar 6,0 miliar dolar AS di kuartal ketiga. Surplus ini tetap didorong oleh berlanjutnya investasi langsung bersih yang kuat (3,6 miliar dolar AS), dan juga investasi portofolio bersih (3,8 miliar dolar AS). Jumlah bersih investasi lainnya yang menyusut menjadi 1,5 miliar dolar AS (dari 2,7 miliar dolar AS pada kuartal ketiga) telah mendorong sebagian besar peningkatan dalam surplus neraca finansial, di mana masyarakat berpartisipasi dalam pembelian deposito dalam mata uang asing di dalam negeri dan mengecilnya jumlah pembayaran hutang pemerintah juga telah berkontribusi menurunkan aliran keluar dana. Cadangan devisa Bank Indonesia (BI) meningkat sebesar 3,7 miliar dolar AS selama kuartal tersebut menjadi 110,2 miliar dolar AS, dan terus bertambah sebesar 1 miliar dolar AS di bulan November menjadi 111,3 miliar AS.

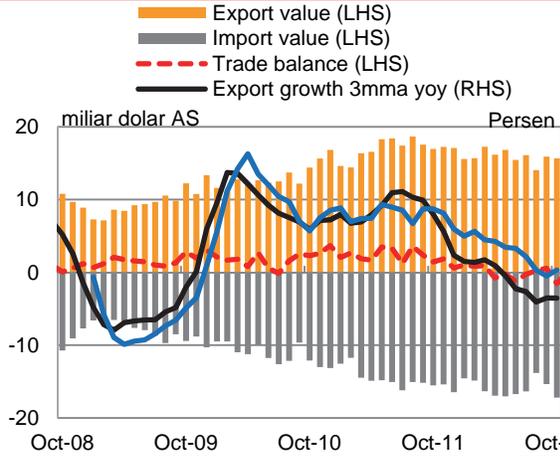
Penanaman modal asing (*FDI/PMA*) naik hampir dua kali lipat di kuartal ketiga, menjadi 5,5 miliar dolar AS (dikarenakan investasi langsung Indonesia di luar negeri yang relatif tinggi, maka investasi langsung bersih sedikit menurun di kuartal ini). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara sektor pertambangan masih menjadi tujuan utama bagi aliran masuk PMA, porsi sektor sumber daya alam telah turun menjadi 21,5 persen dari total investasi di kuartal ketiga dari sebelumnya 26,2 persen di paruh pertama 2012. Sebaliknya, porsi sektor manufaktur meningkat menjadi hampir 50 persen di kuartal ketiga dari 45,4 persen di semester pertama. Dalam hal ini industri bahan kimia dan farmasi (sebesar 1,1 miliar dolar AS) menggantikan kedudukan industri pertambangan sebagai sektor terbesar sasaran PMA di dalam negeri di kuartal ketiga.

Aliran masuk investasi portofolio bersih yang kuat sejalan dengan kinerja pasar saham dan obligasi pemerintah dalam negeri yang kokoh, membaiknya semangat pengambilan resiko global (*risk appetite*) sepanjang akhir kuartal ketiga, dan kebijakan moneter yang longgar diseluruh dunia (Gambar 12). Oktober juga mencatat berlanjutnya aliran masuk investasi portofolio bersih yang berasal dari obligasi dan ekuitas. Di bulan November, investor asing tercatat sebagai penjual bersih ekuitas Indonesia. Namun pembelian yang cukup besar atas obligasi domestik telah mengangkat kepemilikan asing sebesar hampir Rp 20 triliun (sekitar 2 miliar dolar AS) selama bulan itu, menjadi Rp 270 triliun.

**...dan mempertahankan PMA di tahun 2013 merupakan kunci utama terhadap outlook**

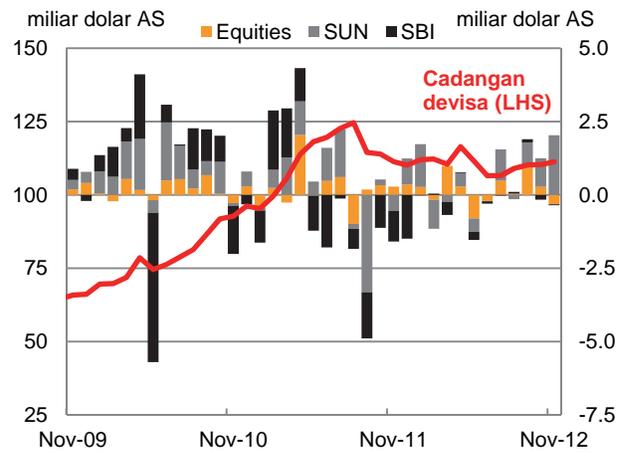
Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekspor tampaknya akan terhambat oleh pemulihan dunia yang belum merata sementara defisit neraca berjalan diproyeksikan akan mengecil walau kecil kemungkinan mencapai keseimbangan ataupun surplus. Menjaga tren positif PMA merupakan kunci dalam mengelola kesehatan neraca eksternal Indonesia dan juga untuk mendukung investasi yang sangat dibutuhkan. Pertumbuhan PMA yang terlihat sejak tahun 2009 disebabkan oleh daya tarik Indonesia yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, potensi jangka panjang jumlah konsumen domestiknya yang besar, sumber daya alamnya serta faktor – faktor biaya yang relatif rendah dan potensi sebagai pusat produksi regional. Walau daya tarik ini masih melekat pada Indonesia, penurunan harga-harga komoditas global, prospek peningkatan upah minimum (lihat Bagian B), serta ketidakpastian peraturan kebijakan, merupakan faktor yang dapat melemahkan dua faktor terakhir. Akibatnya, tidak ada ruang untuk berpuas diri terhadap prediksi (*outlook*) PMA.

**Gambar 11: Exports masih terus tertekan...**  
(nilai perdagangan barang, miliar dolar AS; pertumbuhan tahun-ke-tahun nilai barang rata-rata bergerak 3 bulanan, persen))



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 12: ...sementara aliran masuk portofolio telah kembali meningkat**  
(aliran bersih asing ke ekuitas, sekuritas pemerintah dan BI, dan cadangan devisa, miliar dolar AS)



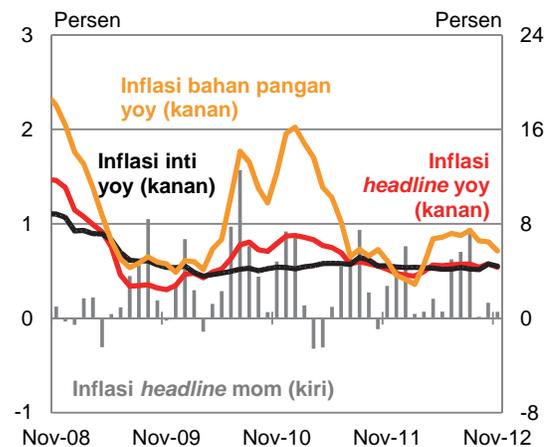
Catatan: "Aliran" bagi SUN (Surat Utang Negara) dan SBI (Sertifikat BI) menunjukkan perubahan kepemilikan  
Sumber: BI, CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia

#### 4. Penurunan inflasi terus berlanjut tetapi tekanan dorongan biaya (*cost-push*) muncul pada tahun 2013

**Inflasi IHK (*headline*) tahun-ke-tahun tetap rendah di bulan November, pada 4,3 persen dan 4,4 persen**

Berkurangnya tekanan harga, meskipun kuatnya pertumbuhan ekonomi, merupakan hal khusus dari ekonomi pada tahun 2012. Inflasi *headline* IHK tetap terkendali sebesar 4,3 persen tahun-ke-tahun di bulan November 2012, sama dengan yang tercatat pada bulan September (Gambar 13). Inflasi inti, pengukur yang lebih baik terhadap tekanan harga konsumen, tetap bertahan rendah dan stabil, sedikit meningkat menjadi 4,4 persen pada bulan November (Gambar 13). Stabilitasnya inflasi *headline*, ditengah-kuatnya pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi didasarkan pada tidak adanya tekanan besar pada harga-harga yang diatur oleh pemerintah dan tekanan harga komoditas.

**Gambar 13: Inflasi IHK dan inti tetap bertahan pada tingkat yang rendah secara historis**  
(inflasi harga, persen)



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Inflasi harga bahan pangan terus menurun dengan harga beras menuju tingkat pertumbuhan tahunan paling rendah dalam 8 tahun terakhir**

Berlanjutnya penurunan inflasi *headline* tahun-ke-tahun umumnya disebabkan oleh turunnya inflasi harga bahan pangan menjadi 5,7 persen pada November dari 7,4 persen pada bulan Agustus. Harga beras domestik yang stabil merupakan faktor utama yang mendorong perlemahan inflasi bahan pangan dengan kenaikan harga beras pada 11 bulan pertama tahun 2012 sebesar 3,6 persen, yang merupakan peningkatan tahunan paling rendah sejak tahun 2004. Penurunan tekanan harga bahan pangan ini mendorong inflasi keranjang kemiskinan turun dari 5,9 persen pada bulan September menjadi 5,3 persen pada bulan November. Walau kenaikan harga beras mengalami perlemahan selama tahun 2012, tingkat harganya masih tetap tinggi secara historis dan masih lebih tinggi sebesar 50 persen dibanding harga tahun 2010 yang mencatat tekanan harga yang besar menjelang akhir tahun itu. Selain perkiraan (*outlook*) bagi produksi, perubahan pada kerangka kebijakan, seperti UU Pangan yang baru (lihat Kotak 1) juga tampaknya akan mempengaruhi harga bahan pangan kedepan.

**Kotak 1: Undang-Undang Pangan yang baru di Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Pangan pada tanggal 18 Oktober 2012, mengganti UU Pangan tahun 1996. UU baru itu diprakarsai oleh anggota dewan, dan persiapan telah dilakukan sejak awal tahun 2011. Pada tahap persiapan awal, DPR dan Pemerintah menyamakan pandangan dalam menetapkan suatu badan ketahanan pangan baru. Karena masalah pangan dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga, keputusan kebijakan seringkali tertunda karena prosedur birokrasi dan kesulitan koordinasi. Sehingga, badan ketahanan pangan yang baru diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Saat ini terdapat tiga badan yang khusus menangani masalah ketahanan pangan: Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Bulog (Badan Urusan Logistik). DKP, yang dipimpin oleh Presiden, menangani perumusan kebijakan bagi ketahanan pangan nasional. BKP menangani masalah ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian. Bulog adalah suatu Perum (Perusahaan Umum), badan usaha milik negara nir laba, yang mengelola pengadaan, cadangan dan distribusi beras. Nampaknya suatu badan baru direncanakan akan memadukan ketiga badan tersebut menjadi satu.

Penetapan badan ketahanan pangan yang baru itu diperkirakan akan mendukung pengambilan keputusan, namun terdapat sejumlah debat tentang fungsi-fungsi apa yang harus diberikan kepada badan yang baru tersebut. DPR tampaknya menginginkan badan baru itu untuk menjadi pengatur dan pelaksana peraturan bahan pangan umum, sementara Pemerintah menghendaki agar kedua tanggung jawab itu tidak digabungkan ke satu entitas. Karena pandangan dan pendapat yang berbeda, pembahasan UU baru itu menjadi berlarut-larut.

Ketika UU baru itu disahkan, badan ketahanan pangan yang baru itu tidak dibentuk. Namun terdapat pasal-pasal yang mengatur batas waktu pembentukan badan ketahanan pangan baru dan penjelasan akan peranannya. Peraturan utamanya adalah pada Bab XII: Kelembagaan Pangan. Beberapa hal-hal utama adalah bahwa lembaga baru itu akan berada di bawah Presiden dan menerima mandat untuk menerapkan kebijakan ketahanan pangan sebagai lembaga Pemerintah. Selain itu lembaga baru itu akan membuat usulan kepada Presiden untuk menugaskan para badan usaha milik negara di bidang pangan untuk menghasilkan, mengadakan, menyimpan, dan mendistribusikan bahan pangan pokok dan bahan pangan lainnya. Entitas baru itu harus dibentuk dalam waktu tiga tahun setelah pengesahan UU itu.

Hal yang berbeda dari UU Pangan Indonesia ini adalah bahwa kedaulatan pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan seluruhnya terpadu di dalam satu UU. Konsep kedaulatan dan swasembada pangan berasal dari konsep ketahanan pangan pada UU Pangan tahun 1996. Kedaulatan pangan, yang didefinisikan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk secara independen menetapkan kebijakan pangan yang menjamin hak pangan bagi penduduk dan masyarakat dan menetapkan sistem bahan pangan yang sesuai, adalah suatu konsep yang baru; karena tidak terdapat definisi yang telah disepakati oleh dunia internasional. Untuk banyak negara, masalah keamanan pangan ditangani dengan UU yang terpisah. Penggunaan UU yang berbeda untuk ketahanan pangan dan keamanan pangan memiliki beberapa manfaat, karena kementerian dan lembaga yang menangani ketahanan pangan dan keamanan pangan juga berbeda-beda. Penekanan UU yang baru itu kepada keamanan pangan diwariskan dari UU tahun 1996 tentang Pangan.

UU baru itu memberi mandat kepada Pemerintah untuk melakukan intervensi yang signifikan ke pasar dan sektor bahan pangan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan. Sebagai contoh, Pasal 23 menyatakan bahwa Pemerintah mengelola cadangan bahan pangan nasional. Pasal 51 menugaskan pemerintah untuk mengelola perdagangan bahan pangan untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan. Pasal 55 memberikan mandat kepada pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan pokok pada tingkat produsen dan konsumen. Hal ini berlawanan dengan UU tahun 1996, yang mana keterlibatan Pemerintah dalam perdagangan bahan pangan, terutama impor bahan pangan, umumnya terbatas kepada masalah keamanan bahan pangan.

Sementara penerapan UU itu masih harus dilihat, terdapat peran-peran yang berkaitan dengan potensi intervensi pemerintah yang besar ke pasar bahan pangan demi ketahanan pangan. Kesejahteraan konsumen dapat terganggu karena lebih tingginya harga bahan pangan jika terdapat upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan melalui intervensi Pemerintah untuk membatasi perdagangan bahan pangan dan meningkatkan cadangan. Sesungguhnya, pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dan investasi pertanian merupakan kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

**Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, lihat *OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012* (Oktober 2012)**

**Ekspektasi harga jangka pendek telah meningkat mengikuti keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif listrik pada tahun 2013**

Ekspektasi harga konsumen yang diukur pada bulan Oktober 2012 telah naik dari tingkat rendahnya pada bulan Agustus. Menurut survei BI, lebih banyak responden dibanding bulan yang lalu mengatakan bahwa harga-harga akan naik pada tiga hingga enam bulan ke depan, terutama karena keputusan Pemerintah untuk meningkatkan tarif listrik pada tahun 2013. Sementara itu para penjual eceran melaporkan tekanan inflasi yang lebih lunak selama masa hari raya, dengan indeks harapan untuk harga-harga selama 3 bulan di depan pada bulan September turun ke tingkat yang paling rendah sejak akhir 2011. Dengan peningkatan upah minimum yang baru diumumkan (lihat di bawah dan Bagian B), hasil penelitian berikut untuk bulan November dan Desember tampaknya akan mencerminkan peningkatan ekspektasi harga.

**Rencana peningkatan tarif listrik pada tahun 2013 diperkirakan akan berdampak terbatas karena sebagian besar rumah tangga tidak akan terpengaruh, sama seperti peningkatan pada**

Keputusan yang disambut baik dalam APBN 2013 untuk meningkatkan tarif listrik bersubsidi dengan besar rata-rata 15 persen yang diperkirakan akan membawa dampak sementara dan satu kali saja terhadap inflasi IHK. Rinciannya belum diumumkan tetapi DPR telah memandatkan bahwa peningkatan itu hanya berlaku kepada pelanggan rumah tangga atau sambungan listrik yang umumnya tidak digunakan oleh kaum miskin dan bahkan kelompok menengah sekalipun (yaitu tidak termasuk sambungan listrik dengan daya 450V dan 900V). Rumah tangga yang terpengaruh hanyalah merupakan 15 persen

tahun 2010 dari pelanggan rumah tangga tetapi mereka mengkonsumsi 35 persen dari seluruh konsumsi listrik rumah tangga.

Dampak langsung dari reformasi tersebut terhadap IHK tampaknya akan terbatas. Biaya tarif listrik rumah tangga merupakan 2,8 persen dari seluruh konsumsi menurut bobot konsumsi IHK, jadi bahkan bila peningkatan 15 persen itu diterapkan kepada seluruh rumah tangga sekalipun, inflasi IHK hanya akan meningkat sebesar 0,42 poin persentase. Realisasinya akan lebih rendah karena reformasi itu tidak menyertakan 85 persen dari penduduk yang menggunakan jenis sambungan listrik yang tidak mengalami peningkatan tarif. Dampak tidak langsung juga akan terbatas dengan relatif rendahnya bagian biaya listrik pada biaya perusahaan. Biaya listrik hanya sekitar 5 persen dari total biaya bagi sebagian besar perusahaan manufaktur berukuran menengah dan besar (menurut Survei Industri 2006). Kenaikan biaya listrik sebesar 15 persen akan secara umum meningkatkan jumlah biaya sebesar kurang dari 1 persen. Risiko terhadap inflasi yang lebih besar dan lebih sulit untuk dihitung adalah bila para perusahaan menggunakan kenaikan tarif listrik itu sebagai alasan untuk meningkatkan harga jual mereka.

**Peningkatan upah minimum yang besar pada seluruh propinsi di Indonesia akan berlaku pada tahun 2013...**

Seperti dibahas dengan lebih mendetil pada Bagian B, propinsi-propinsi di seluruh Indonesia telah mengumumkan peningkatan upah minimum untuk tahun 2013 dengan jumlah yang mencapai 50 persen pada beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur dan 44 persen di Jakarta (peningkatan terbesar selama satu dekade). Peningkatan di seluruh Indonesia ini tampaknya akan membawa dampak yang lebih besar terhadap tekanan biaya yang lebih besar dibanding pengaruh langsungnya yang cepat terhadap IHK.

Dampak langsung terbatas karena IHK hanya menyertakan upah bagi sejumlah kegiatan buruh (seperti jasa rumah tangga) yang digolongkan sebagai sektor informal, dan upah minimum tersebut karenanya tidak berlaku. Proporsi produk-produk di dalam IHK yang dapat berkaitan langsung dengan kenaikan upah minimum sektor formal tampaknya hanya berjumlah kecil, dan bahkan bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk tersebut, bagian dari jumlah biaya yang berkaitan dengan para buruh dan upah minimum tampaknya akan terbatas. Menurut Survei Industri Perusahaan Manufaktur di Indonesia 2006, sekitar 76 persen dari seluruh perusahaan mengatakan bahwa mereka yang menerima upah minimum jumlahnya tidak sampai 10 persen dari rata-rata upah perusahaan itu. Karenanya, dampak peningkatan upah minimum terhadap jumlah biaya umumnya hanyalah berukuran kecil. Akhirnya, pengaruh apapun terhadap konsumen akan dampaknya terhadap biaya operasi juga akan terbatas dengan tingkat persaingan di pasar, keterkaitannya dengan impor dan tingkat margin keuntungan mereka.

**...dan terdapat risiko bahwa keputusan tersebut akan meningkatkan upah lebih luas pada sektor formal dan informal, menyebabkan inflasi yang didorong biaya**

Risiko terbesar kepada inflasi datang dari peningkatan permintaan upah yang lebih besar dari para pegawai dari sektor informal maupun formal, jika peningkatan upah minimum yang diumumkan secara luas itu juga mempengaruhi penetapan upah di seluruh ekonomi negara. Seperti disinggung pada Bagian B, peningkatan sebesar 10 persen dalam upah minimum berkaitan dengan peningkatan rata-rata upah bagi seluruh pegawai sebesar 3 persen pada tahun yang sama. Bila tingkat upah umum turut meningkat seperti yang terjadi pada peningkatan upah minimum yang lalu, mungkin terjadi dampak yang lebih luas terhadap biaya usaha, yang dapat menjalar hingga penyesuaian harga jual eceran. Selain itu, peningkatan yang besar pada daya beli para pegawai yang menerima manfaat dari penghasilan yang lebih tinggi secara signifikan dapat meningkatkan permintaan bagi barang-barang konsumsi eceran seperti bahan pangan, makanan hasil proses, pakaian dan rokok.

**Inflasi IHK diproyeksikan akan menurun menjadi 4,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal terakhir tahun 2012, sekitar pertengahan angka sasaran BI sebesar 4,5 ± 1 persen, dan sedikit peningkatan pada tahun 2013 dengan naiknya risiko peningkatan inflasi**

Dengan hanya satu bulan tersisa untuk pelaporan inflasi IHK tahun 2012, kuartal terakhir tampaknya akan mencatat penurunan inflasi menjadi 4,4 persen tahun-ke-tahun, yang mencerminkan penurunan inflasi bahan pangan yang disebabkan oleh rendahnya peningkatan harga beras dan perlambatan kredit konsumen selama tahun 2012. Perkiraan itu akan menempatkan inflasi IHK akhir tahun pada tengah-tengah angka sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 4,5 ± 1 persen. Inflasi IHK untuk sepanjang tahun 2012 diproyeksikan sebesar 4,3 persen.

Pada tahun 2013, inflasi diproyeksikan akan meningkat menjadi 4,9 persen selama setahun, didorong oleh kuatnya permintaan konsumen, masih tingginya tingkat pertumbuhan kredit konsumen dan pengaruh dari perlemahan kurs tukar rupiah yang

masih terus berlangsung. Kotak 2 memberikan lebih banyak rincian tentang dampak tekanan biaya dari kurs tukar terhadap inflasi. Peningkatan upah minimum dan tarif listrik menambah risiko peningkatan terhadap perkiraan (*outlook*) inflasi. Peningkatan tarif listrik bersubsidi yang dijadwalkan tersebut akan membawa dampak langsung yang dapat diukur terhadap inflasi pada tahun 2013 dengan komposisi dan penetapan peluncurannya menjadi kunci dalam menentukan keseluruhan dampak inflasi terhadap IHK dan deflator PDB pada tahun 2013. Pada tahap ini, dampak peningkatan tarif listrik tidak disertakan ke dalam perkiraan standar (*baseline*) Bank Dunia karena tidak adanya rincian mengenai peningkatan tarif tersebut. Perkiraan inflasi keranjang kemiskinan lebih rendah pada 5,3 persen pada kuartal keempat tahun 2012 dan 6,8 persen pada kuartal keempat tahun 2013.

**Pertumbuhan deflator PDB telah turun ke nilai rendahnya sejak tahun 1999 karena penurunan pertumbuhan harga di hampir semua sektor**

Pada kuartal ketiga, untuk pertama kali lebih dari 8 tahun, tingkat harga-harga secara umum di dalam ekonomi, seperti diukur oleh deflator PDB, meningkat dengan laju yang lebih lambat dari inflasi IHK. Inflasi deflator PDB tumbuh sebesar 3,5 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga tahun 2012, laju yang paling rendah sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mencatat perlambatan inflasi atau bergerak datar, dengan penurunan terbesar pada jasa-jasa yang turun dari 15 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua menjadi 1,8 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga. Inflasi sektor pertambangan turun dari 13,6 persen menjadi 7,8 persen tahun-ke-tahun pada periode yang sama karena turunnya harga-harga komoditas. Setelah dua kuartal pertumbuhan yang rendah secara berturut-turut, deflator PDB pada tahun 2012 diproyeksikan untuk bertumbuh hanya sebesar 4,9 persen selama setahun penuh, laju yang paling lambat sejak data dimulai pada tahun 1993, berkontribusi kepada penurunan yang nyata pada pertumbuhan PDB nominal seperti disinggung di atas. Pada tahun 2013 pertumbuhan deflator PDB tahunan diperkirakan akan meningkat dari nilainya yang kini rendah, mencapai 6,0 persen dengan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berlanjutnya kondisi kredit yang kuat, tetapi masih tetap cukup jauh di bawah rata-rata 14 persen yang tercatat pada 4 tahun sebelum krisis keuangan dunia.

#### **Kotak 2: Mengapa depresiasi Rupiah tidak membawa dampak yang lebih besar kepada inflasi**

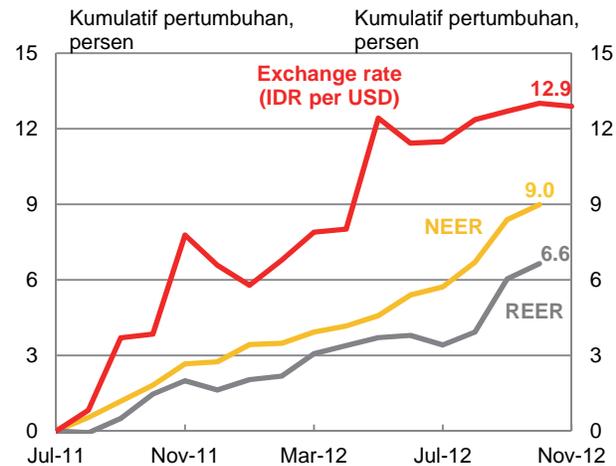
Pergerakan nilai tukar mempengaruhi harga dalam negeri sebagai akibat dari konsumen membeli produk impor dan melakukan usaha memproduksi barang-barang konsumsi di dalam negeri yang bergantung kepada barang *input* dari luar negeri. Namun, pengaruh inflasi dari pergerakan nilai tukar bergantung kepada sejumlah faktor dan pengaruhnya dapat terjadi setelah beberapa waktu. Sesungguhnya, depresiasi Rupiah, dengan penurunan nilai sebesar 12,9 persen dari bulan Juli 2011 ke November 2012, tidak dikaitkan dengan peningkatan inflasi IHK. Dengan semua hal lain dianggap tidak berubah, Bank Dunia memperkirakan bahwa skala depresiasi itu akan berkaitan dengan peningkatan laju inflasi sekitar 1 poin persentase. Sementara kontrafaktual tidak diketahui, terdapat sejumlah faktor yang dapat membantu menjelaskan mengapa depresiasi tidak menyebabkan dampak yang besar terhadap inflasi, setidaknya hingga saat ini.

Pertama, kurs tukar Rupiah terhadap dolar AS bukanlah merupakan pedoman terbaik atas dampak melemahnya mata uang dalam negeri terhadap inflasi IHK, karena hanya 6 persen dari impor Indonesia berasal dari AS. Pengukuran yang lebih baik adalah Kurs Tukar Nominal Efektif (*Nominal Effective Exchange Rate/NEER*), indeks kurs tukar dengan pembobotan perdagangan dengan para mitra perdagangan utama Indonesia. Sejak bulan Juli 2011 indeks ini telah mengalami depresiasi sebesar 9 persen, lebih kecil secara signifikan dibanding kurs tukar dolar AS per Rupiah.

Kedua, hingga bulan Juli 2012, NEER hanya mencatat depresiasi sebesar 5.2 persen selama 12 bulan yang lalu, dan hanya pada beberapa bulan terakhir inilah NEER mencatat perlemahan yang lebih signifikan (Gambar 14). Bank Dunia memperkirakan bahwa dampak perubahan dalam NEER terhadap inflasi IHK umumnya akan dirasakan pada 3 - 6 bulan berikutnya. Hal ini berarti dampak dari depresiasi yang belakangan terjadi terhadap inflasi IHK diperkirakan terlihat menjelang akhir tahun 2012 dan permulaan tahun 2013.

Ketiga, dampak langsung terhadap IHK diperkirakan terbatas dan pengaruh tidak langsungnya membutuhkan waktu untuk muncul. Barang-barang konsumsi hanya bagian kecil dari impor Indonesia, secara rata-rata berjumlah 6 persen dari keseluruhan impor selama 3 tahun terakhir ini. Sebagian besar dari dampak inflasi yang berasal dari depresiasi itu tampaknya akan datang dari peningkatan biaya dalam Rupiah bagi barang *input* dan setengah jadi yang diimpor karena mereka akan mempengaruhi sebagian harga barang konsumsi. Perkiraan Bank Dunia adalah bahwa depresiasi 10 persen pada NEER Indonesia akan berkaitan dengan peningkatan sekitar 0,5 poin persentase inflasi *headline*.

**Gambar 14: Nilai tukar Rupiah melemah cukup besar, tapi lebih rendah dibandingkan dengan kurs rupiah yang dibobot dengan nilai perdagangannya (*trade-weighted*)... (depresiasi kumulatif sejak bulan Juli 2011, persen)**



Sumber: BIS dan CEIC

## 5. Aliran masuk portofolio investasi asing kembali meningkat sementara pertumbuhan kredit melambat

**Kinerja pasar keuangan tetap kokoh...**

Setelah naik mengikuti peningkatan ekuitas global memasuki bulan Oktober, peningkatan berkelanjutan IHSG melambat di bulan November, yang mencerminkan terjadi perlemahan pada sentimen pasar global dan aliran keluar modal portofolio ekuitas asing. Pada tanggal 7 Desember, IHSG hanya meningkat sebesar 0,6 persen secara kuartal. Namun *yield* obligasi pemerintah tetap bertahan sekitar nilai terendah yang pernah tercatat karena kuatnya minat investor asing dan lemahnya perkiraan (*outlook*) inflasi (Gambar 15).

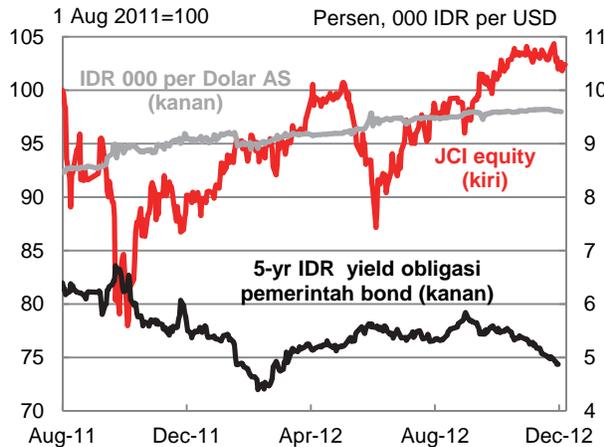
**... sementara Rupiah mengalami depresiasi tipis terhadap dolar AS...**

Rupiah turun ke nilai paling rendahnya selama tiga tahun terakhir dan tetap rendah 6 persen terhadap dolar AS selama tahun berjalan sampai 7 Desember. Dengan inflasi Indonesia yang lebih kuat dibanding mitra-mitra perdagangan utamanya, laju depresiasi tetap kecil secara riil, sejalan dengan pengalaman para eksportir komoditas lainnya, walaupun depresiasi riil baru-baru ini telah meningkat (Gambar 16).

**... di latar belakang oleh penurunan tingkat suku bunga...**

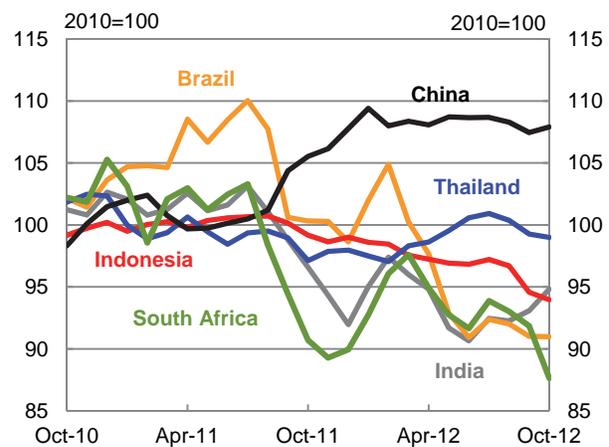
Suku bunga antar bank baru-baru ini meningkat secara marginal setelah BI terakhir kali menetapkan batas bawah dari suku bunga simpanan satu malam (*overnight deposit rate*) pada bulan Agustus. Walaupun demikian, suku bunga tersebut masih tetap rendah baik secara historis dan juga secara relatif terhadap inflasi IHK yang berjalan dan yang akan datang, yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter masih tetap bersifat akomodatif.

**Gambar 15: Pasar obligasi meningkat kuat kuartal ini sementara ekuitas bergejolak sejak pertengahan Oktober...**  
(indeks ekuitas, 1 Agustus 2011=100; Rp per dolar AS; yield, persen)



Sumber: CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 16: ...dan depresiasi Rupiah melambat secara riil dan bila dibanding dengan eksportir komoditas lainnya**  
(indeks kurs tukar efektif riil, 2010 = 100)

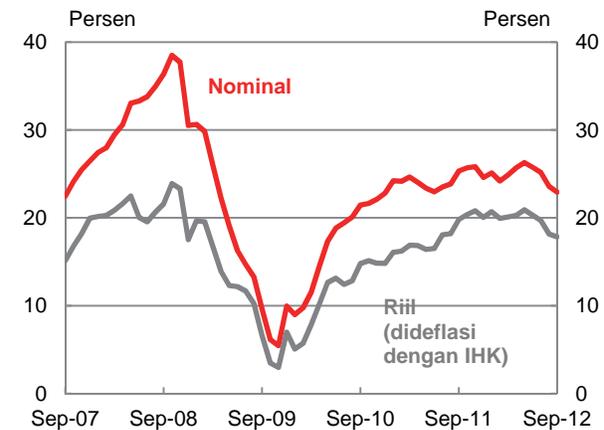


Sumber: BIS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan kredit, walaupun masih tetap tinggi, telah menurun dari tingkat tertinggi**

Pertumbuhan pemberian pinjaman semakin melambat dari puncaknya pada bulan Mei 2012, dengan pertumbuhan kredit nominal melambat menjadi 22,8 persen tahun-ke-tahun pada bulan Oktober. Pertumbuhan kredit riil (d disesuaikan dengan inflasi yang sedang berlangsung) juga melambat menjadi 17,4 persen tahun-ke-tahun dari nilai puncaknya sebesar 21 persen pada bulan Mei, yang mencerminkan, antara lain, lingkungan luar negeri yang melemah dan upaya-upaya kebijakan BI yang terakhir (Gambar 17).

**Gambar 17: Pertumbuhan kredit melambat sejak Mei**  
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Pinjaman investasi terus meningkat dengan kuat, naik 30,3 persen pada tahun berjalan hingga Oktober. Angka ini adalah laju pertumbuhan paling tinggi tahun-ke-tahun selama 9 bulan. Pertumbuhan kredit modal kerja melambat menjadi 22 persen tahun-ke-tahun pada bulan Oktober, dari 29 persen di bulan Mei, dan pertumbuhan kredit konsumen sedikit melemah menjadi 18,9 persen tahun-ke-tahun. Kenyataan bahwa sebagian besar kredit ditujukan kepada modal kerja dan investasi, bersama-sama dengan upaya kehati-hatian dari BI, telah meredam kekhawatiran tentang keberlanjutan pertumbuhan kredit. Namun sangatlah penting untuk mengamati timbulnya tanda-tanda awal terjadinya *overheating* pada pasar modal dan properti, yang dapat berlanjut kepada penurunan kualitas kredit. Harga-harga penjualan kantor komersil di Jakarta dan sekitarnya naik tajam ke level baru (sejak data dimulai 2008) pada kuartal ketiga sebesar 33 perse tahun ke tahun, walaupun penawaran ruang kantor baru yang besar diperkirakan pada awal 2013 yang dapat menahan kenaikan lenih lanjut.

**Indikator sektor perbankan tetap sehat**

Profitabilitas bank turun sedikit sejak pertengahan tahun, dengan tingkat pengembalian dari aset-aset bank (*return on bank assets*) turun 3,1 persen pada Oktober (dari 3,2 persen pada Juni), sementara pengembalian dari ekuitas (*return on equity*) sedikit menurun menjadi 18,3 persen (dari 18,2 persen pada Juni). Sistem keuangan masih terus

memperluas peran intermediasinya, rasio hutang terhadap simpanan (*loan-to-deposit*) meningkat menjadi 83,8 persen pada Oktober, naik dari 82,6 persen pada kuartal kedua. Solvabilitas bank, kemampuan bank membayar hutang, yang diukur dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tetap bertahan tinggi, walau turun sedikit ke 17,3 persen pada Oktober (dari 17,5 persen pada Juni), sementara tingkat kredit macet (*non-performing loan*) tetap di 2,2 persen pada kuartal kedua.

**Pertumbuhan laba sektor korporasi tetap kuat, kecuali pada sektor pertambangan**

Konsumsi dalam negeri yang kuat terus mendorong laba sektor korporasi dengan meningkatnya daya beli rumah tangga. Akan tetapi, sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam diperkirakan tetap melemah, bank dan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) telah menurunkan porsi keterkaitannya dengan sektor pertambangan pada beberapa bulan terakhir, terlihat dari pertumbuhan kredit tahun-ke-tahun untuk sektor tersebut turun ke 20 persen pada bulan Oktober, dari 50 persen pada bulan Januari.

**Kotak 3: Perkembangan pada kerangka pengelolaan perusahaan di Indonesia**

Sejumlah prakarsa yang sedang berlangsung di Indonesia dapat mendorong peningkatan besar dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam waktu dekat. Peningkatan-peningkatan tersebut akan memberi kontribusi kepada kestabilan finansial dan dapat mendorong tingkat kepercayaan investor<sup>1</sup>.

Kebutuhan akan peningkatan sangat jelas. Sebagai contoh, laporan Pengamatan Pengelolaan Perusahaan tahun 2012 (*Corporate Governance Watch*) yang diterbitkan oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA)<sup>2</sup>, menunjukkan bahwa Indonesia masih terus tertinggal di belakang negara-negara tetangganya dalam bidang pengelolaan perusahaan, dengan peringkat Indonesia tertinggal hingga posisi paling belakang di antara sebelas negara-negara Asia yang diteliti.

Menurut Mas Achmad Daniri, ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)<sup>3</sup>, tantangan bagi perusahaan Indonesia untuk menangani kinerja yang relatif buruk tersebut adalah dengan membuat prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan menjadi bagian dari budaya perusahaan, karena perusahaan-perusahaan masih cenderung mengikuti pendekatan ketaatan atau pemeriksaan berdasar daftar. Di lain pihak, Daniri menyatakan bahwa “perusahaan-perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pengatur/regulator. Karenanya sangat penting reformasi pengelolaan perusahaan dan pengelolaan sektor publik berjalan bersama”<sup>4</sup>. Kemajuan-kemajuan besar dalam bidang pengelolaan perusahaan telah dibuat selama sepuluh tahun terakhir, dengan “Annual Report Award (ARA), suatu prakarsa ajang tahunan yang dimulai pada tahun 2001, untuk menghargai peningkatan dalam standar pelaporan. Standar pelaporan tahunan di Indonesia kini dapat dianggap setara dengan praktik terbaik internasional. Sejauh ini ARA telah menarik sekitar 180 perusahaan, baik perusahaan terbuka maupun tertutup, dari perbankan dan lembaga non-perbankan dan juga BUMN, untuk bersaing mendapatkan penghargaan yang bergengsi tersebut sebagai laporan tahunan terbaik dalam berbagai kategori”.

Sebagai produsen nasional dari kode etik Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk dunia dan per sektor dengan mandat untuk menyebarluaskan penerimaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia, KNKG telah melakukan pembaruan (*update*) besar kepada kode *Good Corporate Governance* perbankan yang awalnya diterbitkan pada tahun 2004. Bentuk yang diperbaharui tersebut diperkirakan akan diterbitkan pada bulan Januari 2013.

Pada tingkat regional, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan lima negara anggota ASEAN lainnya (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) di bawah Forum Pasar Modal ASEAN (*ASEAN Capital Market Forum/ACMF*) telah sepakat untuk meluncurkan dan menggunakan kuesioner bersama yang akan digunakan untuk kartu catatan angka pengelolaan perusahaan ASEAN (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) yang didukung oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) sejak tahun 2010. Langkah ini untuk mengantisipasi keterkaitan yang akan datang dari bursa saham ASEAN yang turut serta. Kartu angka itu tidak saja dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi perusahaan-perusahaan terbuka pada tingkat regional tetapi juga sebagai alat bagi penyusun kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kerangka peraturan. Kartu angka ini telah menjadi dasar bagi Konferensi Penghargaan CG (*CG Conference Award*) di Indonesia yang dikelola oleh IICD (*Indonesia Institute for Corporate Governance Directorship*) pada tanggal 22 November 2012.

Pada tingkat kebijakan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan baru tentang pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi perusahaan-perusahaan asuransi<sup>5</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan struktur pengelolaan dan praktik-praktik industri itu, sementara pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia mengambil keputusan besar dalam menetapkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), suatu otoritas pengawas terpadu. OJK akan mengambil alih fungsi pengawasan dan pengendalian Bapepam-LK, pengendali pasar modal saat ini, pada tanggal 31 Desember 2012, dan juga fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013. Penetapan pengendalian yang baru ini membuka kesempatan untuk meningkatkan dukungan dan implementasi praktik *good corporate governance* di Indonesia.

<sup>1</sup> OECD Economic Outlook, Volume 2011/2

<sup>2</sup> CG Watch 2012: Market Ratings. September 2012, ACGA Ltd

<sup>3</sup> [www.knkg-indonesia.com](http://www.knkg-indonesia.com)

<sup>4</sup> Kutipan dari wawancara yang dilakukan pada bulan Oktober 2012 dengan *IFC Corporate Governance Team*

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan No: 152/PMK.010/2012, 3 Oktober 2012

**BI mengumumkan sejumlah peraturan perbankan yang baru**

Pada bidang peraturan, Bank Indonesia telah memprakarsai sejumlah reformasi sektor perbankan yang bertujuan untuk mendukung stabilitas sektor perbankan, daya tahan dan daya saing bank, dan mempromosikan intermediasi. Di antara perubahan yang paling signifikan, BI mengumumkan pemberlakuan izin berlapis (*multiple licensing*) yang mengaitkan kemampuan bank untuk memperluas layanan perbankan pada tingkat Lapisan 1 dasar modal mereka. Peraturan itu akan mulai berlaku pada bulan Maret 2013 dengan periode transisi selama 3 tahun bagi bank umum dan 5 tahun bagi bank pembangunan daerah, dan diperkirakan akan memacu lebih banyak konsolidasi pada sektor perbankan.

Seluruh bank juga diharuskan untuk memberi pinjaman tidak kurang dari 20 persen dari portofolio mereka kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Persyaratan pemberian pinjaman ini dapat menghalangi pertumbuhan pemberian kredit karena bank-bank harus menyesuaikan diri kepada peraturan-peraturan baru tersebut. Namun, waktu anjang (*lead time*) selama enam tahun akan memitigasi hal itu, dan kredit bagi mikro dan UKM hanya dipersyaratkan untuk mencapai 5 persen dari jumlah pada akhir tahun 2013.

Mengikuti penetapan peraturan uang muka nilai pinjaman terhadap nilai (*loan-to-valuation/LTV*) bagi berbagai jenis kredit kepemilikan kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) dan perumahan, BI juga memiliki rencana untuk meluncurkan peraturan LTV serupa bagi perbankan Syariah mulai tanggal 1 April 2013. Hal ini mengikuti kuatnya pertumbuhan dalam produk-produk pinjaman Syariah. Pemberian pinjaman Syariah bagi konsumsi telah meningkat sebesar 46 persen sejak tahun lalu, melebihi pertumbuhan pinjaman konsumsi pada sektor perbankan sebesar 19 persen.

BI juga mengumumkan bahwa cabang-cabang bank asing harus memiliki jumlah modal tertentu di dalam negeri dalam bentuk obligasi negara atau perusahaan, peraturan baru tentang jasa wali amanat (*trustee services*), dan melonggarkan pembatasan kepemilikan saham pada lebih dari satu bank di Indonesia. Juga terdapat peraturan kepemilikan bank baru yang akan membatasi lembaga keuangan manapun untuk hanya memiliki tidak lebih dari 40 persen dari modal bank umum, atau 30 persen untuk setiap lembaga non-keuangan dan 20 persen bagi perorangan. Batas kepemilikan bagi bank-bank Syariah akan ditetapkan sebesar 25 persen untuk semua pihak. Peraturan itu akan berlaku setara kepada pemilik bank-bank umum yang berasal dari dalam dan luar negeri. Namun kepemilikan bank yang melampaui 40 persen akan diperkenankan secara selektif, sesuai dengan persetujuan BI. Kajian akhir tentang kekuatan finansial dan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) perbankan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2013. Box 3 di atas memberikan gambaran singkat tentang kerangka pengelolaan perusahaan di Indonesia.

## 6. Defisit fiskal melebar karena naiknya belanja subsidi dan lemahnya pertumbuhan penerimaan

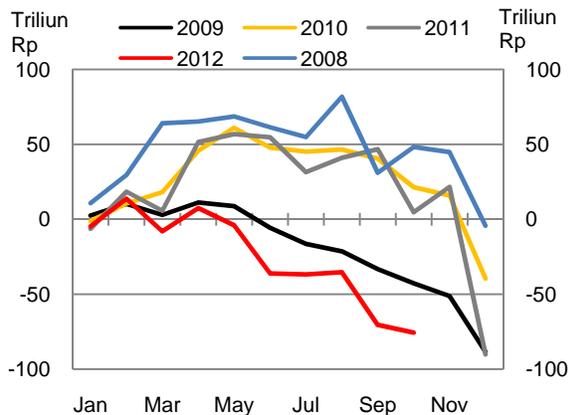
**Defisit fiskal sampai akhir Oktober meningkat karena tingginya subsidi energi dan perlemahan penerimaan**

Posisi fiskal Indonesia tetap kuat tetapi beban dari tingginya belanja subsidi energi sangatlah nyata pada tahun 2012. Sampai akhir bulan Oktober, keseluruhan saldo fiskal mencatat defisit sebesar Rp 76 triliun (40 persen dari target defisit APBN-P sebesar Rp 190 triliun), yang mencerminkan tingginya pengeluaran subsidi energi dan perlemahan penerimaan (Gambar 18). Tingkat ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 dan 2011 dimana saldo fiskal masih berada pada posisi surplus dari bulan Januari hingga November (belanja dan juga defisit cenderung meningkat menjelang akhir tahun).

**Defisit fiskal keseluruhan tahun 2012 diperkirakan akan melampaui target pada APBN-P**

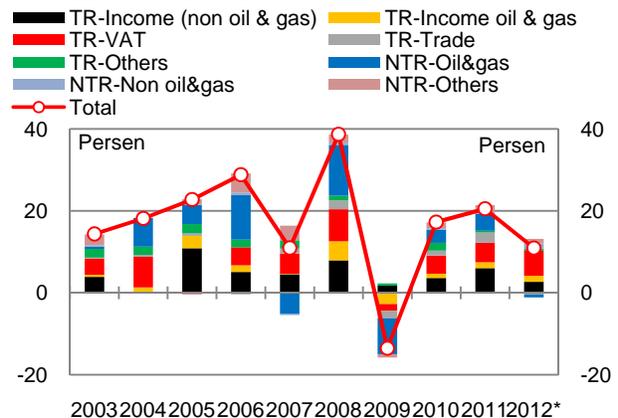
Defisit fiskal untuk tahun 2012 tampaknya akan melampaui target pada APBN-P, dimana pemerintah masih harus mencairkan sepertiga jumlah belanja yang masih tersisa pada dua bulan terakhir tahun ini sementara penerimaan masih terus mengalami perlambatan. Namun posisi fiskal Indonesia secara keseluruhan masih tetap kuat, dengan rasio hutang pemerintah terhadap PDB diperkirakan terus menurun menjadi dibawah 24 persen dari PDB di tahun 2012. Pembiayaan tetap berjalan sesuai rencana, dengan 90 persen kebutuhan bruto penerbitan surat utang tahun 2012 telah dipenuhi sampai akhir Oktober.

**Gambar 18: Defisit anggaran hingga bulan Oktober meningkat karena tingginya belanja subsidi energi (saldo anggaran bulanan kumulatif, triliun Rupiah)**



Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 19: Penerimaan mengalami moderasi karena berlanjutnya perlemahan penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak (poin persentase kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan)**



Catatan: \*Data 2012 adalah Oktober ke Oktober. TR adalah penerimaan pajak dan NTR adalah penerimaan bukan pajak  
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

**Lemahnya permintaan eksternal dan rendahnya penerimaan yang berkaitan dengan ekspor dan komoditas terus membebani penerimaan**

Pada tahun berjalan hingga akhir bulan Oktober, jumlah penerimaan mencapai 73 persen dari APBN-P (Rp 997 triliun), meningkat hanya 11 persen dibanding 19 persen pada periode yang sama tahun lalu (Tabel 4). Perlemahan pertumbuhan penerimaan tercatat dalam hampir semua sumber penerimaan utama, dengan pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Gambar 19). Penerimaan pajak, dua per tiga dari total penerimaan, hanya tumbuh 14 persen relatif terhadap 20 persen pada periode yang sama tahun 2011. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-migas, sepertiga dari total penerimaan, hanya tumbuh sebesar 8 persen dibanding 19 persen pada periode yang sama tahun lalu, sebagai dampak perlemahan penerimaan PPh badan yang disebabkan oleh lemahnya permintaan luar negeri dan rendahnya harga komoditas yang mengurangi keuntungan. Penerimaan bea ekspor terus menurun sampai Oktober hingga 26 persen dibanding periode yang sama tahun 2011. Di sisi lain, penerimaan PPN tetap kuat, didukung oleh konsumsi swasta yang kokoh dan pertumbuhan impor hingga kuartal kedua. Perlambatan secara keseluruhan dalam pertumbuhan penerimaan sejalan dengan perlambatan pada pertumbuhan nominal ekonomi (PDB) seperti disinggung diatas. Namun penerimaan bukan pajak, yang merupakan seperempat dari jumlah penerimaan dan umumnya terdiri dari penerimaan migas, juga melemah karena produksi minyak yang lebih rendah dari perkiraan.

**Tabel 4: Tingkat pencairan anggaran hingga akhir bulan Oktober masih rendah (realisasi anggaran tahun 2012 sampai akhir bulan Oktober)**

	Nilai nominal akhir Oktober (Triliun Rp)			Persentase terhadap APBN-P (persen)			Pertumbuhan nominal YoY Jan - Okt (persen)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
<b>Penerimaan negara dan hibah</b>	754	899	997	75,9	76,8	73,4	18,2	19,2	10,9
<b>Penerimaan pajak, dari</b>	560	674	768	75,4	76,8	75,6	14,5	20,4	13,9
Pajak penghasilan non-migas	241	287	311	78,4	78,2	69,8	13,0	19,2	8,4
Pajak pertambahan nilai	172	204	259	65,2	68,3	77,0	16,9	18,8	27,0
Pajak ekspor	5	25	18	82,6	97,3	79,2	719,2	449,4	-25,8
<b>Penerimaan bukan pajak</b>	193	223	228	77,9	77,7	66,7	30,9	15,6	2,2
<b>Pengeluaran</b>	732	894	1,073	65,0	67,7	69,3	7,1	22,1	20,0
<b>Pemerintah Pusat</b>	463	578	681	59,2	63,7	63,7	4,7	25,0	17,9
Belanja pegawai	122	146	169	74,8	79,8	79,4	8,8	19,9	15,5
Belanja barang	62	73	86	55,5	50,9	46,2	21,8	16,2	18,7
Belanja modal	39	54	74	41,3	38,4	43,7	-11,1	37,8	36,3
Subsidi energi	90	165	184	62,2	84,4	90,8	69,4	83,8	11,6
Bantuan sosial	47	38	53	65,9	46,7	96,3	-6,2	-18,4	39,5
<b>Transfer ke daerah</b>	270	316	391	78,3	76,6	81,7	11,2	17,1	23,8

Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

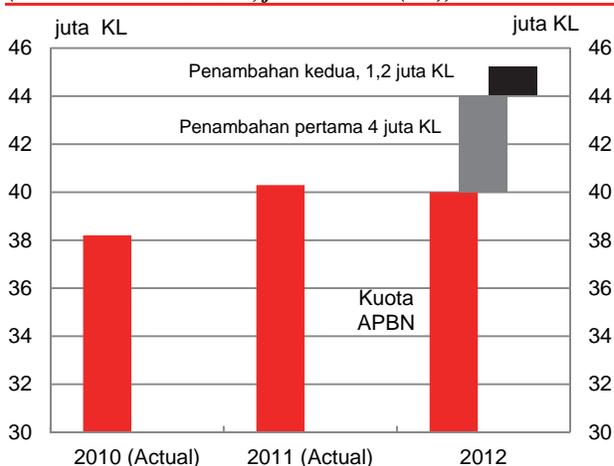
**Beban fiskal dari subsidi energi terus meningkat**

Sampai akhir bulan Oktober, tingkat realisasi pengeluaran adalah sebesar 69 persen dari APBN-P, tumbuh sebesar 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun tingkat pencairan anggaran ini sebagian besar didorong oleh besarnya belanja subsidi energi, yang mencapai lebih dari 90 persen dari APBN-P pada akhir bulan Oktober, dan menutupi lemahnya realisasi belanja modal dan barang (Tabel 4). Upaya-upaya baru untuk mengendalikan konsumsi BBM yang telah diluncurkan pada awal tahun, seperti larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan pemerintah, BUMN dan industri, belum terbukti efektif. Selain itu, rencana untuk membatasi kendaraan pribadi dari penggunaan BBM bersubsidi yang rencananya akan diuji-cobakan di Jakarta dan sekitarnya juga mengalami penundaan karena tidak siapnya infrastruktur pendukung.

**Pemerintah dan DPR telah menyepakati penambahan selanjutnya volume BBM bersubsidi untuk tahun 2012**

Melebarnya perbedaan harga antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, dan pesatnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, telah mendorong kuatnya konsumsi BBM bersubsidi pada tahun 2012, melebihi yang sebelumnya diproyeksikan dalam APBN. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah kemudian meningkatkan kuota volume BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter (KL) menjadi 44 juta KL untuk setahun penuh di akhir September 2012<sup>6</sup>. Walaupun adanya penambahan itu, volume diperkirakan masih tidak akan mencukupi hingga akhir tahun 2012 (Gambar 20).

**Gambar 20: Volume BBM bersubsidi terus meningkat di tahun 2012 karena tidak adanya reformasi subsidi BBM (volume BBM bersubsidi, juta kilo liter (KL))**

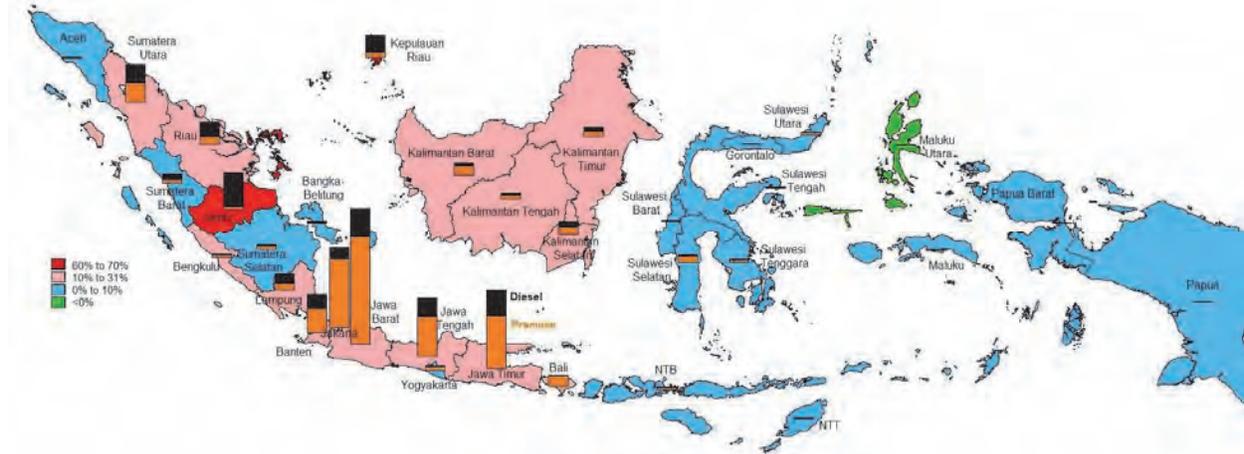


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perhitungan staf Bank Dunia

<sup>6</sup> <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5961-kuota-bbm-bersubsidi-naik-404-juta-kiloliter.html>

Menjelang akhir bulan September, konsumsi BBM bersubsidi telah melampaui kuota awal untuk periode bulan Januari-September sebesar 15 persen. Selanjutnya, data regional menunjukkan bahwa pola konsumsi yang melebihi kuota ini sangat jelas terlihat di kota-kota dengan penduduk yang padat, propinsi-propinsi yang memiliki kegiatan pertambangan dan perkebunan, dan propinsi-propinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, yang menunjukkan peningkatan permintaan dan kemungkinan kebocoran (Gambar 21). Pada awal Desember, Pemerintah dan DPR telah menyetujui kuota tambahan sebesar 1,2 juta KL untuk memastikan bahwa pasokan BBM bersubsidi akan mencukupi hingga akhir tahun<sup>7</sup>.

**Gambar 21: Konsumsi BBM yang melebihi Kuota terpusat di kota-kota yang padat, daerah-daerah pertambangan dan perbatasan (perbedaan volume BBM bersubsidi antara realisasi Jan-Sep dan kuota Jan-Sep, persen – peta, ribuan kilo liter-bar chart)**

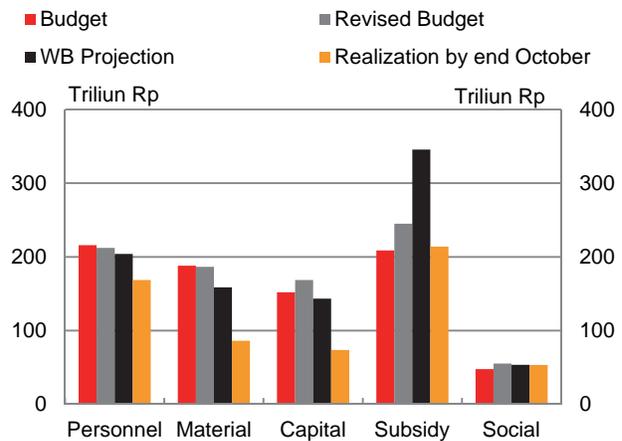


Sumber: BPH Migas dan perhitungan staf Bank Dunia.

**Tingkat realisasi belanja modal dan barang mencatatkan pertumbuhan nominal yang kuat, namun masih dibawah target**

Belanja modal mencapai Rp 74 triliun sampai dengan Oktober, meningkat 36 persen dari periode yang sama tahun lalu sementara realisasi belanja barang mencapai Rp 86 triliun, naik sebesar 19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Meskipun tumbuh cukup kuat secara nominal, realisasi belanja barang dan modal tidak mampu mengimbangi kenaikan alokasi anggaran. Sampai akhir Oktober, tingkat realisasi belanja modal dan barang hanya 44 persen dan 46 persen dari APBN-P, menyisakan lebih dari separuh anggaran harus dibelanjakan di dua bulan terakhir (Gambar 22).

**Gambar 22: Sisa anggaran tahun 2012 sampai akhir bulan Oktober masih besar (APBN 2012, APBN-P, Proyeksi Desember Bank Dunia, dan realisasi 2012 sampai akhir Oktober, triliun Rp)**



Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

**Upaya untuk menangani rendahnya realisasi**

Walaupun tumbuh kuat secara nominal, rendahnya pencairan belanja modal ini merintangai upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan

<sup>7</sup><http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6086-dpr-ri-dan-pemerintah-sepakat-tambah-kuota-bbm-bersubsidi-12-juta-kl.html>

**belanja modal sedang  
berjalan**

infrastruktur. Walaupun upaya-upaya untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang dipimpin oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menunjukkan perbaikan pada paruh pertama tahun 2012, tantangan struktural yang telah lama ada seperti lemahnya penyusunan anggaran dan rumitnya prosedur pengadaan masih tetap dijumpai. Namun peraturan-peraturan baru dalam bidang pengadaan dan pembebasan tanah yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2012 diperkirakan akan meningkatkan pelaksanaan anggaran pada tahun 2013. Untuk semakin mempercepat proses penyusunan anggaran pada tahun 2013, baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meluncurkan kebijakan baru untuk lebih meringkas proses penyusunan anggaran dengan melakukan integrasi dan otomatisasi rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sentralisasi proses persetujuan pada Direktorat Jendral Anggaran. Sebaliknya, Direktorat Jendral Perbendaharaan, yang sebelumnya berperan dalam pengesahan DIPA, tidak akan terlibat di dalam penyusunan anggaran tetapi akan memusatkan perhatiannya kepada pelaksanaan dan pencairan anggaran.

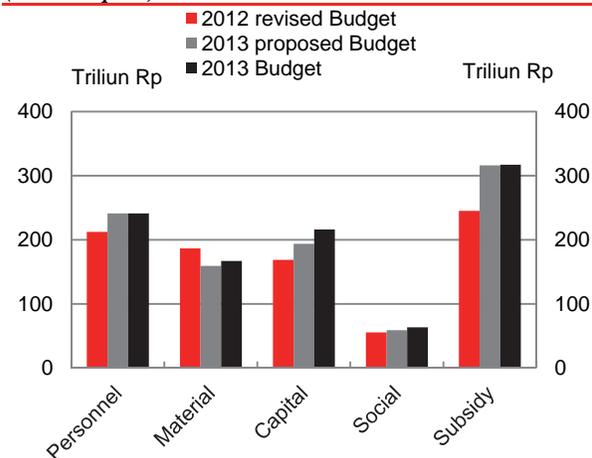
**Proyeksi Bank Dunia  
untuk defisit anggaran  
tahun 2012 adalah 2,5  
persen dari PDB, sedikit  
diatas APBN-P**

Dengan berlanjutnya belanja subsidi energi yang semakin meningkat diikuti oleh moderasi lebih lanjut dalam penerimaan, Bank Dunia telah meningkatkan proyeksi defisit fiskalnya untuk 2012 menjadi 2,5 persen dari PDB, naik tipis dari 2,4 persen pada *Triwulanan* edisi bulan Oktober, dan di atas angka APBN-P sebesar 2,2 persen dari PDB. Namun, seperti dibahas pada *Triwulanan* edisi bulan Oktober, posisi fiskal Indonesia secara keseluruhan masih tetap kuat dan Pemerintah memiliki cadangan yang memadai untuk membiayai defisit fiskal yang sedikit melebihi sasaran. Dana kontingensi, yang berjumlah sebesar Rp 40 triliun, yang dialokasikan bagi risiko subsidi energi dan program-program kompensasi jika harga BBM bersubsidi ditingkatkan, dapat digunakan untuk membiayai tambahan defisit tersebut. Pemerintah juga masih memiliki Rp 35 triliun sisa anggaran lebih (SAL) yang dapat digunakan untuk membiayai kelebihan defisit tersebut. Selain itu, Pemerintah juga dapat meneruskan kebutuhan pembiayaan tambahan yang timbul dari belanja subsidi BBM yang lebih tinggi dari tahun 2012 ke APBN tahun 2013.

**APNB tahun 2013, yang  
disahkan pada akhir  
bulan Oktober, secara  
umum sejalan dengan  
RAPBN yang diajukan  
oleh Pemerintah**

DPR menyetujui APBN 2013 pada akhir bulan Oktober. Secara keseluruhan, penerimaan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 9 persen dan belanja akan meningkat sebesar 13 persen relatif terhadap APBN-P tahun 2012. Sasaran defisit sebesar 1,7 persen dari PDB atau Rp 153 triliun, lebih rendah dari 2,2 persen dari PDB pada APBN-P tahun 2012 (Tabel 5). Asumsi-asumsi dan susunan pengeluaran APBN yang telah disetujui tersebut secara umum sejalan dengan RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah (Gambar 23). Namun terdapat sejumlah perkembangan kebijakan baru yang patut dicatat.

**Gambar 23: Belanja modal dan subsidi akan meningkat pada tahun 2013 (triliun rupiah)**



Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

Pertama, Pemerintah akan meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak dari Rp 15,8 juta menjadi Rp 24,3 juta untuk mendorong daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, APBN tahun 2013 mengalokasikan peningkatan belanja modal sebesar 28 persen dibanding APBN-P 2012, untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Ketiga, seperti dibahas pada bagian harga, kenaikan tarif listrik bagi pelanggan dengan daya di atas 900 VA meter, sebesar rata-rata 15 persen, telah disetujui. Empat, namun belanja untuk subsidi energi akan tetap besar karena APBN 2013 tidak menyertakan rencana reformasi subsidi BBM. UU APBN memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk meningkatkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR dengan syarat

perkembangan makro ekonomi atau parameter subsidi BBM berubah secara signifikan dibandingkan asumsi APBN. Kelima, seperti pada APBN 2012, UU APBN 2013 memungkinkan Pemerintah untuk menanggapi kondisi darurat secara cepat, dengan persetujuan DPR dalam waktu 24 jam.

**Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun 2013 akan didanai dengan penerbitan surat utang negara**

Kebutuhan pembiayaan netto pemerintah tahun 2013 sebesar Rp 153 triliun, atau 1,65 persen dari PDB, sebagian besar akan didanai dengan penerbitan surat utang negara. Kebutuhan penerbitan sekuritas negara bruto untuk tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 282 triliun. Pada tahun 2013, strategi manajemen utang pemerintah turut menyertakan penerbitan obligasi dengan berbagai tenor, dan memberi prioritas kepada penerbitan obligasi-obligasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang (10 tahun atau lebih), menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar AS pada pasar dalam negeri, dan melakukan lebih banyak peralihan hutang bagi kepentingan pengelolaan likuiditas. Dalam jangka menengah, sebagai bagian dari strategi portofolio dan risiko, Pemerintah juga hendak meningkatkan bagian dari hutang domestik melalui penerbitan sekuritas pemerintah dan hutang dalam negeri, sementara pada saat yang bersamaan menurunkan bagian dari hutang luar negeri.

**Tabel 5: Defisit fiskal akan meningkat pada tahun 2012 karena peningkatan belanja subsidi energi dan perlemahan pada penerimaan**

*(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	2011	2012	2012 (p)	APBN-P	Perbedaan Proyeksi Bank Dunia Desember 2012 relatif terhadap:		2013	2013 (f)
	Realisasi	APBN-P	Bank Dunia Des. 2012**		Laporan Semester I DepKeu	Bank Dunia Oktober 2012	APBN	Bank Dunia Des. 2012**
<b>A. Penerimaan dan Hibah S</b>	<b>1.211</b>	<b>1.358</b>	<b>1.329</b>	<b>-29,5</b>	<b>-33,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>1.530</b>	<b>1.493</b>
1. Penerimaan Pajak	874	1.016	1.193	-22,1	-22,8	-7,3	1.193	1.148
2. Penerimaan Bukan Pajak	331	341	332	-7,3	-10,8	-3,7	332	340
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1.295</b>	<b>1.548</b>	<b>1.539</b>	<b>-9,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>-14,2</b>	<b>1.683</b>	<b>1.631</b>
1. Pemerintah pusat	884	1.070	1.059	-10,3	-11,6	-2,5	1.154	1.112
Pegawai	176	212	204	-8,3	-2,2	0,0	241	232
Material	125	187	159	-27,9	-11,3	-1,5	167	150
Modal	118	169	143	-25,2	-9,9	-2,4	216	195
Subsidi, dimana	295	245	346	100,4	-1,4	0,7	317	326
Subsidi BBM	165	137	216	79,0	-0,4	1,9	194	205
Sosial	71	55	54	-1,7	5,8	0,0	63	62
2. Transfer ke daerah	411	479	480	0,9	-2,6	0,0	529	518
<b>C. Keseimbangan primer</b>	<b>9</b>	<b>-72</b>	<b>-92</b>	<b>-20</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-40</b>	<b>-25</b>
<b>D. SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-84</b>	<b>-190</b>	<b>-210</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-153</b>	<b>-138</b>
Persentase PDB	-1,1	-2,2	-2,5	-0,3	-0,2	-0,1	-1,7	-1,5
<b>Asumsi ekonomi/realisasi</b>								
Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,5	6,5	6,1	-0,4	N.A	0,0	6,8	6,3
IHK (persen)	3,8	6,8	4,4	-2,4	-0,4	0,0	4,9	5,1
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	8.779	9.000	9.400	400	150	50	9.300	9.500
Harga minyak mentah (Dolar AS/barel)	112	105	115	10,0	5,0	0,0	100	105
Produksi minyak (ribu barel/hari)	900	930	900	-30,0	0,0	0,0	900	900

Catatan: \* APNB-P menyertakan pilihan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 bila rata-rata harga ICP selama enam bulan berada pada 15 persen di atas asumsi APNB-P sebesar 105 dolar AS per barel. \*\*Perkiraan penerimaan Bank Dunia berdasar metodologi yang berbeda dari Pemerintah untuk menghitung PDB nominal (lihat Bagian C dari *Triwulanan* edisi bulan Juni 2010 untuk pembahasan terinci).

Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

## 7. Pengambil kebijakan menghadapi serangkaian risiko dari dalam dan luar negeri pada tahun 2013

**Tekanan negatif permintaan luar negeri masih menjadi ancaman...**

Seperti ditekankan pada *Triwulanan* edisi bulan Juli dan Oktober, kondisi ekonomi global masih tetap lemah dan terdapat risiko yang nyata bahwa Indonesia akan menghadapi tekanan eksternal yang negatif. Secara khusus, walaupun resiko-resiko jangka pendek krisis hutang dan perbankan di zona Euro kelihatannya berkurang, kondisi ekonomi di blok ekonomi terbesar dunia tetap masih sangat menantang. Di Amerika Serikat, menurut Undang-Undang saat ini dan kecuali diamandemen, akan mengakibatkan penurunan sekitar 5 persen dari PDB AS (walau perkiraan dasar/*baseline* Bank Dunia mengasumsikan pemotongan yang lebih kecil sekitar 1 persen dari PDB). Akan sangat penting bagi AS untuk menghindari "jurang fiskal" ini bila pertumbuhan global pulih pada tingkat moderat seperti pada asumsi skenario dasar untuk tahun 2013. China tampaknya berhasil menghindari penurunan pertumbuhan yang drastis, tetapi masih harus dilihat bagaimana ekonominya beradaptasi menuju laju pertumbuhan berkelanjutan yang lebih lambat dibanding masa lalu dan ke perubahan sumber-sumber pertumbuhan yang berbeda. Bila kondisi para mitra perdagangan Indonesia itu menurun, maka Indonesia, bersama-sama dengan ekonomi berkembang (*emerging*) lainnya, akan menerima dampak berupa penurunan permintaan ekspor, berkurangnya aliran masuk investasi asing, atau bahkan aliran keluar modal.

**...dan juga terdapat risiko-resiko dari dalam negeri terhadap permintaan**

Secara domestik, belanja investasi telah menjadi sumber pertumbuhan yang kuat. Namun belum jelas apakah perlambatan dalam investasi di kuartal ketiga merupakan tanda dimulainya tren perlambatan, karena investasi cenderung menjadi komponen PDB yang bersifat naik-turun dan impor modal memang sedikit meningkat pada bulan Oktober. Namun ada sejumlah risiko terhadap belanja investasi yang kini berada pada tingkat yang tinggi. Pertama, investasi secara historis cenderung berkaitan erat dengan harga komoditas global, dan dengan harga-harga itu kini berada jauh di bawah harga-harga tertingginya pada waktu krisis keuangan, terdapat kemungkinan investasi akan mulai menurun karena penurunan keuntungan yang berkaitan dengan komoditas mempengaruhi ekonomi yang lebih luas. Kedua, sejumlah pengumuman kebijakan selama tahun 2012 telah mendorong sejumlah kekhawatiran terhadap lingkungan kebijakan investasi dan usaha dalam negeri. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dapat semakin meningkat menjelang pemilu tahun 2014, terutama karena minat risiko (*risk appetite*) investor global masih rapuh.

**Kebijakan dapat diuji walaupun lingkungan pertumbuhan tetap mendukung**

Walaupun risiko-risiko negatif terhadap permintaan dalam negeri ini tidak terealisasi, perkembangan ekonomi di tahun 2013 masih dapat menguji para pembuat kebijakan. Khususnya, bila pertumbuhan yang kuat berlanjut pada tahun 2013, maka sangatlah penting untuk selalu waspada untuk mengamati tanda-tanda bila ekonomi menjadi terlalu panas (*overheating*). Seperti pada risiko negatif terhadap permintaan, pendorong/katalis bagi kelebihan permintaan dapat berasal dari dalam atau luar negeri. Risiko eksternal utama adalah kembalinya aliran masuk modal investasi portofolio yang kuat. Hal ini telah meningkat menjelang akhir tahun 2012 dan dapat semakin meningkat karena kebijakan moneter yang longgar di ekonomi-ekonomi utama dan upaya pencarian *yield* secara global. Dari dalam negeri, diperkirakan ada sejumlah peningkatan tekanan inflasi *cost-push* (didorong biaya), termasuk dari tingginya peningkatan upah minimum, pengaruh berkelanjutan dari depresiasi Rupiah yang berlangsung selama tahun 2012, dan dampak sementara dari kenaikan tarif listrik. Dengan kuatnya permintaan dalam negeri saat ini, dimana di masa lalu mendapat dorongan tambahan dari belanja pra-pemilu, menjadi penting untuk ditanggapi secara pro-aktif terhadap risiko-risiko inflasi yang baru muncul atau terhadap tanda-tanda bahwa laju peningkatan investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif ekonomi telah tertinggal.

**Ketidakpastian dalam dan luar negeri tetap tinggi, menjadikan fokus pada kualitas pembuat kebijakan...**

Skenario dasar Bank Dunia melihat pertumbuhan PDB yang kuat di Indonesia untuk tahun 2013 dengan kondisi ekonomi global menjadi lebih mendukung. Namun ketidakpastian pada perkiraan (*outlook*) luar negeri masih tetap tinggi dan masih terdapat risiko-risiko kejutan eksternal yang lebih negatif yang menerpa ekonomi. Dengan terus berlanjutnya resiko outlook global dan kemungkinan adanya guncangan-guncangan politik menuju Pemilu 2014, dibutuhkan dukungan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Hal ini termasuk melanjutkan penekanan pada kebijakan mitigasi krisis, membangun kemajuan yang telah dibuat Indonesia dalam menjamin sumber-

sumber pendanaan kontingensi dan merumuskan protokol tanggapan pengelolaan krisis untuk digunakan bila terjadi tekanan yang besar terhadap pasar. Hal itu juga meningkatkan pentingnya penanganan hambatan pertumbuhan yang bersifat lebih struktural, terutama upaya untuk menutup kesenjangan infrastruktur yang besar dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, sehingga akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi.

**...terutama berkaitan  
dengan iklim investasi**

Peran sektor swasta yang sangat penting juga harus diakui, karena cepatnya pertumbuhan belanja investasi merupakan pendorong utama kuatnya laju pertumbuhan yang tercatat belakangan ini, yang meningkatkan standar kehidupan di Indonesia. Investasi membutuhkan komitmen jangka panjang yang tidak dapat berubah-ubah, dan untuk melakukannya dibutuhkan keyakinan dan kemampuan perencanaan ke depan. Menjaga kejelasan dan konsistensi kerangka peraturan, dan secara efektif mengelola komunikasi tentang reformasi baru apapun, dapat menjadi perbedaan yang menentukan bagi investasi, dan juga bagi ekonomi secara keseluruhan.

## B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA

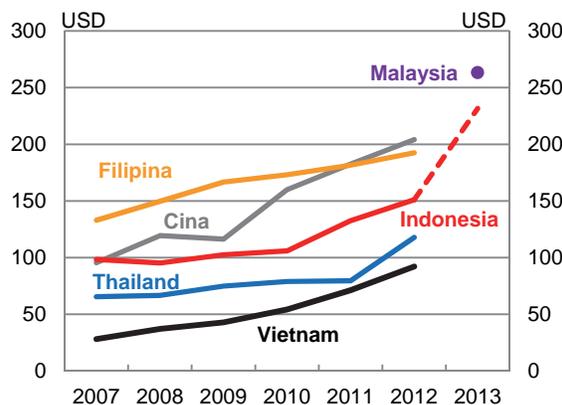


### 1. Apakah kenaikan upah minimum akan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja di Indonesia

**Negosiasi upah minimum tahun 2013 memicu protes buruh dan perdebatan mengenai kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia.**

Ribuan buruh turun ke jalan pada beberapa bulan terakhir untuk menuntut kenaikan upah minimum dan agar biaya-biaya untuk tunjangan jaminan sosial yang sedang dirancang dibebankan kepada perusahaan. Para pekerja meminta apa yang mereka anggap sebagai bagian yang adil dari keuntungan perusahaan selama berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta yang baru terpilih, Joko Widodo, sepakat untuk menaikkan upah minimum dari Rp 1,53 juta di tahun 2012 menjadi Rp 2,2 juta untuk tahun 2013. Pemerintah daerah lainnya juga mengikuti langkah tersebut. Ada kekhawatiran bahwa kenaikan upah minimum digunakan sebagai acuan bagi kenaikan gaji dan upah secara keseluruhan, yang akan meningkatkan biaya tenaga kerja di Indonesia. Pihak perusahaan menganggap bahwa hal ini akan mempengaruhi daya saing Indonesia dan dapat menghalangi investasi pada industri-industri padat tenaga kerja, seperti manufaktur. Apa dampak dari cepatnya laju kenaikan upah minimum terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia? Bagian ini mengkaji fakta-fakta yang ada untuk menjawab pertanyaan tersebut.

**Gambar 24: Kenaikan ditahun 2013 dapat mendorong upah minimum di atas negara tetangga (tingkat upah minimum (dolar AS), di beberapa negara Asia Timur)**



**Tabel 6: Sementara produktivitas pekerja masih tertinggal (upah minimum, rata-rata upah & nilai tambah per pegawai di beberapa negara Asia Timur, 2008)**

	Upah minimum (dolar AS)	Rata-rata upah (dolar AS)	Nilai tambah per pekerja (dolar AS)	Rasio MW ke rata-rata upah	Rasio MW ke nilai tambah per pekerja
Cina	119,4	302,9	276,5	0,39	0,43
<b>Indonesia</b>	<b>95,3</b>	<b>159,9</b>	<b>207,3</b>	<b>0,60</b>	<b>0,46</b>
Filipina	149,7	163,8	223,9	0,91	0,67
Thailand	66,6	235,4	401,2	0,28	0,17
Vietnam	26,1	n/a	100,4	n/a	0,26

Catatan: Upah minimum Indonesia menggunakan upah DKI Jakarta (dengan asumsi nilai tukar USD tahun 2013 adalah Rp 9.500), negara lainnya berdasarkan upah minimum dikota besar atau ibukota, tidak disesuaikan dengan produktivitas

Sumber: *Doing Business*, 2013, dan pers dan peraturan 2013

Sumber: *Doing Business*; rata-rata upah dari ILO LABORSTA.

Upah minimum memang dibutuhkan tetapi tantangannya adalah menemukan tingkat yang tepat

Kebijakan upah minimum dan peraturan perundangan perlindungan pekerja (termasuk peraturan tentang uang pesangon dan penggunaan kontrak permanen) memang dibutuhkan untuk menangani kegagalan pasar tenaga kerja yang dapat menghasilkan ketidakefisienan dan ketidakadilan.<sup>8</sup> Kekuatan pasar yang tidak merata, di dalam kondisi dimana jumlah perusahaan resmi lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya angkatan kerja, dapat mengakibatkan perusahaan menetapkan upah yang lebih rendah daripada yang akan disepakati pada keadaan yang lebih kompetitif. Tantangan yang dihadapi oleh para penyusun kebijakan adalah menetapkan upah minimum dan peraturan perlindungan pegawai lainnya pada tingkat yang tepat. Jika terlalu rendah, maka para pekerja akan menghadapi risiko yang besar dan penghasilan yang rendah. Jika terlalu tinggi, maka akan membawa dampak yang negatif terhadap iklim investasi dan menghalangi penciptaan lapangan kerja.

#### a. Tingkat upah minimum dan peraturan perlindungan pekerja di Indonesia

Kenaikan upah minimum di tahun 2013 merupakan yang tertinggi selama ini...

Negosiasi penetapan upah minimum yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 sampai 2012 upah minimum naik rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun. Kenaikan ini cukup moderat dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara berkembang berpenghasilan menengah lainnya. Namun, untuk tahun 2013, upah minimum mengalami kenaikan sebesar 43,9 persen di Jakarta dan 49,7 persen di Kalimantan Timur. Akan tetapi, kenaikan yang tajam ini tidak terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia karena upah minimum ditetapkan oleh pemerintah tingkat propinsi, dan adakalanya juga oleh pemerintah kabupaten dan kotamadya. Upah minimum di Sumatra Utara, sebagai contoh, hanya akan naik sebesar 8,8 persen dan upah minimum di Papua akan naik sebesar 7,9 persen.

...dan penetapan tunjangan jaminan sosial akan semakin mempertinggi biaya tenaga kerja.

Disamping kenaikan upah minimum, sebagian protes buruh juga menyoal kepada masalah siapa yang akan membayar tunjangan jaminan sosial yang dijanjikan kepada para pekerja berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU No 40/2004). UU ini menyebutkan bahwa setiap peserta harus membayar bagiannya, yang ditentukan berdasarkan persentase gaji atau berdasarkan jumlah nominal tertentu. Sementara tunjangan kecelakaan kerja dan kematian harus dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, menurut UU ini, biaya untuk program tunjangan pensiun, tabungan hari tua dan kesehatan harus ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Karena pekerja *informal* tidak memiliki perusahaan/pemberi kerja yang resmi, maka mereka harus membayar seluruh biaya program-program SJSN ini, kecuali jaminan kesehatan untuk orang miskin yang akan dibayar oleh pemerintah. Namun serikat-serikat buruh menuntut agar perusahaan menanggung biaya program-program itu sepenuhnya untuk pekerja sektor formal. Pemenuhan permintaan serikat ini tidak saja akan membutuhkan amandemen bagi UU SJSN dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No 24/2011), tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan finansial dari sistem yang sedang dirancang dan membatasi cakupan jenis tunjangan. Dengan demikian tantangannya tidak hanya terbatas kepada siapa yang akan membayar iurannya. Besar iuran, terlepas dari siapa yang akan membayarnya, juga akan membawa dampak terhadap biaya tenaga kerja dan keunggulan kompetitif Indonesia.

Sementara peraturan perlindungan pekerja merupakan salah satu yang paling kaku di kawasanya.

Perusahaan dapat menanggapi kenaikan biaya tenaga kerja dengan mengurangi jumlah pegawai. Namun tingkat pesangon di Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi di wilayah Asia Timur<sup>9</sup>. Pengurangan pegawai permanen sebagai respon terhadap kenaikan upah minimum yang tajam dengan demikian menjadi opsi yang mahal. Pada saat bersamaan, opsi untuk mempekerjakan pegawai kontrak sementara juga telah dibatasi, dan peraturan mengenai penggunaan tenaga kontrak dengan jangka waktu tertentu (*fixed-terms contracts*) merupakan salah satu yang paling ketat di kawasan itu. Sejalan dengan itu praktik *outsourcing* (pengalihdayaan - kontrak jasa dan proses usaha ke perusahaan lain) juga telah dibatasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru-baru ini menerbitkan peraturan yang membatasi *outsourcing*<sup>10</sup> hanya kepada lima

<sup>8</sup> Bank Dunia, 2013 World Development Report on Jobs. <http://go.worldbank.org/TM7GTEB8U0>

<sup>9</sup> Bank Dunia, 2013 Doing Business Report. <http://www.doingbusiness.org/>

<sup>10</sup> Regulation No. 19 of 2012 on Conditions for Outsourcing the Implementation of Work to Other Companies.

kegiatan jasa. Hal ini membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap kenaikan biaya tenaga kerja atau untuk menerapkan praktik-praktik manufaktur yang efisien yang mengandalkan rantai pasokan dimana produksi komponennya dialihdayakan ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil.

**Terdapat debat terbatas tentang dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan tersebut.**

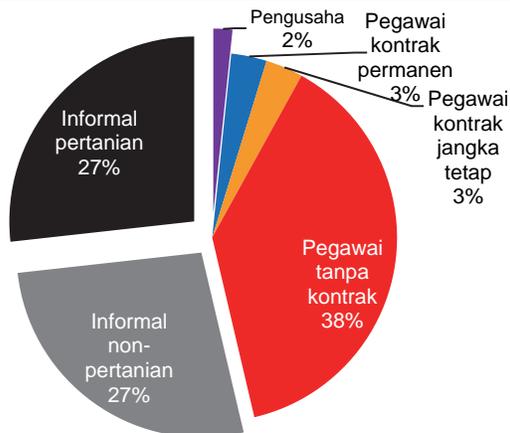
Masing-masing masalah ketenagakerjaan tersebut telah diperdebatkan sebelumnya secara terpisah melalui negosiasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja dan kelompok pengusaha. Tetapi hal mengenai keterkaitan masalah-masalah tersebut dan bagaimana kesemuanya secara bersama-sama mempengaruhi kenaikan biaya tenaga kerja dan laju penciptaan lapangan kerja di Indonesia dalam jangka panjang tidak cukup banyak mendapat perhatian. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi ketiga pihak tersebut, tetapi juga sebagian besar angkatan kerja yang kepentingannya tidak terwakili. Angkatan kerja di Indonesia kini berjumlah sekitar 110,8 juta jiwa (Sakernas, tahun 2012), dimana 40 persennya bekerja di sektor formal. Sekitar 90 persen dari angkatan kerja ini terdiri dari pekerja yang tidak memiliki kontrak atau bekerja di sektor informal (Gambar 25). Serikat pekerja secara langsung mewakili sekitar 11 persen dari angkatan kerja (Sakernas, tahun 2007). Suara-suara dari pekerja "luar" yang tidak terwakili oleh serikat seharusnya turut disertakan ke dalam dialog kebijakan tentang upah minimum dan tunjangan jaminan sosial, karena mereka adalah pihak yang berpotensi akan menerima kerugian yang paling besar dari kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memberikan dampak negatif kepada penciptaan lapangan kerja, terutama terhadap industri-industri padat tenaga kerja seperti manufaktur.

**Di Indonesia, upah minimum mempengaruhi upah keseluruhan**

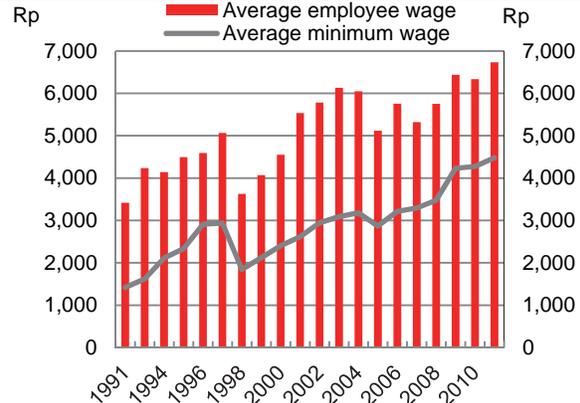
Beberapa negara menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan upah minimum. Sejumlah negara menetapkan upah minimum yang rendah untuk melindungi pekerja berupah rendah dan menjamin tingkat pendapatan dasar. Beberapa negara menggunakan upah minimum sebagai mekanisme utama penetapan upah untuk sebanyak mungkin sektor formal. Di negara-negara lainnya, bahkan jika tidak terdapat mekanisme formal yang mengkaitkan penetapan upah formal dengan upah minimum, upah minimum dapat digunakan sebagai acuan negosiasi bagi penetapan upah untuk formal dan informal sektor lainnya. Pada kasus Indonesia, tampaknya kenaikan upah minimum berkaitan dengan kenaikan upah rata-rata karyawan. Analisis regresi pada periode 1993 sampai 2007 menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum sebesar 10 persen berkaitan dengan kenaikan sebesar 3 persen pada rata-rata upah untuk seluruh pekerja penerima upah dan gaji pada tahun yang sama.<sup>11</sup> Kenaikan upah minimum menimbulkan kekhawatiran di Indonesia karena dapat memicu kenaikan upah dan gaji seluruh pekerja kontrak, tidak hanya pekerja berupah rendah. Tingginya kenaikan upah minimum untuk tahun 2013 dapat secara signifikan mendorong naik biaya tenaga kerja di Indonesia.

<sup>11</sup> Bank Dunia, Indonesia Jobs Report, 2010.  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12711439/indonesia-jobs-report-towards-better-jobs-security-all-vol-2-2-main-report>.

**Gambar 25: Sebagian besar angkatan kerja di Indonesia adalah pekerja informal... (distribusi pekerja aktif menurut status pekerjaan, 2007)** **Gambar 26: Tetapi bagi pekerja di sektor formal, upah minimum mengindikasikan kenaikan bagi semua. (upah minimum dan rata-rata upah pegawai, riil 2007=100)**



Sumber: IFLS



Sumber: Sakernas

...karena daya tawar kolektif pada tingkat perusahaan lemah

Hanya sedikit perusahaan yang melakukan negosiasi dengan pegawainya mengenai syarat-syarat dan ketentuan ketenagakerjaan melalui perjanjian ketenagakerjaan bersama atau peraturan perusahaan. Pada dasarnya Indonesia termasuk di antara negara-negara dengan persentase terendah tenaga kerja yang dilindungi melalui persetujuan perundingan bersama.<sup>12</sup> Serikat pekerja, dengan demikian, melihat proses penetapan upah minimum sebagai satu dari sedikit kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan. Tingkat kenaikan upah minimum memberikan harapan bagi seluruh pekerja lintas golongan upah.

#### b. Pengaruh kenaikan upah minimum terhadap penciptaan lapangan kerja

Kenaikan upah minimum berkorelasi dengan pengurangan perekrutan pekerja baru di sektor formal

Kenaikan upah minimum berkaitan dengan penurunan lapangan kerja di sektor formal. Analisis regresi periode tahun 1993-2007 menunjukkan bahwa, sementara peningkatan upah minimum tidak memberikan pengaruh yang jelas terhadap tingkat lapangan kerja atau pengangguran secara keseluruhan, terdapat indikasi bahwa perusahaan menanggapi dengan mempekerjakan lebih sedikit pegawai, yang menyebabkan turunnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 10 persen secara rata-rata, akan berkaitan dengan penurunan sebesar 1 persen pada lapangan kerja sektor formal dan industri.<sup>13</sup> Arah kausalitasnya tidaklah jelas; kenaikan upah pegawai dapat terdorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memicu kenaikan upah minimum. Namun pengaruh-pengaruh tersebut paling kuat dirasakan pada tahun berikutnya menyusul kenaikan upah minimum, dan melemah setelah dua tahun. Sulit untuk mengetahui sampai sejauh mana kenaikan upah minimum di tahun 2013 akan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja sektor formal karena kenaikan tersebut hampir empat kali lipat lebih besar dari kenaikan tertinggi selama periode penelitian tersebut.

<sup>12</sup> Bank Dunia, *World Development Report 2013: Jobs*.  
<http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258>

<sup>13</sup> Bank Dunia, *Indonesia Jobs Report, 2010*.  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12711439/indonesia-jobs-report-towards-better-jobs-security-all-vol-2-2-main-report>

**Kotak 4: Peraturan Tenaga Kerja: Pengaruh “taraf tanpa kemajuan”**

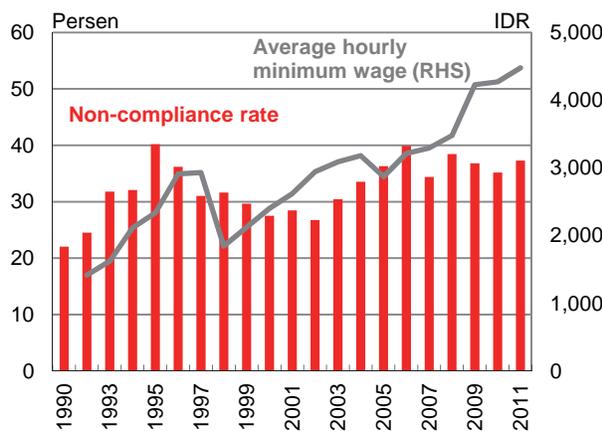
Data-data baru dan metodologi yang lebih teliti telah mendorong serangkaian penelitian empiris pada dua dekade terakhir tentang pengaruh peraturan tenaga kerja dan upah minimum terhadap dunia kerja, upah, distribusi upah dan produktivitas. Berdasarkan penelitian-penelitian baru tersebut, mayoritas penelitian upah minimum menemukan pengaruh negatif kepada dunia kerja, terutama bagi pekerja usia muda, tetapi pengaruhnya cenderung kecil. Di negara-negara dengan sektor informal yang besar, mungkin timbul dampak yang relatif kecil dari peraturan perlindungan pegawai (PPP) dan upah minimum, sebagian disebabkan oleh cakupannya yang tidak memadai dan pelaksanaan yang lemah. Banyak negara menetapkan PPP dan upah minimum pada kisaran “taraf tanpa kemajuan” yang membawa dampak yang kecil kepada lapangan kerja dan produktivitas. Namun ketika batas dari taraf itu telah tercapai (baik terlalu ketat atau terlalu longgar), dampaknya dapat menjadi lebih negatif. Kenaikan upah minimum yang tinggi di Kolombia pada akhir tahun 90an, misalnya, menyebabkan kerugian perusahaan yang signifikan, yang diperparah dengan lemahnya permintaan pada waktu itu.

Sumber dan catatan: Bank Dunia, 2013 World Development Report on Jobs.

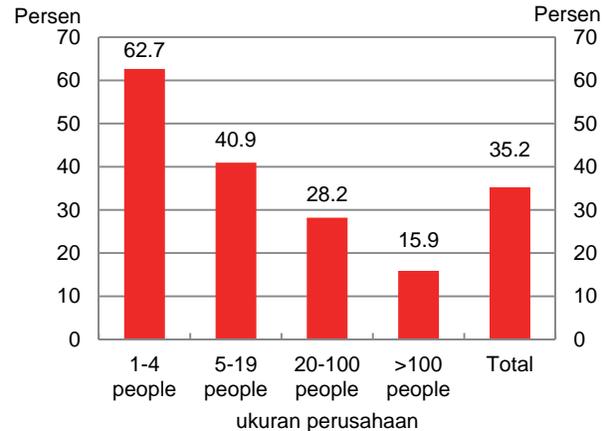
**Tapi bahkan setelah kenaikan ditetapkan, tidak semua pegawai menerima upah minimum tersebut...**

Tidak seluruh pekerja memperoleh manfaat dari upah minimum. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap kebijakan upah minimum. Pada tahun 2008, sekitar sepertiga dari seluruh pegawai melaporkan bahwa mereka menerima upah di bawah upah minimum. Analisis regresi terhadap data tahun 1993-1997 menunjukkan bahwa ketidakpatuhan meningkat sebesar 2,6 persen ketika upah minimum dinaikkan sebesar 10 persen.<sup>14</sup> Ketidakpatuhan lebih umum terjadi pada perusahaan berukuran mikro dan kecil, yang umumnya merupakan perusahaan informal (tidak berbentuk badan hukum) dan kecil kemungkinannya berada dalam pengawasan inspektorat tenaga kerja. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui apakah ketidakpatuhan meningkat atau menurun sejak tahun 1997, dan kelompok pekerja mana yang lebih terpengaruh oleh ketidakpatuhan.

**Gambar 27: Ketidakpatuhan cenderung meningkat dengan naiknya upah minimum**  
**Gambar 28: ...dan perusahaan kecil cenderung lebih tidak patuh**  
*upah minimum dan persentase pegawai yang berpenghasilan di bawah upah minimum, tahun 1990-2011*  
*persentase pegawai yang berpenghasilan di bawah upah minimum menurut ukuran perusahaan, tahun 2008*



Sumber: Sakernas



Sumber: Sakernas

**...yang cenderung lebih banyak mempengaruhi pekerja berupah rendah.**

Rumah tangga miskin menerima manfaat yang lebih rendah dari kenaikan upah minimum. Pertama, banyak dari kelompok miskin tidak bekerja pada sektor formal dan tidak menerima upah tetap. Kedua, mayoritas pekerja miskin (55 persen pada tahun 2006) penerima gaji melaporkan bahwa mereka menerima kurang dari upah minimum.<sup>15</sup> Hal ini tampaknya karena mereka kebanyakan bekerja di perusahaan mikro yang cenderung tidak mematuhi upah minimum.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

c. Perubahan dalam proses penetapan upah minimum

Indonesia merevisi proses penetapan upah minimum pada tahun 2006

Proses penetapan upah minimum yang kini berlaku pertama kali ditetapkan melalui UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dimana disebutkan bahwa dewan pengupahan tripartit lokal memberikan usulan tingkat upah minimum yang didasarkan pada standar hidup layak bagi pekerja. Gubernur (di tingkat provinsi) dan bupati dan walikota (di tingkat kabupaten dan kotamadya) melakukan finalisasi dan menetapkan upah minimum yang baru. Pada tahun 2005 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan bahwa dewan pengupahan lokal diharuskan menggunakan standar yang baru dalam menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang akan digunakan sebagai masukan dalam menetapkan upah minimum. KHL, yang dihitung dari harga kelompok 46 barang dan jasa pokok, rata-rata lebih tinggi sebesar 38 persen dibandingkan dengan KHL sebelumnya.<sup>16</sup>

...tetapi prosesnya seharusnya lebih tidak politis dan lebih didasari oleh hal-hal teknis.

Pada tahun 2007, kewenangan menghitung KHL berpindah dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke Dewan Pengupahan tripartit lokal. Kelompok serikat pekerja dan perusahaan melakukan survei sendiri untuk menghitung KHL, yang kemudian dinegosiasikan dan angka kompromi disepakati. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan kenaikan riil harga yang lebih besar ; pada tahun 2007-2011 kenaikan KHL hampir mencapai dua kali lipat dari perkiraan kenaikan berdasarkan laju inflasi.<sup>17</sup> Pengaruh KHL terhadap upah minimum – walaupun positif –relatif kecil. Faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Dewan Pengupahan tidak diumumkan kepada publik. Pergeseran dari pendekatan teknis ke negosiasi dapat menjelaskan besarnya variasi upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia.

Dibutuhkan revisi terhadap proses penetapan upah minimum untuk mencegah kerusuhan buruh.

Karena proses penetapan upah minimum pada dasarnya dilakukan melalui negosiasi, dan hanya memiliki kaitan yang lemah dengan penilaian teknis terhadap kenaikan biaya hidup, proses tersebut menjadi sangat kontroversial. Pendekatan yang lebih teknis dan profesional dalam menetapkan upah minimum dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dari proses tersebut dan, pada saat yang bersamaan, meminimalkan ketidakpastian bisnis dan kerugian . Ketepatan pengukuran KHL harus ditinjau ulang, dan proses transparan untuk menghitung kembali KHL tahunan harus disepakati sejak awal. KHL yang telah direvisi ini harus menjadi penentu utama dalam mengusulkan kenaikan upah minimum; faktor-faktor lain yang memberi kontribusi kepada perhitungan harus dibakukan dan terbuka untuk diperiksa oleh masyarakat. Pergeseran menuju pendekatan yang transparan dan didasari oleh faktor teknis, yang disinggung sebelumnya, akan membantu menjamin bahwa proses penetapan upah minimum tidak akan dipengaruhi oleh politik lokal atau kepentingan perusahaan dan/atau serikat pekerja. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan kepastian perkiraan tingkat upah minimum selanjutnya, yang akan membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dengan membantu perencanaan usaha dan menurunkan risiko kerusuhan buruh.

d. Menggunakan visi jangka panjang terhadap penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja

Dibutuhkan dialog yang lebih mendalam tentang strategi reformasi jangka panjang yang bermanfaat untuk seluruh pekerja...

Kebijakan upah minimum terkait erat dengan upaya-upaya perlindungan pekerja lainnya: uang pesangon, pembatasan kontrak jangka waktu tertentu dan *outsourcing*, dan pemberlakuan tunjangan jaminan sosial seperti pensiun dan asuransi kecelakaan kerja. Terjadi perdebatan yang sengit mengenai hal-hal di atas, tetapi para pekerja dan pengusaha tetap terjebak dalam keadaan “sama-sama rugi.” Hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dan peraturan dapat bekerja bersama-sama untuk melindungi pekerja, atau pengaruhnya terhadap penciptaan lapangan kerja. Ada kebutuhan bagi pemerintah, pekerja (diwakili tidak hanya oleh serikat tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pekerja informal yang jumlahnya besar) dan perusahaan untuk bergerak menuju visi jangka panjang reformasi kebijakan tenaga kerja di Indonesia dan menemukan solusi “sama-sama untung” yang diterima oleh semua pihak. Secara bersama-sama, para pemangku kepentingan ini harus mempertimbangkan perpaduan kebijakan dan instrumen yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan yang sesungguhnya kepada para pekerja tanpa mengorbankan investasi pada industri-industri padat tenaga kerja dan laju penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

<sup>16</sup> Manning, Chris dan Raden Muhamad Purnagunawan, 2012.

<sup>17</sup> Ibid.

Diskusi mengenai sejumlah masalah yang berkaitan dengan penetapan sistem jaminan sosial nasional dan penanganannya juga diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperluas cakupan, merancang paket tunjangan yang tepat, memastikan bahwa sistem yang akan datang akan berkelanjutan secara finansial untuk jangka panjang, mengubah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan sistem jaminan sosial, dan mensinergikan UU ketenagakerjaan dengan pemberlakuan program-program jaminan sosial bagi pekerja..

**...dan lebih didasari oleh penelitian berbasis bukti daripada politik jangka pendek.**

Penelitian empiris yang kuat dapat memberikan masukan terhadap perdebatan di seputar reformasi ketenagakerjaan. Pada tahun 2010, Bank Dunia menerbitkan Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia (*Indonesia Jobs Report*), suatu kajian lengkap tentang pasar tenaga kerja di Indonesia selama dua dekade terakhir. Pada awal tahun 2013, Bank Dunia akan memperbarui laporan ini, yang akan meliputi perluasan dari sejumlah masalah yang paling mendesak, seperti tunjangan jaminan sosial bagi pekerja dan pendekatan-pendekatan baru untuk peningkatan keterampilan. Pada saat yang bersamaan, Laporan Perkembangan Dunia (*World Development Report*) Bank Dunia tahun 2013 memfokuskan kepada masalah ketenagakerjaan dan akan memberikan pemahaman global tentang bagaimana menyediakan lebih banyak pekerjaan dan memperbaiki perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja.

## 2. Membangun ketahanan Jakarta terhadap banjir

Jakarta adalah pusat perkotaan Indonesia, salah satu daerah metropolitan terbesar di dunia, dan sumber dari hampir seperlima PDB Indonesia...

Sebagai pusat niaga utama di Indonesia, ibukota Jakarta memiliki kontribusi sekitar 13 persen, atau 112 miliar dolar AS, terhadap jumlah PDB Indonesia.<sup>18</sup> Sebagai pusat ekonomi dan politik di Indonesia, urbanisasi dari daerah juga memberi kontribusi menjadikan Jakarta sebagai salah satu daerah metropolitan terbesar di dunia. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mencakup daerah dengan luas sekitar 650 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa (2010). Jumlah penduduk Jakarta dan sekitarnya (mencakup daerah seluas 7.300 km<sup>2</sup>) mencapai hampir 30 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk berada jauh di atas rata-rata nasional dan jumlah penduduknya diperkirakan akan melampaui 35 juta jiwa pada tahun 2020. Diperkirakan sebanyak 250.000 pendatang dari desa pindah ke Jakarta setiap tahun, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pemukiman liar di mana penduduk hidup tanpa dukungan pelayanan umum (seperti transportasi, pasokan air, sanitasi dan pengelolaan limbah).

...tetapi Jakarta mengalami masalah banjir yang menahun

Disebabkan oleh lokasi dan cepatnya pertumbuhan penduduk, ditambah buruknya tingkat pelayanan masyarakat, kota Jakarta telah dikenal karena sejumlah masalahnya, dan yang paling parah timbul dalam bentuk banjir yang terus berlangsung selama bertahun-tahun. Jakarta dibangun di atas daerah dataran rendah pantai. Kota Jakarta terletak di atas daerah endapan aliran sungai pada bagian paling rendah dari cekungan yang dikelilingi oleh sejumlah gunung berapi yang tidak aktif yang lereng-lerengnya membentuk daerah penampung bagian hulu dari 13 sungai besar yang melalui cekungan itu menuju ke Laut Jawa. Saat ini, sekitar 40 persen dari kota Jakarta (termasuk sebagian besar daerah utara) berada pada, atau di bawah, permukaan air laut. Banjir tahunan sudah menjadi hal yang umum di Jakarta sejak pendiriannya. Banjir besar dan merusak telah tercatat sampai sejauh tahun 1621, 1654 dan 1918.<sup>19</sup>

Dengan musim penghujan yang sedang berlangsung yang telah membawa banjir ke daerah-daerah tertentu di kota Jakarta, bagian ini memberikan tinjauan terbaru mengenai dampak ekonomi dan kemanusiaan yang berat dari banjir tersebut dan faktor-faktor penyebabnya. Sementara mengenali tantangan-tantangan kebijakan, bagian ini menguraikan sejumlah tindakan yang dapat segera dilakukan untuk membantu meringankan dampak banjir dan meningkatkan ketahanan kota untuk jangka pendek dan menengah.

### a. Tingkat keparahan banjir semakin meningkat, membebankan biaya yang signifikan

Tingkat keparahan kejadian banjir semakin meningkat belakangan ini...

Tingkat keparahan dari kejadian banjir meningkat selama dekade-dekade terakhir, terutama banjir besar yang terjadi pada bulan Januari 1996, Februari 2002 dan Februari 2007. Banjir pada tahun 2007 saja menggenangi daerah seluas 235 km<sup>2</sup> (sekitar 36 persen) dari kota Jakarta, dengan kedalaman yang mencapai tujuh meter di beberapa wilayah. Banjir tersebut berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang dan memaksa 340.000 penduduk untuk mengungsi dari rumah mereka. Lebih dari 70 jiwa menjadi korban dan wabah penyakit menjangkiti lebih dari 200.000 orang. Pada tahun 2008 banjir menyerang jalan tol bandara, membatalkan 1.000 penerbangan dan menyebabkan gangguan yang berat bagi Jakarta. Banjir tahun 2009 juga terjadi dengan intensitas yang tinggi dan berlanjut hingga tahun 2010. Risiko banjir yang dirasakan dan yang sebenarnya menyebabkan penderitaan penduduk, kerusakan langsung pada bidang ekonomi dan keuangan, dan mempengaruhi pertimbangan usaha dan investor dalam penentuan keputusan investasi pada daerah-daerah yang berdampak banjir.

...menimbulkan kerugian ekonomi, keuangan dan kemanusiaan...

Kerugian ekonomi dan keuangan dari kejadian banjir selama 10 hari di tahun 2002 melampaui 1 miliar dolar AS, sementara banjir 6 hari pada tahun 2007 menyebabkan kerugian sekitar 900 juta dolar AS. Akibat dari parahnya banjir di Jakarta lebih menakutkan bila diukur menurut dampak sektoralnya. Tidak seperti bencana alam yang terjadi dengan cepat seperti gempa bumi atau tsunami (yang dampak dan rekonstruksinya dibahas pada bagian berikut), kerusakan langsung yang disebabkan oleh

<sup>18</sup> Perhitungan berdasarkan Angka PDB tahun 2011 dan PDB daerah dari CEIC

<sup>19</sup> Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah JABODETABEK, <http://www.bappenas.go.id/node/111/995/laporan-perkiraan-kerusakan-dan-kerugian-pasca-bencana-banjir-awal-februari-2007-di-jabodetabek/>

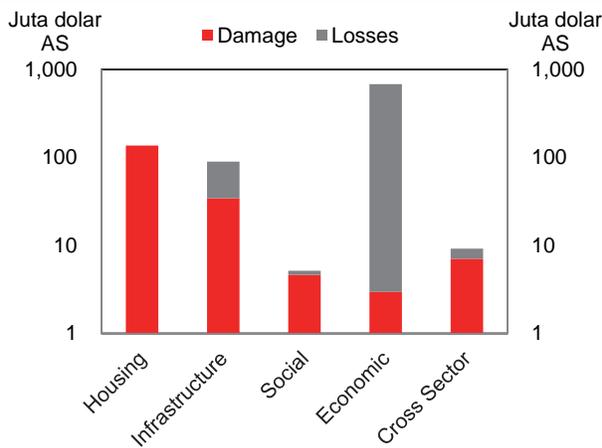
genangan air relatif kecil dibanding kerugian ekonomi yang timbul dari gangguan kepada layanan kota dan mobilitas, dan juga kepada kegiatan ekonomi produktif (lihat Kotak 5 tentang banjir tahun 2007).

**Kotak 5: Dampak banjir besar tahun 2007 terhadap Jakarta**

Banjir tahun 2007, yang menggenangi hampir 36 persen dari kota Jakarta, menutup akses ke banyak jalan utama, mengganggu pengiriman barang-barang dan bahan-bahan produksi dari, ke dan di dalam kota Jakarta. Banjir itu juga menggenangi 2.465 trafo penyalur tenaga listrik yang memaksa pemadaman trafo-trafo tersebut. Lima instalasi pengolahan air juga terkena dampak, sementara kerusakan terhadap saluran utama dari sumber aliran hulu di Bogor menurunkan pasokan air bersih sebesar 400 liter/detik selama lebih dari satu minggu. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia memperkirakan bahwa klaim yang harus dibayar kepada perorangan mencapai 400 juta dolar AS.

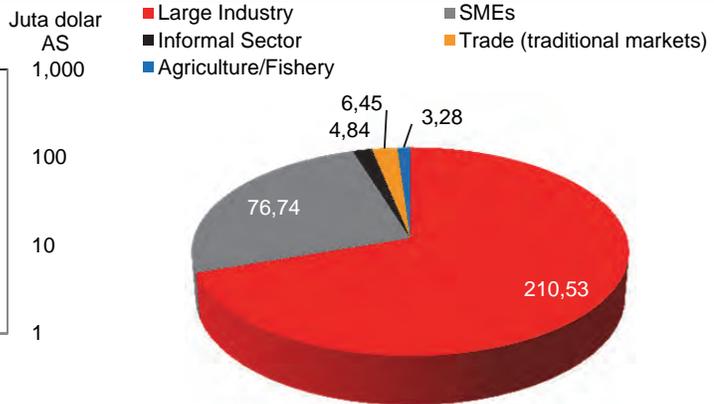
Dampak banjir itu relatif terdokumentasi dengan baik. Perkiraan kerusakan dan kerugian dilaksanakan secepat mungkin oleh BAPPENAS. Perkiraan tersebut memberikan rincian dampak sektoral dari bencana itu dalam bentuk kerusakan langsung kepada aset dan kerugian ekonomi dari gangguan kegiatan ekonomi. Sementara kerusakan langsung kepada rumah-rumah penduduk dan infrastruktur publik mencapai lebih dari 160 juta dolar AS, dampak ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya kesempatan niaga dan perdagangan berjumlah lebih tinggi, sebesar 680 juta dolar AS.

**Gambar 29: Banjir tahun 2007 menyebabkan kerusakan finansial yang cukup besar dan kerugian ekonomi yang jauh lebih tinggi...**



Sumber: Bappenas 2007

**Gambar 30: ...dan kerugian ekonomi itu terfokus kepada perusahaan-perusahaan industri yang lebih besar**



Sumber: Bappenas 2007

Pengamatan lebih cermat pada kerugian ekonomi tersebut juga menunjukkan bahwa industri besar, seperti pabrik-pabrik besar, menerima dampak yang paling tinggi, karena pasokan bagi produksi mereka terganggu dan kegiatan pabrik-pabrik terpaksa dihentikan karena para pekerja tidak dapat masuk kerja. Dampak kedua terbesar dialami oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang umumnya mempekerjakan lebih banyak orang. Dengan semakin pentingnya kota-kota industri utama seperti Indonesia sebagai basis produksi regional bagi ASEAN, bencana banjir seperti ini meningkatkan kekhawatiran besar akan terjadinya gangguan pasokan bagi pemain-pemain ekonomi regional seperti produsen mobil dan suku cadang (dengan timbulnya kekhawatiran yang serupa setelah banjir besar yang melanda Thailand pada tahun 2011).

**...berdampak pada penduduk miskin secara tidakproporsional**

Sementara bencana banjir besar seperti yang terjadi pada tahun 2007 berdampak baik kepada penduduk miskin maupun berkecukupan di Jakarta, kaum papa, yang umumnya hidup di daerah dengan ketinggian yang rendah atau pada tepian jalur air, menerima dampak yang tidak proporsional (Gambar 30). Sebagai daerah metropolitan, Jakarta menjanjikan banyak kesempatan ekonomi dan menarik penduduk dari daerah sekitarnya. Sangat kurangnya fasilitas perumahan yang memadai dan terjangkau bagi pekerja harian dan mereka yang bekerja pada sektor informal yang membantu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu kota besar, menyebabkan peningkatan pemukiman liar yang umumnya menempati tempat-tempat umum di daerah yang tidak aman dan dilarang untuk dihuni. Kecenderungan ini tidak hanya meningkatkan kerawanan komunitas tersebut, tetapi juga membebani infrastruktur yang memang telah berusia tua dan seringkali tidak dipelihara dengan baik, seperti kanal-kanal dan tanggul sungai.

b. Pola cuaca, urbanisasi, penurunan permukaan tanah dan iklim semuanya memainkan peran...

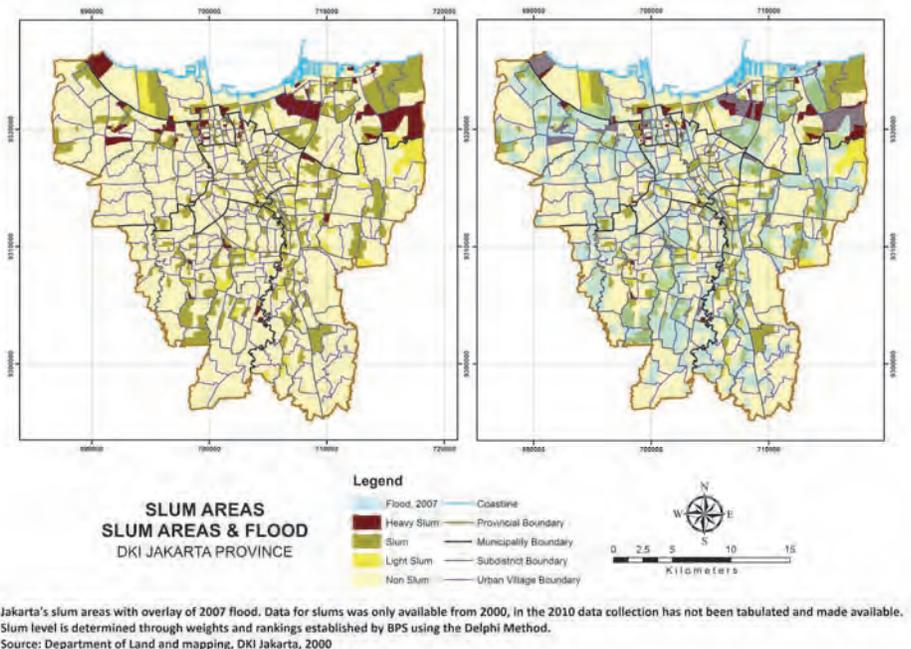
**Pola iklim dan cuaca berkontribusi menjadikan Jakarta lebih rentan terhadap banjir...**

Wilayah Jakarta memiliki tingkat curah hujan tahunan yang tinggi. Iklim dan cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh pertemuan pengaruh tropis dan wilayah benua, dan musim, yang membentuk pola cuaca yang istimewa seperti musim panas dan hujan. Di sekitar Jakarta, formasi jajaran pegunungan dan tanah yang rumit menciptakan peningkatan massa udara lembab yang menghasilkan hujan deras yang mempengaruhi sistem cuaca regional. Curah hujan tahunan umumnya berkisar antara 1.500 dan 2.500 mm, tetapi daerah-daerah hulu yang terletak lebih tinggi dapat mencatat curah hujan hingga 4.000 mm per tahun, yang menghasilkan aliran air permukaan dengan volume dan intensitas yang tinggi yang melalui daerah cekungan Jakarta.

**...dan diperparah dengan urbanisasi besar-besaran dan ketidaktersediaan infrastruktur**

Kecendekungan urbanisasi secara keseluruhan menjadi penyebab utama banjir di Jakarta. Penduduk Jakarta dan sekitarnya (Jabotabekpunjur) telah meningkat lebih dari tiga kali lipat selama empat dekade terakhir, sebesar 8,4 juta pada tahun 1971, 11,5 juta pada 1980, 17,1 juta pada 1990, 20,4 juta pada 2000, dan 27,9 juta pada tahun 2010. Kepadatan penduduk bersih di kota Jakarta berada pada kisaran 140 orang per hektar, dengan Jakarta Pusat memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia. (Gambar 31)

**Gambar 31: Daerah-daerah perumahan kumuh yang terkena banjir**



Sumber: *Jakarta Urban Challenges in a Changing Climate. Mayors' Task Force On Climate Change, Disaster Risk and The Urban Poor* (2011)

**Urbanisasi telah menurunkan kapasitas penyerapan dan retensi air hujan, sehingga terlalu membebani rancangan sistem pengendalian banjir**

Tingginya tingkat urbanisasi berkaitan dengan semakin parahnya peristiwa banjir. Pembangunan dilakukan pada daerah-daerah penampungan air yang penting dan daerah-daerah yang seharusnya bebas dari pembangunan, dan adanya peningkatan produksi limbah padat dan pengendapan. Dengan semakin meningkatnya urbanisasi ke arah hulu sungai, pola penggunaan tanah turut berubah dan persaingan untuk sumber daya air semakin meningkat, yang membawa dampak buruk kepada daerah-daerah hilir. Titik puncak aliran air telah meningkat (peningkatan volume dan kecepatan aliran), yang disebabkan oleh penurunan penyerapan air hujan dan kapasitas retensi, yang membebani rancangan sistem pengendalian banjir. Kapasitas aliran rancangan pengendali banjir juga telah menurun karena tidak adanya pemeliharaan dan operasi yang memadai dan keberadaan titik-titik penghalang air (seperti jembatan rendah, pipa-pipa dan prnghalang lain) yang menyebabkan pengendapan. Sekitar 17,9 persen dari

seluruh limbah padat berakhir pada sistem drainase, dengan volume sekitar 1.067 m<sup>3</sup>/hari, yang mana sekitar 921 m<sup>3</sup>/hari dihasilkan oleh DKI Jakarta sendiri, sementara 146 m<sup>3</sup>/hari sisanya datang dari daerah hulu.

**Penurunan permukaan tanah dan perubahan iklim menambah masalah, dengan sejumlah daerah di Jakarta mengalami penurunan permukaan hingga 25 cm per tahun...**

Sementara itu, terus menurunnya permukaan tanah semakin mengancam fungsi sistem pengendalian banjir secara keseluruhan dan meningkatkan risiko banjir air pasang, dan perubahan iklim diperkirakan akan mendorong semakin tingginya intensitas curah hujan dan kenaikan ketinggian permukaan laut. Penelitian terakhir tentang penurunan permukaan tanah menemukan bahwa tingkat penurunan yang umumnya berada pada kisaran 7,5 hingga 10 cm per tahun yang terutama mempengaruhi daerah-daerah di bagian utara Jakarta. Akan tetapi, pada daerah-daerah tertentu di sebelah utara Jakarta, penurunan permukaan tanah yang mencapai kisaran 15 hingga 25 cm per tahun juga telah tercatat, yang bila terus berlangsung, akan menyebabkan ketinggian tanah mereka turun ke 4 hingga 5 m di bawah permukaan air laut pada tahun 2025. Penurunan permukaan tanah meningkatkan kerawanan terhadap banjir karena perlemahan daya gravitasi dalam menyalurkan aliran air ke laut, dan juga meningkatkan risiko banjir yang disebabkan oleh air laut yang pasang. Penurunan permukaan tanah juga meningkatkan kebutuhan untuk pompa, tanggul dan pertahanan laut. Penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah melalui penggalian yang dalam – sebagai sumber utama air bersih bagi rumah tangga dan perusahaan di dalam kota. Pengeboran sumur yang dalam ke akuifer dan tingginya penggunaan air meruntuhkan struktur akuifer dan membuka jalan bagi intrusi air laut.

**...sementara model iklim meramalkan peningkatan ketinggian air laut dan tingginya frekuensi dan intensitas curah hujan**

Model iklim wilayah yang diterbitkan sebagai bagian dari penelitian pemetaan kerawanan perubahan iklim bagi Asia Tenggara (2009) menyebutkan bahwa Jakarta merupakan wilayah yang paling rawan di Asia Tenggara terhadap risiko perubahan iklim<sup>20</sup>. Perubahan iklim dapat membawa dua dampak terhadap banjir di Jakarta – melalui peningkatan ketinggian air laut dan melalui peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan. Peningkatan permukaan air laut yang disertai dengan penurunan permukaan tanah yang drastis, akan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi penduduk yang hidup pada daerah-daerah pantai yang rendah di bagian utara kota Jakarta. Peningkatan curah hujan juga menjadi sumber keprihatinan. Laporan dari Dewan Perubahan Iklim Antar Pemerintahan di tahun 2008 menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi semakin rawan terhadap peningkatan jumlah hari-hari basah pada abad yang baru, ditandai dengan peningkatan frekuensi hujan dan intensitasnya, terutama pada daerah-daerah tropis dan garis lintang yang tinggi yang memang telah memiliki angka *rata-rata* curah hujan secara statistika yang tinggi. Skenario bencana banjir yang paling dahsyat untuk kota Jakarta adalah ketika kondisi air pasang terjadi pada saat yang sama dengan tingginya curah hujan pada bagian hulu – risiko peristiwa banjir yang semakin memprihatinkan dengan adanya tambahan faktor perubahan iklim di wilayah tersebut.

**c. ...tetapi berbagai tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan Jakarta terhadap banjir**

**Upaya mitigasi banjir yang komprehensif merupakan hal yang rumit dan terkendala oleh sulitnya koordinasi lintas daerah cekungan...**

Peraturan tata ruang wilayah mengatur implementasi pengelolaan dan koordinasi banjir lintas pemerintahan daerah, tetapi, seperti dijumpai pada negara-negara lain, koordinasi silang demikian akan selalu menemui kesulitan, terutama bila meminta daerah-daerah hulu untuk melakukan investasi (seperti sarana retensi dataran tinggi dan pengelolaannya) untuk melindungi daerah-daerah hilir. Tanpa jaminan akan perlindungan ruang terbuka hijau yang masih tersisa dan fungsi retensi pada daerah cekungan Jabotabekpunjur, maka Jakarta masih akan terus menghadapi risiko banjir yang besar.

**... tetapi terdapat tindakan praktis yang dapat segera diambil untuk membantu meringankan dampak banjir untuk jangka pendek dan menengah**

Namun, suatu urutan intervensi yang teratur dapat mendukung pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan dalam menangani masalah-masalah tersebut. Prioritas pertama adalah memulihkan kembali infrastruktur yang ada, menangani kapasitas aliran dan retensi. Tahap kedua akan melibatkan peningkatan infrastruktur, terutama menyusun kembali sistem pengendalian banjir yang telah terpengaruh oleh penurunan permukaan air tanah dan penghubungan kanal-kanal banjir Timur dan Barat yang utama. Secara

<sup>20</sup> "Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia". Yusuf, A.A. dan H. Francisco, 2009. Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA). lihat: [http://web.idrc.ca/uploads/user-S/12324196651Mapping\\_Report.pdf](http://web.idrc.ca/uploads/user-S/12324196651Mapping_Report.pdf)

bersama-sama, harus dilakukan upaya untuk membangun kemufakatan dan tindakan multi-pemangku kepentingan mengenai masalah pengelolaan daerah hulu dan perlindungan daerah pantai, yang akan membutuhkan persiapan dan implementasi jangka panjang.

**Pengembalian sistem banjir ke rancangan dan kapasitas awalnya akan membawa dampak yang paling cepat dapat dirasakan...**

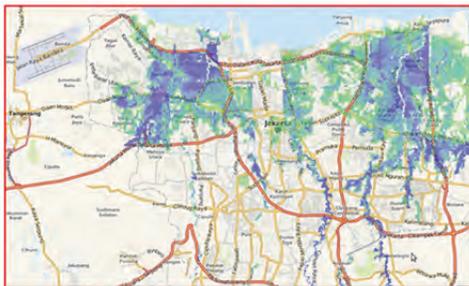
Berbagai penelitian model hidrolik secara bulat menyarankan bahwa upaya yang paling cepat membawa dampak mitigasi banjir adalah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan sistem ke rancangan awalnya. Simulasi yang menyeluruh atas banjir tahun 2007 meramalkan bahwa gangguan terhadap lebih dari satu juta jiwa, atau 40 persen dari dampak banjir tersebut, dapat dihindari bila sistem yang ada dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang dirancang sebelumnya (Gambar 32). Pengembalian sistem ke rancangan awalnya juga harus dilengkapi dengan penekanan yang kuat pada pemeliharaan rutin di masa depan dan mobilisasi masyarakat luas untuk memberikan bantuan tingkat rumah tangga dan komunitas untuk mitigasi bencana banjir.

**...sementara rekonfigurasi jaringan kanal utama pada lokasi-lokasi strategis memperkuat sistem untuk menanggung perubahan fisik dan urbanisasi**

Kanal banjir Timur yang baru diselesaikan menawarkan kemungkinan untuk mengalihkan kelebihan aliran air dari sungai utama Ciliwung. Pembangunan sistem pengalih untuk sungai Ciliwung pada pintu air pengendali utama di bagian selatan Jakarta dan lebih tinggi ke arah hulu, yang menghubungkan kanal banjir Timur dan Barat, dan peningkatan pada kanal-kanal yang berdampingan akan memberikan perlindungan tambahan kepada pusat kota yang padat penduduknya. Ditambah dengan normalisasi sistem yang ada ke rancangan awalnya, jumlah penduduk yang lolos dari pengaruh langsung peristiwa banjir tahun 2007 akan bertambah sebesar 600.000 orang lagi.

**Gambar 32: Banjir tahun 2007 akan lebih ringan bila sarana yang ada berfungsi sepenuhnya**

*(panil kiri: tingkat banjir sebenarnya. Panil kanan: simulasi tingkat banjir dengan sistem penanggulangan banjir yang beroperasi sepenuhnya)*



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (2012)



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (2012)

**Sementara itu, persiapan dan perencanaan kontinjensi secara sistematis dapat membantu meningkatkan ketahanan**

Walau dengan berbagai upaya yang direncanakan dan sedang dilakukan untuk memitigasi risiko banjir di Jakarta, risiko-risiko tersebut akan tetap mengancam kota Jakarta hingga waktu yang belum dapat diperkirakan. Perencanaan dan investasi kontinjensi untuk kesiapan menghadapi banjir merupakan hal penting untuk meningkatkan ketahanan kota dan penduduknya untuk mengatasi, menyesuaikan dan menyiapkan diri untuk menghadapi peristiwa banjir yang berulang, sehingga menurunkan kerawanan dari risiko-risiko tersebut.

**Alat-alat perencanaan kontinjensi yang mutakhir sedang disusun dan diluncurkan untuk membantu para perencana dan pengelola kota...**

Pada beberapa bulan terakhir alat perencanaan kontinjensi yang lebih mutakhir telah diluncurkan melalui prakarsa yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun alat praktis untuk mendukung perencanaan kontinjensi darurat dari Badan-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Suatu kemitraan antara BNPB, Badan Australia-Indonesia untuk Pengurangan Bencana (*Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction/AIFDR*) dan Badan Dunia untuk Pengurangan dan Pemulihan Bencana (*Global Facility for Disaster Reduction and Recovery/GFDRR*) telah mengembangkan suatu alat perencanaan kontinjensi yang didasarkan pada pemodelan dampak ancaman. Alat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih awal kepada para perencana tentang siapa yang akan terkena dampak dan apa yang akan mengalami kerusakan dalam hal terjadinya suatu peristiwa bencana alam tertentu. Alat ini, yang dinamai Penilaian Skenario Indonesia untuk Keadaan Darurat (*Indonesia*

...yang akan secara signifikan meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerawanan, jika diurusutamakan dan terus-menerus diperkaya dengan data yang akurat dan diperbaiki

Melalui kombinasi berbagai upaya yang berbeda tersebut ketahanan Jakarta terhadap risiko banjir dapat ditingkatkan, mendukung pembangunan ekonomi kota dan mata pencaharian penduduknya

*Scenario Assessment for Emergencies/InaSAFE*<sup>21</sup> – secara resmi diluncurkan pada Konferensi Kementerian Asia tentang Pengurangan Risiko Bencana ke-5 (5<sup>th</sup> Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction/AMCDRR) pada bulan Oktober 2012.

Dengan menjawab serangkaian pertanyaan tentang skenario potensi bencana, alat penyusunan pemodelan dampak ancaman InaSAFE dapat digunakan untuk membuat peta-peta dan laporan-laporan untuk memperkirakan potensi kerusakan yang menimpa penduduk maupun infrastruktur dan tindakan yang diusulkan bagi para pengelola keadaan darurat. Alat ini diuji pada musim banjir tahun 2011-2012 di Jakarta dan telah terbukti efektif dalam memberikan pemahaman atas dampak bahaya dan mengkomunikasikannya untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko bencana yang efektif. Alat-alat pemetaan partisipatif (seperti *OpenStreetMap*) juga telah digunakan untuk mengumpulkan data dasar (*baseline*) dengan tingkat rincian yang tinggi tentang infrastruktur-infrastruktur kritis di Jakarta melalui kolaborasi antara the Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta (BPBD), Tim Humanitarian *OpenStreet* (HOT) dan Universitas Indonesia, dengan dukungan dari sejumlah organisasi pembangunan internasional. Bersama-sama dengan data ancaman dari badan-badan teknis dan data demografis dari sensus nasional, digunakan untuk menghasilkan visualisasi dampak dari skenario-skenario banjir yang berbeda-beda terhadap infrastruktur yang kritis (seperti jalan, sekolah atau rumah sakit) dan penduduk pada daerah-daerah rawan banjir di seluruh Jakarta. Untuk skenario-skenario yang berbeda, alat ini menghitung jumlah bangunan atau daerah yang dapat mengalami kebanjiran, memberikan lokasi yang tepat dari daerah-daerah yang terdampak dan infrastruktur untuk mendukung perencanaan kontinjensi bencana. Juga dapat digunakan untuk mendukung perencanaan penggunaan lahan berbasis risiko, menentukan prioritas untuk penguatan infrastruktur, ramalan dampak secara waktu nyata (*real-time*), atau untuk Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA).

Dengan berlanjutnya upaya Jakarta dalam menangani mitigasi banjir melalui upaya struktural, seperti pengerukan sungai, perbaikan kanal dan pembangunan cekungan retensi, dan upaya non-struktural seperti rehabilitasi daerah resapan, persiapan komunitas dan rencana kontinjensi, maka kota Jakarta akan beradaptasi dengan lebih baik terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Sementara kaum miskin akan selalu menerima pengaruh secara tidak proporsional, mereka juga menunjukkan tingkat ketahanan yang paling tinggi, yang terutama karena keterpaksaan dan terbatasnya pilihan yang dapat diambil. Namun dengan semakin meningkatnya kesadaran akan risiko banjir, peringatan dini dan perkiraan, dan juga sosialisasi informasi banjir secara *real-time* termasuk melalui media sosial, seluruh penduduk Jakarta, baik secara perorangan, perusahaan atau badan pemerintahan, dapat menyesuaikan kehidupan mereka dan membuat perencanaan kontinjensi yang sesuai untuk menjamin keselamatan, kelangsungan usaha dan mengamankan mata pencaharian. Penduduk Jakarta telah menunjukkan kesabaran yang sangat tinggi dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah setiap hari. Dengan sedikit tambahan investasi untuk mitigasi banjir yang sistematis dan menyeluruh, dan suatu sistem kontinjensi dan sosialisasi informasi, Jakarta dapat tampil menjadi sebuah kota yang memiliki ketahanan terhadap banjir.

<sup>21</sup> Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.inasafe.org](http://www.inasafe.org)

## C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN



### 1. Keberhasilan Indonesia dalam rekonstruksi pasca bencana dan kesiagaan menghadapi bencana

**Pemerintah Indonesia dan mitranya mencatat keberhasilan besar dalam upaya rekonstruksi pasca-bencana alam di Aceh, Nias dan Jawa**

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi serangkaian bencana alam dengan korban dan kerugian yang besar baik nyawa, kerusakan bangunan dan infrastruktur, dan gangguan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mencatat keberhasilan yang besar dalam penanganan bencana-bencana tersebut, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kembali rumah-rumah, bangunan dan infrastruktur fisik, dan pemulihan mata pencaharian ekonomi. Pemerintah juga telah mengembangkan pendekatan-pendekatan dan model-model yang telah teruji yang dapat digunakan bila bencana alam terjadi kembali di masa depan, baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang menghadapi risiko bencana alam. Pencapaian tersebut diraih bersama-sama dengan para donor, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah propinsi dan lokal, dan komunitas yang terkena dampak bencana. Dua program multi-donor funds, *Multi Donor Fund for Aceh and Nias* (MDF) dan *Java Reconstruction Fund* (JRF), berkontribusi terhadap proses-proses tersebut. Menjelang berakhirnya program-program tersebut, bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang pengalaman dan pelajaran yang dapat dipetik bagi upaya pemulihan pasca-bencana dan untuk membangun ketahanan terhadap bencana alam, baik di Indonesia maupun negara lainnya di dunia.<sup>22</sup>

#### a. Tantangan yang dihadapi oleh bencana di Aceh, Nias dan Jawa belum pernah terjadi sebelumnya

**Serangkaian bencana alam akhir-akhir ini di Indonesia menyebabkan kerugian dan kerusakan besar di Aceh, Nias dan sebagian Jawa**

Gempa bumi dan tsunami yg terjadi pada bulan Desember 2004 menelan lebih dari 200.000 jiwa di Aceh dan Sumatra Utara dan menyebabkan 600.000 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Bencana itu juga menghancurkan infrastruktur, bangunan dan mengganggu jalannya ekonomi. Bencana ini diikuti dengan gempa bumi yang menghantam pulau Nias pada bulan Maret 2005, menghancurkan sekitar 30 persen dari seluruh bangunannya. Pada bulan Mei 2006, gempa bumi yang terjadi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah menelan lebih dari 5.700 jiwa; dan beberapa bulan kemudian terjadi gempa bumi yang lain yang menyebabkan tsunami yang menyebabkan kerusakan luas pada daerah pantai bagian selatan di Jawa Barat. Bencana berikutnya terjadi pada tahun 2010, ketika Gunung Merapi, gunung api yang terletak di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, meletus berkali-kali dan merusak perumahan dan infrastruktur.

**Sejumlah daerah yang terkena dampak memang sudah rapuh,**

Sejak tahun 1976, gerakan pemberontakan di Aceh telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia. Konflik itu membawa dampak yang sangat besar di Aceh. Jumlah

<sup>22</sup> Bagian ini disusun berdasarkan tulisan dan materi-materi lain yang disusun untuk konferensi internasional tentang "Lessons from Indonesia's Experiences in Disaster Reconstruction and Preparedness" yang diadakan di Jakarta pada bulan November 2012 untuk menandai penutupan MDF dan JRF. Lihat [www.multidonorfund.org](http://www.multidonorfund.org) dan [www.javareconstructionfund.org](http://www.javareconstructionfund.org) untuk informasi lebih lanjut.

**memperbesar dampak dari bencana-bencana tersebut**

korban mendekati 15.000 jiwa selama konflik. Propinsi Aceh menjadi terisolasi secara ekonomi karena konflik itu merintang investor dalam dan luar negeri, membatasi akses ke pasar dan meningkatkan biaya *input*. Pulau Nias yang terletak pada bagian pantai barat Sumatra Utara, juga terisolasi dengan infrastruktur yang buruk dan lemahnya keunggulan ekonomi. Letak pulau itu membuatnya tidak mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yang menyebabkan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

**Mengelola bantuan yang berlimpah menjadi tantangan dalam proses pemulihan**

Bantuan yang berlimpah datang dari dalam maupun luar negeri sebagai tanggapan dari bencana-bencana tersebut. Barang-barang kebutuhan, dana dan tenaga ahli dikerahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi. Jumlah bantuan dari Pemerintah Indonesia dan donor-donor internasional mencapai 6,7 miliar dolar AS bagi rekonstruksi Aceh dan Nias. Ratusan organisasi ikut serta di Aceh dan Nias. Sementara bantuan tersebut memang dibutuhkan dan disambut baik, mengelola sumber daya yang cukup besar membawa tantangan yang besar bagi pemerintah, yang memimpin upaya rekonstruksi. Penetapan strategi rekonstruksi yang jelas, mengarahkan sumber-sumber daya untuk mendukung proses rekonstruksi dan mengelola dana secara efisien dan transparan adalah hal-hal yang vital bagi upaya rekonstruksi secara keseluruhan. Mengkoordinasi para pelaku dalam jumlah besar di lapangan juga sangat penting untuk mencegah duplikasi dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien.

**b. Multi Donor Fund mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi yang dipimpin Pemerintah**

**Pemerintah Indonesia memimpin dan mengkoordinasikan proses pemulihan dan rekonstruksi di Aceh dan Nias dengan dukungan dari MDF**

Pemerintah Indonesia mengelola setiap tahapan proses pemberian bantuan dan pemulihan kembali. Menimbang besarnya skala bencana di Aceh dan Nias, Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias untuk mengelola dan mengkoordinasi proses tersebut sampai penutupannya di tahun 2009. Pemerintah juga meminta pembentukan suatu lembaga pengatur dana multi donor dengan Bank Dunia sebagai wali amanat untuk mendukung upaya rekonstruksi secara keseluruhan. Hal ini mendorong pembentukan MDF, yang mengumpulkan sumbangan hingga 655 juta dolar AS dari 15 donor, yang besarnya hampir mencapai 10 persen dari seluruh jumlah dana rekonstruksi.<sup>23</sup> Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan dana, memfokuskan sumber daya ke bagian yang paling membutuhkan sesuai dengan strategi pemerintah, dan memastikan bahwa dana akan digunakan secara transparan dan hemat biaya. Hal itu juga sejalan dengan Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan tahun 2005, yang meminta para pemerintah nasional untuk menyusun strategi pembangunan mereka sendiri yang kemudian didukung oleh para donor bagi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan jelas.

**Model MDF tersebut direplikasi dengan sukses di Jawa**

Sebagai tanggapan terhadap gempa bumi tahun 2006 di Pulau Jawa, dibentuk suatu Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan koordinasi awal hingga tahun 2008. Peran ini kemudian diambil alih oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan koordinasi bersama-sama pemerintah propinsi dan Kementerian/Lembaga. Tujuh donor membentuk JRF dengan menggunakan susunan pengelolaan inklusif seperti MDF, dan mengumpulkan dana sebesar 94,1 juta dolar AS.<sup>24</sup> Program tersebut diperluas pada tahun 2010 untuk menangani upaya rekonstruksi pasca meletusnya Merapi. Dengan telah beroperasinya MDF selama lebih dari satu tahun pada waktu terjadinya gempa bumi di Jawa, nilai model tersebut sebagai alat untuk mengelola bantuan untuk mendukung rekonstruksi telah terlihat dengan jelas.

**Multi Donor Fund membantu upaya rekonstruksi dengan memberikan kerangka bagi kemitraan yang dipimpin pemerintah...**

MDF dan JRF memberi kontribusi bagi upaya rekonstruksi dengan memberikan mekanisme pengaturan inklusif yang memberikan suatu landasan bagi pemerintah, para donor dan pemain-pemain utama untuk membicarakan berbagai masalah dan mengambil keputusan dengan cepat. Komite Pengarah yang berisi wakil-wakil dari Pemerintah Indonesia, Bank Dunia sebagai wali amanat, para donor dan pemangku kepentingan dari komunitas, menyusun suatu strategi, mengembangkan berbagai prosedur dan menetapkan dana bagi proyek-proyek yang diusulkan.

<sup>23</sup> Para donor MDF adalah Komisi Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Belgia, Finlandia, Asian Development Bank, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Irlandia.

<sup>24</sup> Para donor JRF adalah Komisi Eropa, Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark.

...dengan menggunakan pendekatan bertahap...

Untuk mendukung agenda rekonstruksi Pemerintah, program MDF menerapkan strategi dengan pendekatan bertahap untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang selamat yang terus berkembang selama proses rekonstruksi. Setelah kebutuhan-kebutuhan utama yang mendesak telah ditangani oleh Pemerintah, dukungan rekonstruksi difokuskan pada pembangunan rumah-rumah dan masyarakat. Selanjutnya fokusnya adalah pada infrastruktur utama untuk memulihkan jaringan transportasi, menjamin ketersediaan air bersih, keberadaan sanitasi dan pengelolaan limbah. Tahap ketiga MDF meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan jangka panjang dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi utama, seperti kopi, kakao, perikanan dan karet. Pendekatan ini mencerminkan dan memperkuat strategi pemerintah. Upaya rekonstruksi di Jawa juga menggunakan pendekatan ini, dengan memulai dari rekonstruksi perumahan sebelum memulihkan mata pencaharian.

...menekankan pada pembangunan berbasis masyarakat...

MDF menggunakan pendekatan rekonstruksi perumahan yang terbukti sangat efektif – yang melibatkan masyarakat setempat di dalam prosesnya, sejak perencanaan hingga pembangunan yang sesungguhnya. Di Aceh dan Nias, para pemimpin masyarakat dan kelompok memberikan masukan langsung pada seluruh tahapan proses. Dana hibah dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut memungkinkan mereka untuk membangun kembali ribuan rumah anti-gempa yang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah (lihat Kotak 6). Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam membangun infrastruktur lokal. Kelompok-kelompok masyarakat, termasuk para perempuan, membuat keputusan akan infrastruktur yang paling dibutuhkan dan membantu pembangunan kembali jalan-jalan, sumur dan jalur irigasi dan proyek-proyek lainnya, dan mengelola dana secara transparan. Pendekatan yang dipimpin oleh masyarakat ini secara sukses diulangi di Jawa, dan telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan oleh Pemerintah Indonesia bagi upaya rekonstruksi permukiman pasca-bencana di masa depan.

**Kotak 6: Rekompak – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas pasca bencana**

Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) adalah nama dari program berbasis komunitas bagi rekonstruksi perumahan dan infrastruktur lokal yang dipelopori di Aceh. Yang membedakan Rekompak dari proyek rekonstruksi pasca-bencana lainnya adalah pendekatannya, yang menempatkan tanggung jawab – dan pendanaan – untuk pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur setempat secara langsung di tangan komunitas, sehingga menjamin kepemilikan dan transparansi. Para anggota komunitas mengidentifikasi para penerima bantuan dan mengembangkan rencana tata ruang bagi setiap desa sebagai pedoman pembangunan kembali. Kelompok-kelompok beranggotakan sepuluh hingga 15 keluarga dibentuk untuk bertanggung jawab atas pembangunan kembali rumah mereka masing-masing. Kelompok-kelompok itu bertanggung jawab atas dana yang diberikan dan seluruh anggota kelompok memiliki peran dalam proses pembangunan kembali. Para fasilitator yang dilatih oleh Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan teknis kepada kelompok komunitas tentang metode pembangunan tahan gempa. Karena para penerima bantuan memberikan sebagian besar tenaga dan bahan-bahan yang didaur kembali, rumah-rumah Rekompak dapat menghemat biaya 30 persen lebih rendah dibanding bila dibangun oleh kontraktor, dan juga memberikan rasa puas yang tinggi. Model Rekompak itu kemudian juga digunakan di Pulau Jawa pasca gempa bumi tahun 2006 dan meletusnya Gunung Merapi. Secara bersama-sama, Rekompak membangun 35.000 rumah berkualitas tinggi dan lebih dari 10.000 proyek infrastruktur lokal dan menciptakan model rekonstruksi komunitas pasca-bencana yang dapat digunakan kembali yang dapat diterapkan di dalam maupun luar negeri.

...dan menggunakan unsur lintas sektor untuk menghasilkan upaya pemulihan berkelanjutan yang menyeluruh

Sejumlah unsur-unsur penting dirancang di dalam seluruh proyek-proyek MDF dan JRF, untuk meningkatkan kualitas rekonstruksi (Gambar 33). Termasuk di dalamnya adalah penurunan risiko bencana, yang memastikan bahwa konstruksi yang baru akan tahan terhadap gempa, dan melatih penduduk, termasuk anak usia sekolah, sehingga mereka akan tahu bagaimana bertindak bila terjadi bencana. Unsur kunci lainnya adalah keterlibatan gender, yang memberikan suara kepada kaum perempuan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan komunitas mereka. Perlindungan lingkungan adalah unsur lain yang penting. Mantan pejuang dan pembalak liar dilatih untuk melindungi daerah hutan, dan tempat pembuangan akhir

yang modern dibangun untuk pengelolaan limbah yang aman. Pembangunan kapasitas mendukung seluruh investasi itu dengan memberikan pengetahuan dasar dan peningkatan ketrampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengelola infrastruktur, meningkatkan manajemen dan produktivitas kepada individu dan lembaga-lembaga.

Gambar 33: Kerangka strategis bagi rekonstruksi bencana yang efektif



Sumber: Sekertariat MDF, Bank Dunia

c. Menerapkan pelajaran yang dipetik Indonesia dalam pemulihan pasca bencana

Pengalaman yang dipetik oleh Indonesia selama dekade yang lalu telah menghasilkan pengetahuan penting tentang pemulihan pasca-bencana

Selama periode delapan tahun sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah menanggapi serangkaian bencana alam termasuk gempa bumi dan tsunami, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Pemerintah berhasil menerapkan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari satu bencana ke bencana berikutnya. Melalui cara itu, Pemerintah membangun pengetahuan yang berkaitan dengan tanggap bencana dan persiapannya. Pengalamannya dengan MDF dan JRF memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk menggunakan kembali dan meningkatkan model-model dan pendekatan-pendekatan terhadap tanggap bencana dan persiapan menghadapinya. Dalam prosesnya, Indonesia kini berada dalam posisi yang baik untuk memberikan kontribusi kepada pengetahuan dunia tentang hal-hal tersebut, sehingga negara lain juga dapat memetik manfaat dari pelajaran-pelajaran dan pengalaman tersebut untuk penanggulangan bencana yang akan datang secara lebih baik dan mengurangi dampaknya.

Pengalaman itu juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perencanaan dan tanggap bencana, termasuk pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana...

Setelah melalui bencana alam di Aceh, Nias dan Jawa, Pemerintah Indonesia menempatkan sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan pengelolaan, persiapan dan tanggap bencana alam. Pada tahun 2008 dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perannya termasuk merumuskan kebijakan penanggulangan bencana, koordinasi tanggapan pemerintah terhadap bencana, kesiapan menghadapi bencana, dan memberikan informasi yang relevan tentang bencana. Badan itu bekerja pada tingkat nasional dan daerah. BNPB mengkoordinasikan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010-2014, yang melibatkan sejumlah komponen yang diambil dari MDF dan JRF, termasuk penyertaan penurunan risiko bencana di dalam program-program pembangunan, pembangunan kapasitas, manajemen bencana berbasis komunitas dan meningkatkan peran mitra-mitra pemerintah.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. *Rencana Penanggulangan Bencana / 2010-2014*, pp. 80-83. <http://www.bnpb.go.id/website/asp/content.asp?id=22>

**...dan Dana  
Penanggulangan  
Bencana Indonesia**

Pada tahun 2010, Pemerintah juga menetapkan Dana Penanggulangan Bencana (DPB) Indonesia. DPB dibentuk untuk mendanai dan mengkoordinasikan upaya pemulihan dan persiapan bencana dengan dukungan dunia internasional. Dana perwalian donor ini bekerja melalui dua jendela, satu yang dikelola oleh Bank Dunia dan yang lain oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. DPB juga menyertakan sejumlah fasilitas yang sebelumnya mencatat keberhasilan melalui MDF dan JRF, termasuk penyesuaian dengan strategi pemerintah, komite pengarah, komite teknis, dan bidang-bidang fokus, yang termasuk perumahan, mata pencaharian dan pembangunan kapasitas.

**Sejumlah pelajaran utama  
termasuk bahwa upaya-  
upaya rekonstruksi akan  
memperoleh manfaat dari  
kerangka strategi yang  
menyeluruh...**

Sejumlah pelajaran penting untuk upaya rekonstruksi juga dapat dipetik dari pengalaman Indonesia. dalam hal strategi secara keseluruhan, suatu kerangka rekonstruksi yang berdasar kepada tiga strategi yang saling berkaitan, yaitu kemitraan yang kuat, implementasi yang efektif dan unsur-unsur lintas sektoral, telah menunjukkan keberhasilannya. Struktur organisasi yang menyeluruh, seperti yang diberikan oleh MDF dan JRF, memungkinkan pemerintah dan para mitranya untuk mengambil keputusan program yang efektif, merancang proyek yang sesuai dan pelaksanaan proyek tersebut secara efisien. Selain itu, gabungan antara mitra dan pelaksana memberikan kompetensi inti dan keunggulan komparatif dalam menghadapi kebutuhan yang sangat bervariasi. Bagi dukungan donor, sangatlah penting untuk memiliki monitoring dan evaluasi yang kuat, pelaporan yang teratur, komunikasi yang jelas dan manajemen dana yang baik untuk memastikan bahwa setiap proyek telah mendukung strategi rekonstruksi Pemerintah.

**... pembangunan yang  
dipimpin oleh komunitas  
berhasil...**

Bukti-bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang didorong oleh komunitas dapat disesuaikan secara efektif bagi rekonstruksi pasca-bencana untuk memberikan pemulihan tingkat lokal yang hemat biaya, adil merata dan berkelanjutan. Seperti dibahas pada Kotak 6 tentang program Rekompak, pengalaman proyek-proyek pemulihan komunitas yang diterapkan menurut MDF dan JRF menunjukkan bahwa komunitas yang terkena bencana mampu untuk mengelola sumber daya rekonstruksi dan proyek-proyek dengan kualitas dan tingkat kepuasan yang tinggi dan memetik manfaat dari peningkatan rasa percaya diri dan kapasitas yang berasal dari pendekatan konsultatif dan partisipatif. Pada saat yang bersamaan, pendekatan yang didorong oleh komunitas mendorong pemulihan sosial yang lebih cepat dan membangun kapasitas yang bertahan lama, jauh melampaui masa rekonstruksi.

**...pembangunan  
kapasitas harus menjadi  
bagian integral bagi hasil-  
hasil yang  
berkelanjutan...**

Pembangunan kapasitas terbukti menjadi hal yang sangat penting di dalam keberlanjutan investasi yang dibuat dalam pemberian layanan dan pembangunan ekonomi. Strategi-strategi pembangunan kapasitas mulai dari pemberdayaan komunitas untuk turut serta di dalam pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur komunitas demi penguatan ketrampilan dan sistem pemerintah daerah untuk mengelola aset-aset rekonstruksi, hingga pengembangan organisasi untuk pemerintah daerah untuk penanganan manajemen sektor publik yang lebih baik. Pembangunan kapasitas terbukti menjadi paling efektif ketika disertakan ke setiap prakarsa program dan proyek sejak awal, dengan rancangan dan intensitas yang mencerminkan tantangan keberlanjutan dan strategi akhir dari para pelaku yang memberikan dukungan.

**...rekonstruksi  
infrastruktur pasca-  
bencana akan lebih baik  
melalui pendekatan yang  
bertahap...**

Pengalaman di Aceh dan Nias menunjukkan bahwa pendekatan pentahapan terhadap investasi infrastruktur, dan bagi keseluruhan rekonstruksi, berdasarkan pada penyeimbangan antara kebutuhan yang mendesak dan permintaan akan kualitas dan kepemilikan, dapat menjadi sangat efektif dalam mengelola harapan jangka pendek sementara memberikan hasil yang bertahan lama. Sebagai contoh, investasi infrastruktur awal MDF memfokuskan kepada kebutuhan logistik yang mendesak untuk memulihkan jaringan transportasi dan memberikan akses kepada daerah-daerah yang terkena dampak. Setelah hal itu dilakukan, MDF mengalihkan perhatiannya kepada rekonstruksi infrastruktur berskala besar. Investasi pada infrastruktur yang besar memiliki persyaratan kepemilikan dan kualitas yang sangat penting yang dapat mengalahkan pertimbangan kecepatan, dan kebutuhan akan tingkat kecermatan yang harus digunakan untuk mengimbangi faktor biaya kecepatan dibanding biaya penundaan. Setelah itu, cakupan pekerjaan diperluas untuk memberikan pelatihan kepada badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset yang baru dibentuk.

**...dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meningkatkan hasil-hasil**

Pelajaran penting lain yang dapat dipetik dari pengalaman MDF dan JRF adalah bahwa dukungan kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam upaya rekonstruksi mendorong hasil-hasil yang lebih baik dan ketahanan yang lebih tinggi. Partisipasi perempuan meningkatkan kualitas, efisiensi biaya dan rasa kepuasan, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Perempuan memperoleh manfaat dari hak kepemilikan tanah dan hukum yang lebih kuat, yang pada gilirannya memberikan akses kredit yang lebih baik kepada para usahawati. Keterlibatan mereka yang aktif di dalam proses pengambilan keputusan setempat meningkatkan kohesi sosial dan hasil-hasil, seperti peningkatan dalam pemberian barang-barang publik seperti air, sanitasi dan klinik kesehatan.

**Pengetahuan yang berharga yang dipetik dari pengalaman Indonesia dalam rekonstruksi dan persiapan bencana menjadi sumbangan kepada komunitas global...**

Seperti disinggung sebelumnya, pengalaman dari hampir delapan tahun menanggapi serangkaian bencana, dan menerapkan pelajaran-pelajaran yang dipetik, telah memberikan pengalaman dan pemahaman yang ekstensif kepada pemerintah Indonesia di dalam penanggulangan bencana. Sebagian besar darinya telah disertakan di dalam kebijakan-kebijakan dan badan-badan pemerintahan yang baru dibentuk, seperti BNPB, dan di dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Pusat Penelitian Tsunami di Banda Aceh. Negara-negara lain, termasuk Haiti dan Pakistan, telah mempelajari metode tanggap bencana Indonesia dalam merancang strategi-strategi pasca-bencana mereka. Indonesia, yang menerima banyak bantuan dan dukungan internasional setelah tertimpa bencana, kini dapat memberikan imbal balik kepada komunitas global dalam bentuk pelajaran untuk masa yang akan datang.

**...termasuk melalui acara berbagi pengalaman lintas negara-negara yang rawan bencana...**

Pada bulan November 2012, penutupan MDF dan JRF ditandai dengan konferensi internasional di Jakarta tentang "Mengangkat Pembelajaran dari Pengalaman Indonesia dalam Persiapan dan Pemulihan Bencana" yang saling membagikan pengalaman dunia dalam persiapan dan rekonstruksi pasca-bencana. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari 500 peserta termasuk tokoh-tokoh penting dari negara-negara rawan bencana seperti Jepang, Pakistan dan Haiti. Konferensi itu mencakup banyak aspek tentang persiapan dan rekonstruksi pasca-bencana, termasuk pendekatan yang dipimpin oleh komunitas dalam rekonstruksi perumahan, pemulihan mata pencaharian pasca-bencana, pembangunan gender dan kapasitas, pengarusutamaan penurunan risiko bencana, dan saling berbagi pengetahuan.

**...dengan maksud untuk memberikan warisan bagi peningkatan lebih lanjut dalam penanggulangan, ketahanan dan kesiapan menghadapi bencana yang akan datang**

Indonesia telah menetapkan standar baru untuk penanggulangan bencana lewat pengalamannya di Aceh, Nias dan Jawa. Hal ini sangatlah penting bagi negara yang secara geografis, akan kembali menghadapi bencana alam. Namun keberhasilan pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap kesiapan dan penanggulangan bencana alam akan menyelamatkan jumlah jiwa yang tidak terhitung di masa depan. Pendekatannya telah terbukti dan telah berhasil dilakukan kembali untuk menangani jenis bencana alam yang berlainan dan konteks yang berbeda. Sebagai kontributor yang signifikan terhadap hasil rekonstruksi, program-program MDF dan JRF telah mendokumentasikan model-model, pendekatan dan pengalaman-pengalamannya. Pelajaran yang dipetik oleh Indonesia melalui upaya pemulihan pasca-bencanaskala besar akan memastikan bahwa warisan akan peningkatan kesiapan, penanggulangan dan ketahanan akan terus berlanjut ke masa yang akan datang.

## 2. Infrastruktur desa untuk penyediaan layanan dasar

Tren positif dalam perkembangan sosial ekonomi dalam dekade terakhir di Indonesiamenyimpan ketidakmerataan antar daerah yang besar yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur dalam pelayanan dasar

Sejak memasuki milenium yang baru, pendapatan riil penduduk Indonesia meningkat dengan cepat dan kokoh sementara kemajuan yang mantap menuju pencapaian *Millennium Development Goal* terus tercatat. Akan tetapi tren dan angka rata-rata secara nasional menyembunyikan gambaran daerah yang lebih merisaukan: masing-masing propinsi, kabupaten dan desa tidak mencatat kemajuan yang sama. Walaupun ada banyak faktor dibalik ketidakmerataan distribusi ini, tantangan yang tidak dapat dihindari terkait peningkatan kinerja diseluruh wilayah Indonesia terletak pada ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur (*human and physical capital*) untuk pelayanan dasar. Menggunakan hasil Sensus Infrastruktur Desa (SID) bagian ini menyoroti beberapa kesenjangan spasial dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur diseluruh wilayah dan membahas bagaimana data rinci yang baru ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan kedepan untuk menangani kesenjangan kemajuan ini.

### a. Apakah Sensus Infrastruktur Desa dan Mengapa Diperlukan?

SID memberikan informasi/wawasan mengenai transfer sumber daya yang lebih merata, tepat sasaran, dan lebih rasional dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah...

Sensus Infrastruktur Desa (SID) yang baru dilakukan atas permintaan Kantor Wakil Presiden untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan dikembangkan bersama-sama dengan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PSF)<sup>26</sup> Bank Dunia dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyajikan besaran dan bentuk permasalahan dalam hal kemampuan memberikan pelayanan-pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi di berbagai desa. SID digunakan oleh TNP2K dan Pemerintah Indonesia sebagai langkah awal untuk memperbaiki ketidakmerataan kemajuan pembangunan. Analisa SID dapat digunakan sebagai informasi dalam penyusunan sebuah perencanaan yang mengalokasikan sumber daya lebih merata; untuk memperbaiki penetapan sasaran prioritas belanja pembangunan; dan secara potensial membuka jalan menuju sistem transfer sumber daya yang lebih rasional (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sehingga tercapai kesesuaian yang lebih baik antara kebutuhan dan kapasitas. Gambaran kesiapan pelayanan dasar daerah-daerah di Indonesia yang diambil dari SID juga dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan yang masih tersisa pada bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi, dan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut.

...mengumpulkan informasi yang lebih rinci ditingkat penyedia fasilitas ...

SID memberikan informasi tingkat fasilitas yang mendetil dari sarana-sarana pendidikan dan kesehatan umum, yang mencakup 166.506 fasilitas kesehatan dan 164.561 sekolah diseluruh negeri. Informasi dari pencatatan Potensi Desa (PODES) tahun 2011 (yang juga merupakan sensus desa ke desa) melengkapi data SID dengan memberikan pengamatan atas kuantitas dan kualitas transportasi di dalam desa dan antar desa dan jumlah pemberi layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil kombinasi data tersebut menghasilkan informasi mendalam tentang kuantitas, kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta berbasis layanan umum yang ada.

...dan menilai kelemahan sisi penawaran untuk menghitung biaya perbaikannya

Menggabungkan dengan beragam analisa dan laporan lebih lanjut, dipimpin bersama oleh Kantor TNP2K dan PSF, informasi ini memberikan penilaian yang menyeluruh tentang ketersediaan sarana dan pelayanan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi di daerah. *Database* tersebut cukup kaya dalam menunjukkan nuansa tentang "kesiapan sisi penawaran" melalui penyusunan indeks-indeks yang menggabungkan sejumlah indikator yang berbeda-beda dari modal fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyediaan pelayanan tersebut. Indikator-indikator yang dimasukkan ke dalam indeks-indeks kesiapan penawaran tersedia pada tingkat desa, yang memberikan gambaran yang sangat rinci dan memungkinkan penyampaian usulan kebijakan yang disesuaikan dengan beragam tingkatan pemilahan daerah.

<sup>26</sup> Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PSF) dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan didukung oleh hibah kumpulan donor yang disediakan oleh Pemerintah Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Amerika, dan Uni Eropa. Hibah ini dikelola oleh Bank Duna. Laporan akhir SID tersedia baik di situs web TNP2K maupun PSF pada awal Februari 2013. Untuk lebih lanjut lihat di <http://pnpm-support.org/>.

b. SID menggabungkan beragam indikator untuk menghasilkan indeks kesiapan sisi penawaran (*supply readiness indices*)

SID memberikan informasi tentang kuantitas dan kualitas tiga kelompok layanan dasar...

Indikator-indikator yang disertakan dalam indeks-indeks kesiapan sisi penawaran berdasarkan SID tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, menurut informasi yang diberikan yaitu mengenai ketersediaan dan kemudahan mendapatkan fasilitas pelayanan, keberadaan dan kualifikasi personil, dan karakteristik fisik dari fasilitas yang ada. **Error! Reference source not found.** memberikan rincian lebih lanjut tentang beberapa indikator di sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi. Sebagai aturan umum, indikator-indikator kesiapan pelayanan yang terpilih memiliki nilai antara 0 dan 1, yang mencerminkan proporsi penduduk, fasilitas atau daerah geografis yang memenuhi batas atau standar kesiapan pelayanan.

**Tabel 7: Indeks gabungan Kesiapan Sisi Penawaran termasuk beragam indikator Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi (indikator-indikator yang disertakan di dalam indeks gabungan)**

a. Indikator Kesiapan Sisi Penawaran untuk Kesehatan

Indikator	Uraian
Akses ke Kesehatan Dasar	Proporsi penduduk yang dengan mudah dapat mengunjungi poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau praktik dokter
Akses ke Kesehatan Sekunder	Proporsi penduduk yang dengan mudah dapat mengunjungi rumah sakit
Akses ke Fasilitas Persalinan	Proporsi penduduk yang dengan mudah dapat mengunjungi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, Polindes atau praktik bidan
Dokter di Puskesmas	Proporsi Puskesmas yang memiliki sekurangnya satu orang dokter
Bidan di Desa	Proporsi penduduk yang tinggal di desa yang memiliki bidan
Pasokan air Puskesmas	Proporsi Puskesmas dengan instalasi air di dalam kompleks atau dalam jangkauan berjalan kaki selama 10 menit
Tenaga listrik	Proporsi sarana kesehatan yang menggunakan tenaga listrik (tidak termasuk Posyandu)

b. Indikator Kesiapan Faktor Penawaran untuk Pendidikan

Indikator	Uraian
Akses ke PAUD	Proporsi penduduk yang tinggal di desa dengan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak dalam jarak 1 km dari desa
Akses ke SMP	Proporsi penduduk di desa dengan SMP dalam jarak 6 (3) km
Kualifikasi Guru SD	Proporsi SD dengan setidaknya 2 guru dengan gelar S1
Kualifikasi Guru SMP	Rata-rata proporsi guru SMP dengan gelar S1
Laboratorium di SMP	Proporsi SMP yang memiliki laboratorium
Pasokan Air	Proporsi sekolah dimana air tersedia di kamar mandi murid
Tenaga listrik	Proporsi sekolah yang mempunyai akses terhadap listrik

c. Indikator Kesiapan Faktor Penawaran untuk Transportasi

Indikator	Uraian
Permukaan Jalan Utama	Proporsi desa yang mempunyai jalan utama dengan permukaan aspal/beton atau batu/kerikil dll.
Kondisi: Jalan Utama	Proporsi desa dengan jalan utama tanpa atau sedikit kerusakan
Kondisi Jembatan	Proporsi desa dengan jembatan tanpa atau sedikit kerusakan
Kebutuhan Jembatan Baru	Proporsi desa yang melaporkan tidak adanya permintaan jembatan (baru)
Transportasi Umum ke Camat	Proporsi desa yang mempunyai transportasi umum dengan trayek tetap ke kantor kecamatan
Transportasi Umum ke Bupati/ Walikota	Proporsi desa yang mempunyai transportasi umum dengan trayek tetap ke kantor kabupaten/kotamadya

...dan indeks gabungan menyatukan informasi tersebut untuk memberikan gambaran "sekilas" ketersediaan

Indeks-indeks yang disusun dari indikator-indikator tersebut mampu menyerap sejumlah besar informasi yang terkandung di dalam SID – di dalam tiap-tiap variabel terdapat rincian dari berbagai aspek pelayanan – dan menyatukannya ke dalam ringkasan indikator yang memudahkan pemahaman terhadap keadaan secara keseluruhan (lihat Kotak 7) untuk rincian lebih lanjut akan penyusunan indeks). Penyusunan indeks di dalam laporan SID juga mempertahankan rincian data SID dan PODES dan dengan demikian, indeks-indeks tersebut dapat memberikan ringkasan "singkat" sampai ke tingkat kecamatan bagi penyusun kebijakan pada tingkat kabupaten.

**Kotak 7: Catatan tentang keandalan Peringkat Kesiapan Sisi Penawaran**

Dalam penyusunan indikator-indikator yang menggabungkan sejumlah pengamatan yang terpisah, namun tidak sepenuhnya independen, variabel-variabel yang terbentuk seringkali merupakan nilai pendekatan (proxy) dan tidak jarang diukur dalam satuan yang berbeda sering terdapat keraguan bahwa sistem dengan bobot eksplisit maupun implisit – atau proporsi dari sebuah variabel yang menentukan nilai akhir indeks – yang mendampingi kombinasi tersebut dapat merugikan di satu atau daerah lainnya dan keliru dalam menunjukkan distribusi kinerja yang sesungguhnya.

Di dalam analisis yang mendampingi SID, diusulkan enam skema pembobotan yang berbeda untuk menggabungkan variabel-variabel yang menjadi dasar pembentukan suatu indeks gabungan. Tiga skema pembobotan dipilih untuk mewakili (1) penekanan pada akses, (2) bobot yang setara untuk masing-masing tiga kelompok (ketersediaan dan aksesibilitas sarana; keberadaan dan kualifikasi personil; dan karakteristik fisik fasilitas/sarana), dan (3) bobot yang setara untuk setiap indikator. Tiga skema pembobotan yang lain, diturunkan secara empiris melalui (4) analisis komponen utama, (5) regresi OLS dari pemanfaatan seluruh tujuh indikator, dan (6) pengukuran kontribusi dari masing-masing tujuh indikator terhadap ketidakmerataan (diukur oleh suatu indeks konsentrasi) di dalam pemanfaatan layanan.

Masing-masing dari enam aturan pembobotan itu memiliki manfaat tersendiri, tetapi yang lebih penting adalah bahwa peringkat dan posisi relatif dari kecamatan atau kabupaten tidak bergantung kepada jenis skema pembobotan yang digunakan. Dengan kata lain, korelasi antara enam indeks yang berbeda yang berasal dari enam skema pembobotan bersifat positif dan mendekati angka satu, yang menunjukkan bahwa informasi yang terkandung pada tujuh indikator tersebut menyampaikan cerita yang konsisten tanpa bergantung kepada bagaimana mereka dikombinasikan. Sebagai contoh, untuk sektor kesehatan korelasi *pairwise* antara indeks gabungan yang dihitung dengan menggunakan ke enam metode tersebut berkisar 0.92 sampai 1.00.

Selanjutnya, hasil terperinci tentang nilai informasi yang terkandung di dalam SID tersedia dalam korelasi spasial yang tinggi dan positif antar indeks. Bagi kesehatan, pendidikan dan transportasi, terdapat pola spasial pada tingkat kesiapan penyampaian layanan di dalam dimensi-dimensi sektoral yang berbeda. Korelasi positif juga terlihat lintas indikator infrastruktur kesehatan, pendidikan dan transportasi.

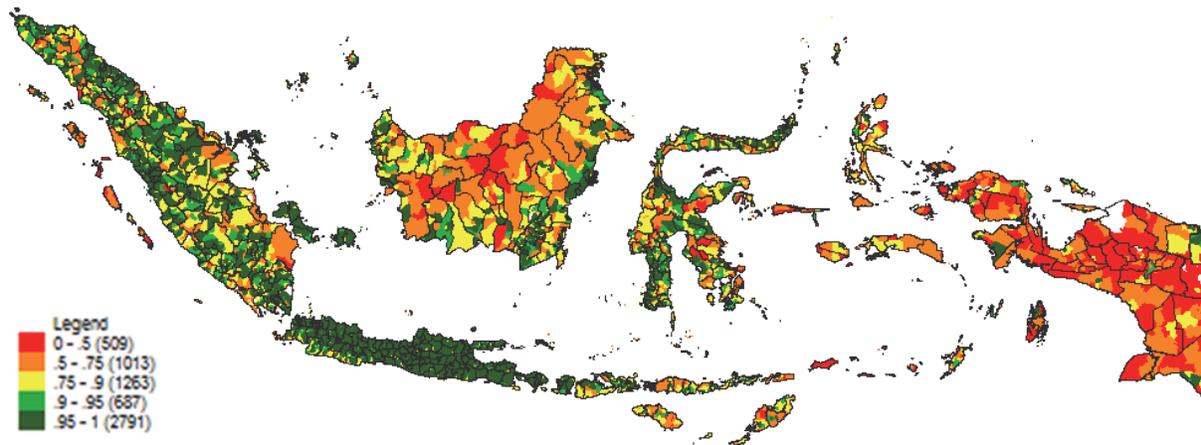
Dua skema pembobotan terakhir – kontribusi ketidakmerataan dan OLS – menggabungkan informasi SID dengan survei rumah tangga yang dilaksanakan secara independen (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ Susenas). Penambahan sumber data independen ini memberikan pemeriksaan keandalan terhadap kualitas data PODES itu sendiri. Karena indikator-indikator kesiapan pelayanan PODES/SID berkorelasi dengan (dan menjelaskan sejumlah variasi di dalam) pemanfaatan layanan yang serupa seperti yang diukur oleh wawancara rumah tangga yang independen, maka terdapat dasar yang kuat untuk menganggap bahwa pengukuran SID seperti yang disusun merupakan representasi yang memadai bagi pelayanan yang sesungguhnya.

**c. Kesiapan Pelayanan Kesehatan yang tertinggi berada di Jawa dan Bali**

**Kesiapan pelayanan kesehatan mencatat keberagaman yang sangat besar dan umumnya menurun sesuai besarnya jarak dari Jawa dan Bali**

Data SID menunjukkan sangat besarnya variasi di dalam pelayanan kesehatan lintas propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa ke desa. Dengan menggunakan pengelompokan kepulauan yang umum dan siap digunakan, Gambar 34 menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan di Bali (0,99 dari 1,0) dan Jawa (0,96) mencatat taraf kesiapan pelayanan kesehatan yang sangat tinggi; kecamatan-kecamatan di Sumatra (0,87), Sulawesi (0,82), Kalimantan (0,80) dan NTT & NTB (0,77) mencatat angka rata-rata; sementara Molukas (0,68) dan terutama Papua dan Papua Barat (0,42) nyata-nyata tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Kesenjangan nasional antara kecamatan kota (0,96) dan desa (0,75) dalam hal penyampaian dan kualitas layanan dasar berjumlah cukup besar; pada tingkat wilayah, dikotomi perkotaan-pedesaan terlihat paling jelas pada daerah-daerah dengan kesiapan penyampaian infrastruktur yang rendah secara keseluruhan. Sebagai contoh, di Sulawesi dan Kalimantan, daerah-daerah perkotaan secara jelas merupakan pemberi pelayanan yang jauh lebih dapat diandalkan dibanding daerah pedesaan pedalaman; dan bahkan daerah *perkotaan* sekalipun di Papua memiliki risiko yang sangat tinggi tidak tersedianya layanan kesehatan; sementara daerah-daerah *pedesaan* utama saja di Jawa dan Bali menikmati tingkat kesiapan pelayanan kesehatan yang sangat tinggi.

**Gambar 34: Kesiapan Pelayanan Kesehatan lebih tinggi di Jawa dan Bali dan rendah di bagian timur Indonesia (indeks gabungan kesiapan penyediaan layanan kesehatan)**



Catatan : Indeks berkisar 0 sampai 1 dimana nilai semakin besar berarti semakin tinggi kesiapan pelayannya  
Sumber: PODES 2011 dan Laporan dan Sensus Infrastruktur Desa

**Laporan SID menghitung investasi yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan dalam kesiapan pelayanan.**

Analisis SID mengandung suatu “kesenjangan” dalam perhitungan – atau jarak dari setiap indikator ke nilai maksimumnya – untuk menghitung investasi minimum yang dibutuhkan untuk mencapai batas standar pelayanan kesehatan dasar diseluruh Indonesia. Tabel 8 di bawah ini memberikan suatu ikhtisar dari jumlah kesenjangan nasional, yang didefinisikan sebagai jumlah kesenjangan kecamatan, bagi indikator-indikator kesiapan pelayanan kesehatan yang terpilih. Temuan yang menarik menunjukkan bahwa hingga 15 persen penduduk Indonesia (sekitar 36 juta warga negara) tidak memiliki akses ke fasilitas atau layanan kesehatan sekunder, sehingga pada dasarnya mereka tidak memiliki alternatif apapun bila layanan kesehatan dasar tidak mampu atau tidak memiliki peralatan untuk menangani keadaan mereka. Suatu investasi terpadu multi-tahun (tahun jamak) dalam permodalan fisik dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan sekunder tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk menutup kesenjangan ini dan memberikan sistem pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan dapat diandalkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sangatlah penting bagi tahap berikut dari rencana jaminan kesehatan universal Indonesia seperti tercakup di dalam rencana SJSN dan aturan perundangan yang berkaitan.

**Tabel 8: Beberapa Kesenjangan pada Kesiapan Pelayanan Kesehatan sangat mengejutkan, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan sekunder (ringkasan kesenjangan dalam kesiapan pelayanan kesehatan untuk beberapa indikator)**

Indikator dan Kesenjangan yang Berkaitan	Jumlah Kesenjangan Nasional
Jumlah warga negara tanpa akses: kesehatan dasar	6,2 juta
Jumlah kecamatan tanpa Puskesmas	383
Jumlah warga negara tanpa akses: kesehatan sekunder	36 juta
Jumlah kabupaten tanpa rumah sakit	42
Jumlah warga negara tanpa akses: sarana persalinan	6,8 juta
Jumlah kecamatan tanpa sarana persalinan	222
Jumlah Puskesmas tanpa dokter	732 (8% dari seluruh Puskemas)
Jumlah desa tanpa bidan	14.842 (penduduk: 12 juta)
Jumlah Puskesmas tanpa instalasi air	852 (9% dari seluruh Puskemas)
Jumlah fasilitas kesehatan tanpa listrik	10.629 (14% dari seluruh fasilitas kesehatan)

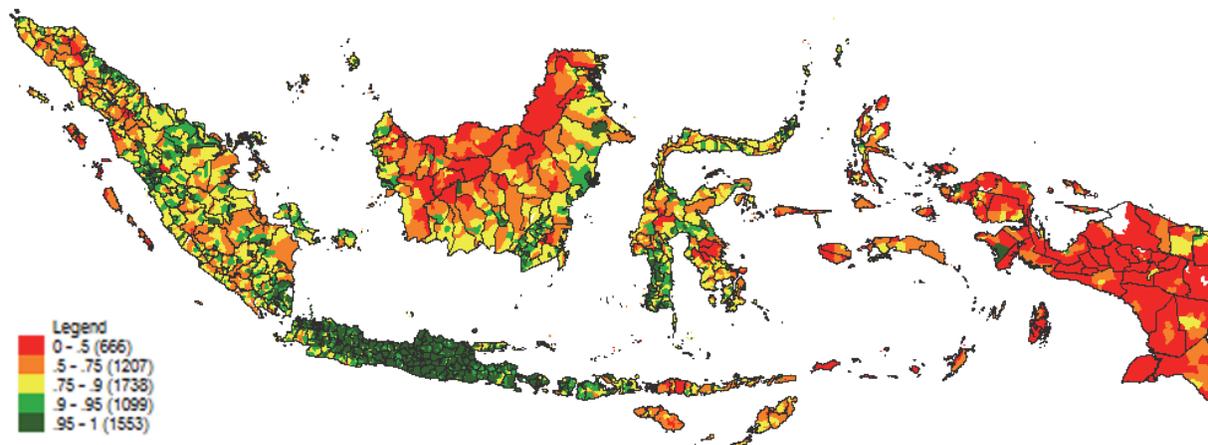
Sumber: PODES 2011 dan Laporan dan Sensus Infrastruktur Desa.

d. ...pola yang sama nampak pada Kesiapan Pelayanan di bidang Pendidikan

Seperti pada kesehatan, kesiapan pelayanan pendidikan jauh lebih rendah di Indonesia Timur...

Data SID menunjukkan bahwa pola wilayah dalam kesiapan pelayanan pendidikan mirip seperti pada bidang kesehatan, dengan kecamatan-kecamatan di Bali (0,96) dan Jawa (0,94) menunjukkan tingkatan yang tertinggi; Sulawesi (0,81), Sumatra (0,80), Kalimantan (0,74), dan NTT & NTB (0,72) berada di tengah-tengah distribusi; sementara Molukas (0,60) dan terutama Papua dan Papua Barat (0,30) tertinggal jauh di belakang. Kesenjangan secara keseluruhan antara kecamatan yang berada di perkotaan (0,93) dan pedesaan (0,70) sekali lagi berjumlah cukup besar. Di sini, dikotomi perkotaan-pedesaan menunjukkan terdapat empat profil pelayanan yang berbeda yang umum dijumpai di Indonesia: profil Jawa/Bali, dengan pelayanan yang relatif baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan; profil Molukas/Papua, dengan pelayanan yang jelas kurang bagi daerah perkotaan maupun pedesaan, dan daerah-daerah lain di Indonesia, dengan daerah perkotaan memiliki keunggulan yang relatif lebih besar dibanding daerah pedesaan.

**Gambar 35: Pola spasial untuk Kesiapan Pelayanan di bidang Pendidikan sama dengan bidang Kesehatan indeks gabungan kesiapan pelayanan pendidikan)**



Catatan : Indeks berkisar 0 sampai 1 dimana nilai semakin besar berarti semakin tinggi kesiapan pelayanannya  
Sumber: PODES 2011 dan Laporan dan Sensus Infrastruktur Desa.

... sementara SID menunjukkan walaupun ketersediaan secara fisik sudah memadai, kualitasnya masih rendah.

Tabel 9 di bawah merupakan ikhtisar dari jumlah kesenjangan nasional dalam kesiapan pelayanan pendidikan. Walaupun Indonesia telah mencapai akses yang hampir menyeluruh kepada, dan diperkirakan telah menyeluruh dalam hal partisipasi sekolah bagi, pendidikan dasar, analisis kesenjangan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 16 juta warga negara yang tidak memiliki akses kepada layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lebih dari 9 juta tidak akan mendapatkan akses kepada sekolah menengah pertama. Selain itu, banyak sekolah akan memperoleh manfaat dari peningkatan modal, pemeliharaan dan modernisasi: antara 13 dan 36 persen dari seluruh sekolah umum tidak memiliki fasilitas modern seperti tenaga listrik, air atau laboratorium ilmu pengetahuan atau ketrampilan. Ukuran dan distribusi kesenjangan tampaknya menghambat pemenuhan hak seluruh warga negara Indonesia untuk pendidikan dasar seperti yang tercantum di dalam UUD, sementara juga menunjukkan tantangan jangka pendek dan menengah yang signifikan bagi para murid yang telah turut serta: sistem pendidikan modern yang menghasilkan lulusan dengan pengalaman, ketrampilan dan motivasi yang dibutuhkan untuk menjadi angkatan kerja yang memiliki sifat kewirausahaan, kreatif dan mudah ditempatkan tampaknya akan sulit dicapai tanpa upaya-upaya berkelanjutan.

**Tabel 9: Kesenjangan Kesiapan Pelayanan Pendidikan indeks menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan kualitas fisik layanan**

*(Ringkasan kesenjangan dalam Kesiapan Pelayanan Pendidikan untuk beberapa indikator)*

Indikator dan Kesenjangan yang Berkaitan	Jumlah Kesenjangan Nasional
Jumlah warga negara tanpa akses PAUD	16,6 juta
Jumlah desa tanpa PAUD	19.052
Jumlah warga negara tanpa akses: SMP	9,5 juta
Jumlah kecamatan tanpa SMP	230
Jumlah guru S1 yang dibutuhkan: SD	32.586
Jumlah guru S1 yang dibutuhkan: SMP	14.675
Jumlah SMP tanpa laboratorium	8.000 (36% dari seluruh SMP)
Jumlah sekolah umum tanpa tenaga listrik	21.653 (13% dari seluruh sekolah umum)
Jumlah sekolah umum tanpa air di kamar mandi	30.207 (18% dari seluruh sekolah umum)

Sumber dan catatan: Indikator Pembangunan Dunia

e. ...dan keduanya berkorelasi kuat dengan Kesiapan Pelayanan di bidang Transportasi

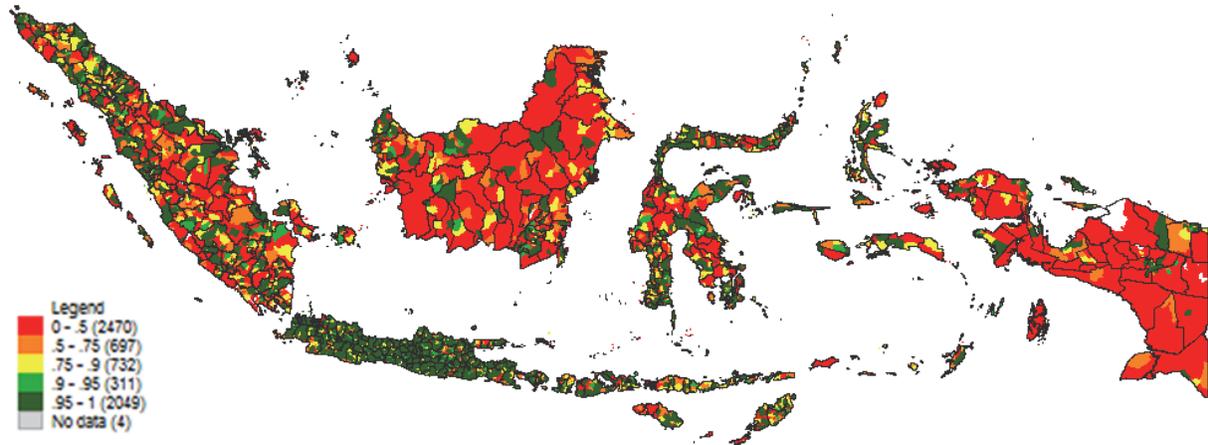
**Pola kesiapan pelayanan transportasi sejalan dengan pola yang dijumpai pada bidang kesehatan dan pendidikan.**

Pola kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi tampaknya mempertajam kelemahan-kelemahan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Gambar 36 di bawah meringkas ketersediaan transportasi umum dan menunjukkan bahwa pada daerah-daerah dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang buruk, para rumah tangga dan kelompok masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan rendah biaya untuk mencapai daerah-daerah sekitar di mana mungkin terdapat pelayanan yang lebih dapat diandalkan atau akses kepada pusat administrasi untuk melaporkan gangguan pelayanan atau melakukan lobi untuk mendapat layanan yang lebih baik. Laporan SID dapat menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif yang jelas antara indikator-indikator transportasi dan indikator-indikator untuk ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Petunjuk akan adanya faktor penentu yang sama untuk investasi infrastruktur (lintas sektor) menunjukkan bahwa penanganan kesenjangan individual manapun atau menggunakan pendekatan satu demi satu mungkin tidak cukup banyak mengubah keseluruhan lingkungan penyampaian layanan publik yang dihadapi oleh rumah tangga dan kalangan masyarakat.

**Indeks gabungan antara kesehatan, pendidikan dan transportasi menunjukkan pola yang sama dengan sub-indeksnya...**

Laporan SID menggabungkan indeks-indeks kesehatan dan pendidikan menjadi suatu indeks meta berukuran besar yang berdasarkan atas 14 sub-indikator (tidak diperlihatkan di sini). Kesimpulan yang ditarik dari indeks yang lebih besar ini serupa dalam kualitas hingga kesimpulan dari sub-sub-indeks: secara umum, pulau Jawa dan Bali memiliki kinerja terbaik dalam kualitas maupun kuantitas infrastruktur yang tersedia. Akan tetapi, kebutuhan dalam negeri bagi investasi masih tetap ada, terutama pada propinsi Jawa Barat dan Banten (lihat di bawah). Secara keseluruhan, kesenjangan terbesar dalam kesiapan pelayanan infrastruktur dijumpai di wilayah Papua, kepulauan Maluku, NTT dan juga bagian pedalaman pulau Kalimantan.

**Gambar 36: Daerah dengan Kesiapan Pelayanan yang rendah untuk Kesehatan dan Pendidikan cenderung mempunyai akses transportasi umum yang buruk (proporsi desa yang memiliki transportasi umum ke kantor Bupati atau Walikota)**



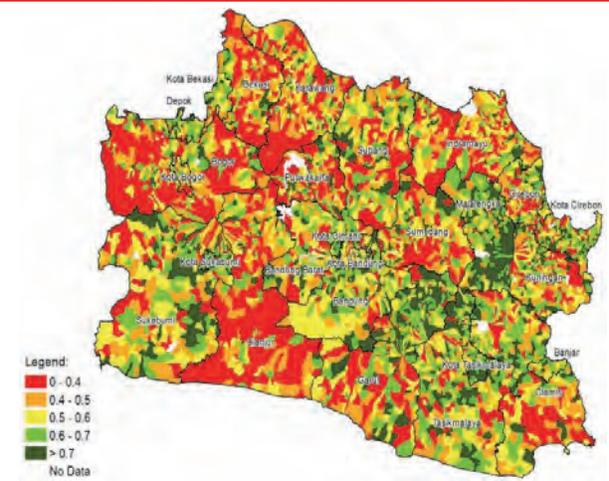
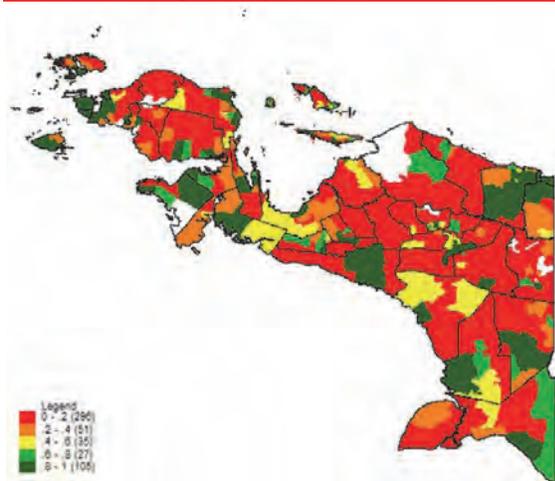
Sumber dan catatan: PODES 2011 dan Laporan dan Sensus Infrastruktur Desa.

**SID memungkinkan pemeriksaan indikator atau komponen hingga sampai ke tingkat desa.**

Tingkat detail SID yang sangat tinggi memungkinkan penyusun kebijakan pada tingkat manapun untuk membuat rencana belanja pembangunan berdasar tujuan setempat yang sesuai atau dalam kaitannya dengan tujuan nasional. Sebagai contoh, Gambar 37 di bawah menunjukkan bahwa tidak dijumpai sinyal telepon selular (ponsel) apapun pada sekitar setengah kecamatan yang ada di propinsi Papua. Indikator ini – yang terdapat pada pangkalan data PODES dan dapat digunakan bersama data SID – menunjukkan bahwa solusi berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TKI) untuk meningkatkan penyampaian layanan dapat kurang efektif di Indonesia Timur dan propinsi-propinsi Papua. Gambar 38, yang menunjukkan ringkasan desa-per-desa dari kualitas guru sekolah dasar di propinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa suatu unit pendidikan dasar dapat memiliki kualitas dan efektivitas yang sangat berbeda, bahkan di dalam suatu kecamatan. Kedua indikator dan kedua detil informasi tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan “sama untuk semua” tidak akan efektif pada propinsi atau kabupaten dibanding bagi negara Indonesia secara keseluruhan.

**Gambar 37: Setengah kecamatan di Papua tidak memiliki sinyal ponsel (proporsi penduduk dengan sinyal ponsel di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tingkat rincian kecamatan)**

**Gambar 38: Kualitas guru SD dapat bervariasi cukup besar bahkan didalam kecamatan (proporsi Guru SD dengan Sarjana S1 di Propinsi Jawa Barat – tingkat rincian desa)**



Sumber dan catatan: PODES 2011 dan Laporan dan Sensus Infrastruktur Desa.

## f. Perluasan dan Aplikasi Kebijakan

Rincian SID tingkat desa yang digabungkan dengan tingkat agregat berguna bagi perencanaan pembangunan pro-miskin di seluruh sektor dan pada semua tingkatan...

Penggerak utama di belakang SID (dan laporan yang berkaitan) adalah kebutuhan bagi strategi yang lebih banyak dan lebih baik untuk pendanaan, pengelolaan dan penetapan sasaran pada program “Klaster 2” Pemerintah Indonesia atau program-program pembangunan yang didorong oleh masyarakat (yang lebih banyak dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri). Sebagai contoh, untuk dana hibah yang diberikan melalui persaingan dan dikelola oleh masyarakat yang disampaikan melalui program PNPM, data SID dapat digunakan untuk menemukan dan memprioritaskan daerah-daerah yang akan memperoleh manfaat dari bagian dana hibah yang lebih besar atau dari kelayakan dan penerima dari lebih dari satu dana hibah PNPM. Karena dana hibah PNPM memiliki tingkat penggunaan paling tinggi oleh masyarakat untuk meningkatkan dasar aset infrastruktur – jalan, irigasi, bangunan drainase, sarana air bersih dll. – pemberian pendanaan ekstra melalui PNPM bagi daerah-daerah yang menghadapi kesenjangan ketersediaan pelayanan dapat memberikan dampak yang cukup berarti, walau mungkin hanya bersifat sementara. Penyusun kebijakan yang terlibat di dalam Prakarsa PNPM-Generasi – sejenis PNPM yang memiliki sasaran daerah-daerah paling miskin dengan dana hibah yang terkait dengan layanan kesehatan dan pendidikan – memanfaatkan pangkalan data SID untuk menentukan daerah-daerah yang akan menerima dana hibah Generasi pada tahap peningkatannya pada tahun 2013-2015.

...dan ketersediannya di publik berarti bahwa SID dapat digunakan oleh siapapun untuk menentukan tolok ukur kinerja daerah

Tingkat rincian SID berarti bahwa dengan potensi penggunaan apapun – seperti menggunakan SID untuk melakukan revisi belanja sumber daya masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas atau meningkatkan penetapan sasaran prakarsa pembangunan yang diprioritaskan pada sektor manapun – dapat dilakukan pada tingkat daerah manapun dan oleh otoritas maupun politisi manapun yang memiliki motivasi dimanapun ia berada. Pengembangan SID juga mendukung analisis berbasis bukti tersebut dengan kaitannya kepada perbandingan lokal, wilayah atau bahkan tingkat nasional, sehingga pengguna manapun akan dapat menentukan kinerja wilayahnya dibanding seluruh tolok ukur dan standar yang relevan. Dengan mendukung penyusunan pangkalan data dan alat yang berlaku di seluruh Indonesia, TNP2K dan Pemerintah Indonesia telah memberikan layanan umum yang signifikan; dengan terus mendukung penyampaian SID dan penggunaannya di luar dindingnya sendiri, TNP2K akan bertanggung jawab untuk memberikan salah satu dari metodologi-metodologi terkini, mudah digunakan dan tersedia secara luas yang pertama bagi kebijakan pro-kemiskinan bagi seluruh wilayah dan seluruh sektor yang tertarik kepada proses-proses dan *output* yang berdasarkan bukti.

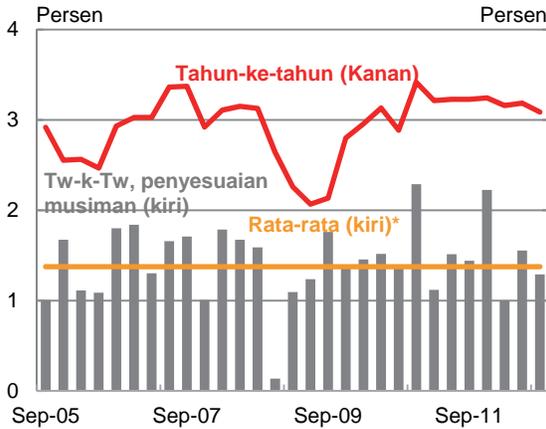
Perluasan dari SID, untuk menghubungkannya dengan hambatan isolasi daerah dan faktor multi-dimensi kemiskinan, sedang dalam proses pengerjaan yang selanjutnya memberikan informasi bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang

Beberapa perluasan analisis SID, yang sedang dikembangkan oleh tim Monitoring dan Evaluasi (M&E) dalam PNPM Support Facility (PSF), dapat memberikan wawasan tambahan ke dalam dimensi lain dari penyediaan layanan. Perluasan pertama bertujuan untuk menunjukkan tingkat isolasi relatif untuk memberikan berbagai informasi yang relevan untuk strategi pencapaian target belanja publik yang lebih baik berbasis bukti empiris. Seperti peta di atas menunjukkan, banyak pasokan-kekurangan daerah yang baik dikelilingi oleh daerah miskin atau terletak cukup jauh dari wilayah terdekat berikutnya dengan kinerja yang baik. Isolasi tersebut dapat menghambat kemajuan daerah sendiri karena tidak mungkin ada contoh untuk belajar dari daerah tetangga berkinerja tinggi dalam menyerap migran internal.

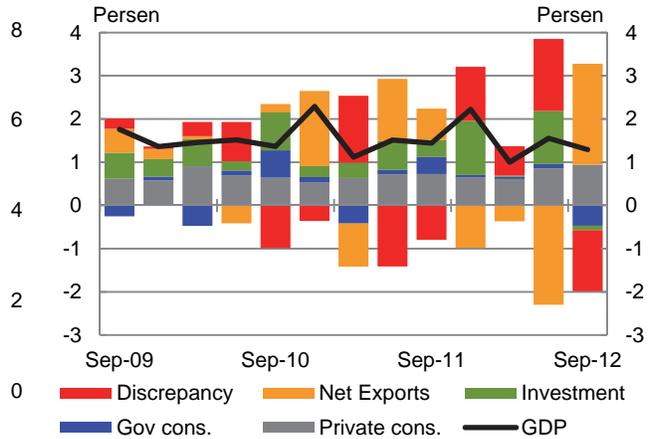
Perluasan kedua adalah untuk menghubungkan SID dengan data multi-dimensi kemiskinan (MDP). Karena data SID dikumpulkan oleh BPS yang secara teratur dihasilkan (PODES desa sensus, yang diproduksi setiap 3 tahun), database SID mudah untuk digabungkan dengan dataset BPS lainnya seperti Sensus Penduduk 2010 dan survei rumah tangga Susenas kuartalan untuk melihat kesejahteraan sosial ekonomi. Data MDP menangkap pengeluaran dan hasil dalam rumah tangga dan sehingga, ia menyediakan data dari sisi permintaan untuk informasi sisi penawaran yang terkandung dalam SID. Menggabungkan dua database tersebut memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk melihat perekonomian dan seluruh pelayanan dasar di satu tempat, memfasilitasi analisis untuk menemukan daerah di mana sisi permintaan melebihi harapan meskipun ada hambatan di sisi penawaran, serta faktor penentuannya.

## LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan (pertumbuhan PDB riil, persen)



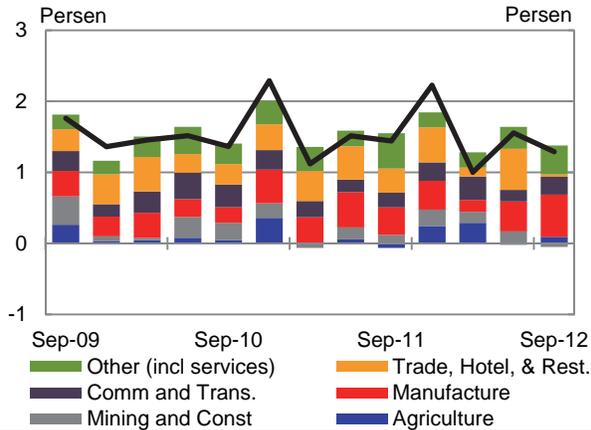
Lampiran gambar 2: Kontribusi pengeluaran terhadap PDB (kontribusi pertumbuhan trimulan-ke-triwulan riil PDB, penyesuaian musiman, persen)



\*Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw pada Q3 2005-Q3 2012  
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

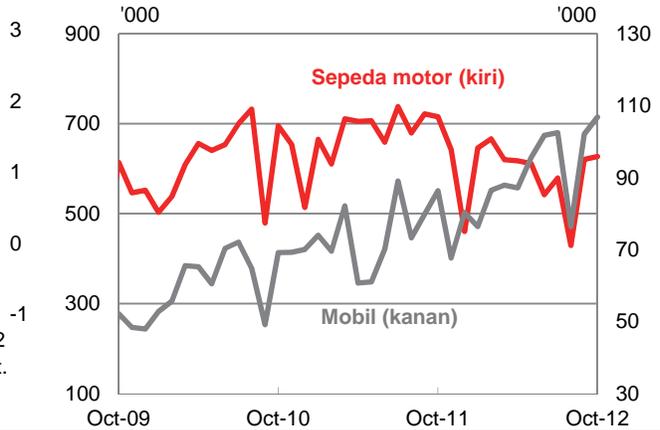
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran gambar 3: Kontribusi sektor terhadap PDB (pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, penyesuaian musiman)



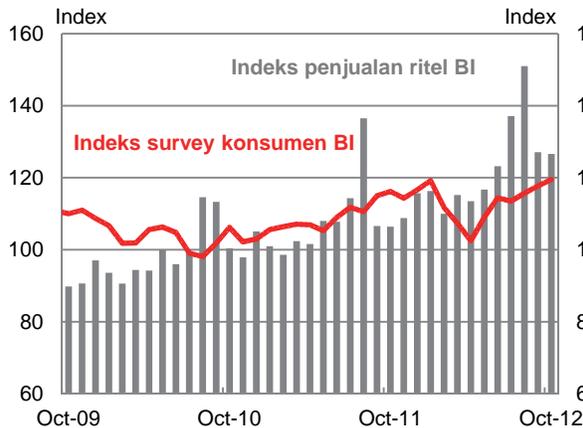
Sumber: BPS melalui CEIC

Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil (bulanan, unit)



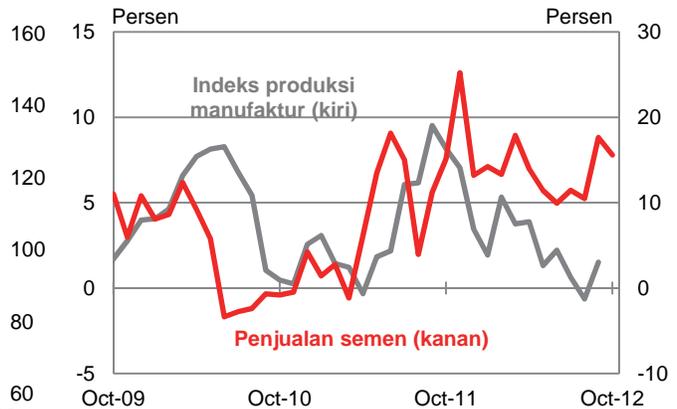
Sumber: CEIC

Lampiran gambar 5: Indikator konsumen (indeks)



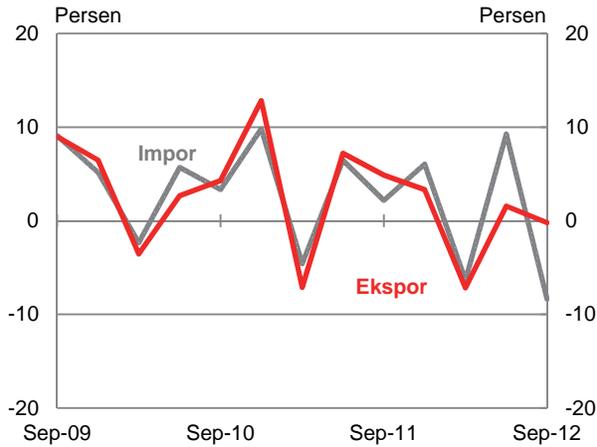
Sumber: BI via CEIC

Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri (rata-rata 3 bulanan, pertumbuhan tahun-ke-tahun)



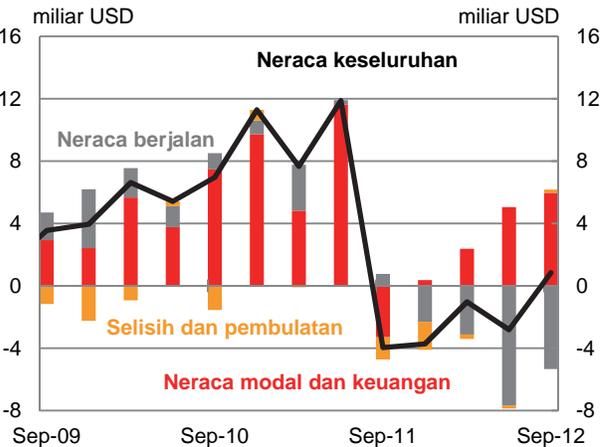
Sumber: CEIC

Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil  
(pertumbuhan trimulanan-ke-triwulanan)



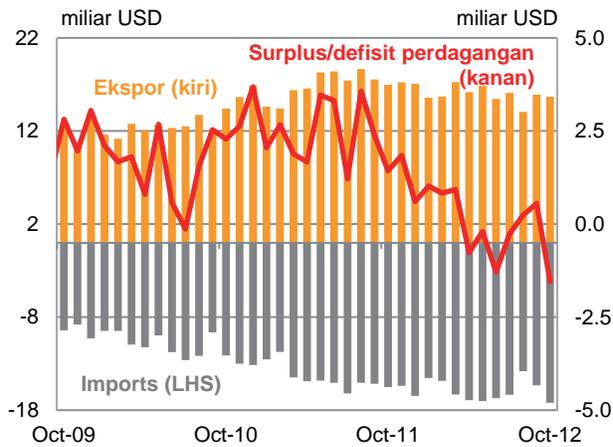
Sumber: BPS (Neraca Nasional) dan Bank Dunia

Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran  
(miliar USD)



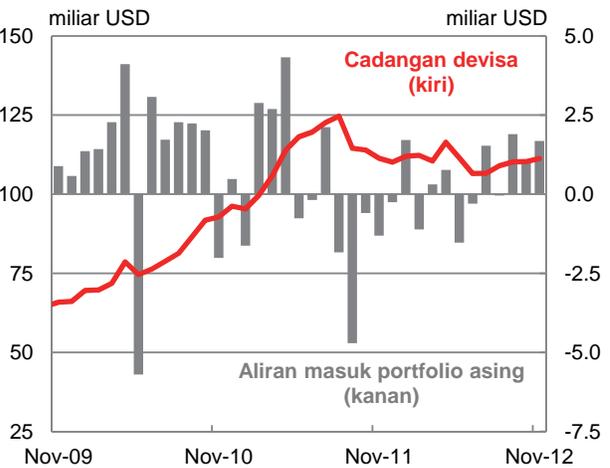
Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan  
(miliar USD)



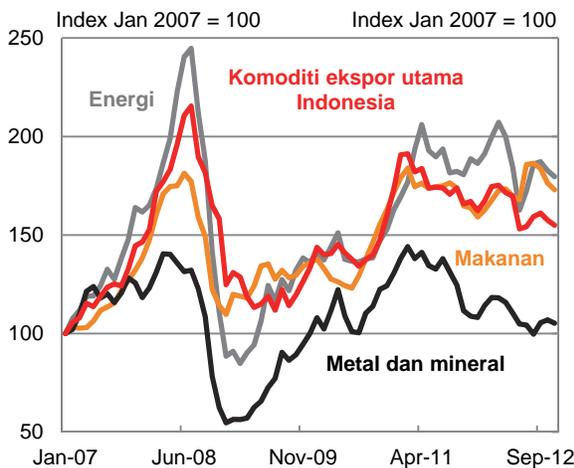
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing  
(miliar USD)



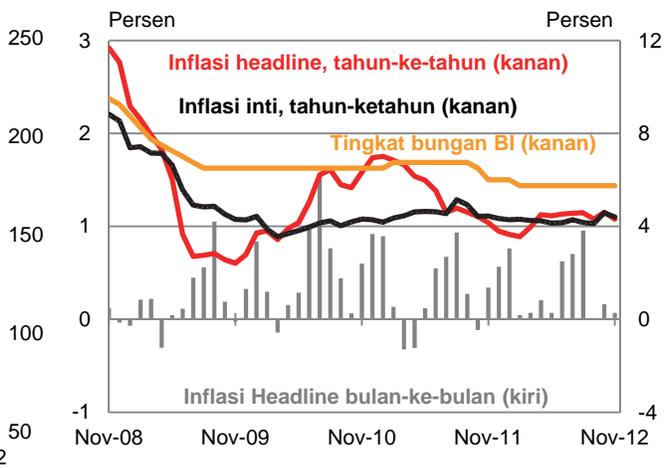
Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 11: Indeks harga komoditas terpilih  
(indeks 2007=100)



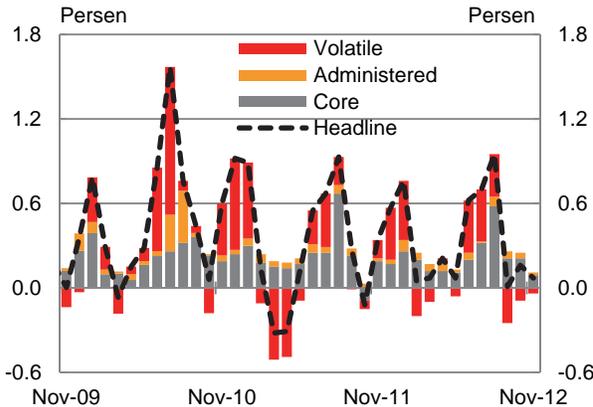
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Lampiran gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter  
(pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)



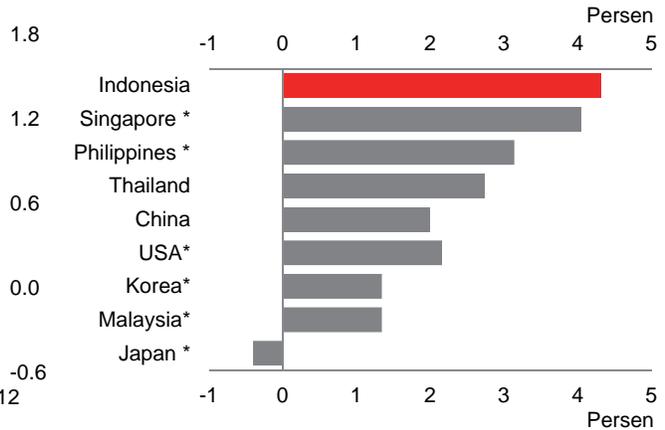
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Lampiran gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen  
(persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)



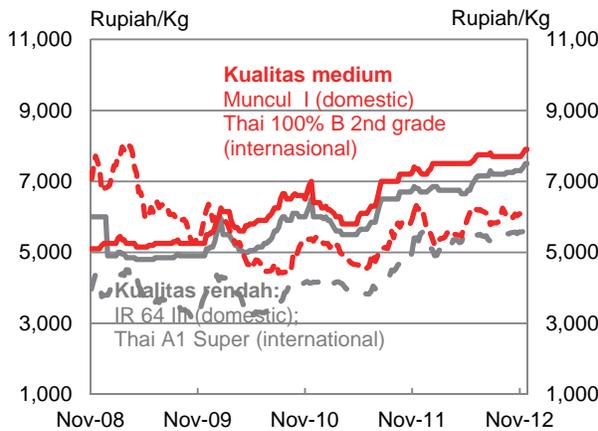
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Lampiran gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga  
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, Juni 2012)



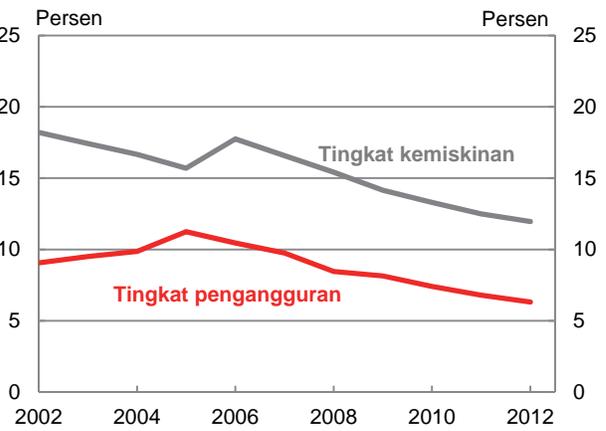
\*Oktober merupakan data terkini  
Sumber: Nasional statistik melalui CEIC, dan BPS

Lampiran gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional  
(Rupiah per kg)



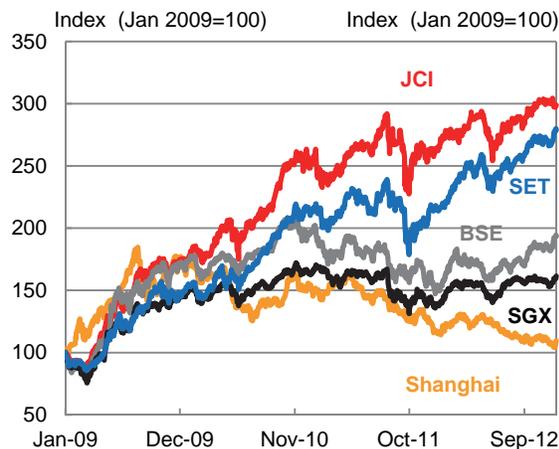
Note: Titik-titik adalah harga beras Thailand (cif)  
Garis adalah harga beras domestic tingkat grosir  
Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia

Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(data tahunan, persen)



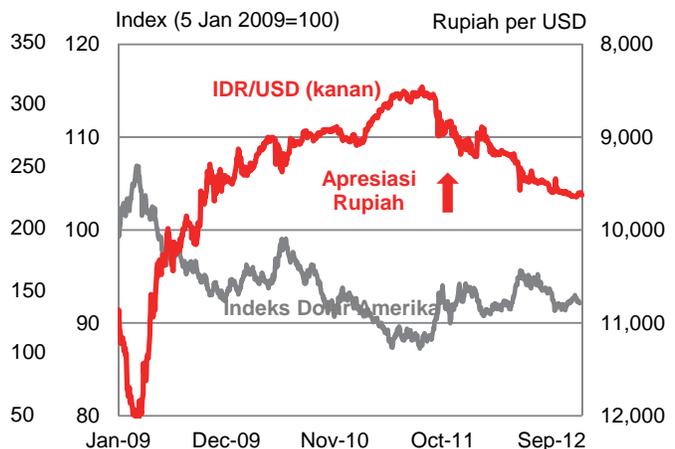
Note: Data tenaga kerja dari Sakernas Agustus  
Sumber: BPS, dan Bank Dunia

Lampiran gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian)



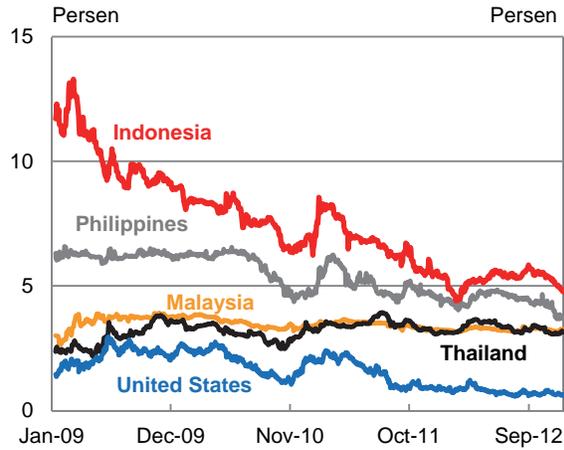
Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar Amerika dan rupiah  
(indeks dan tingkat harga harian)



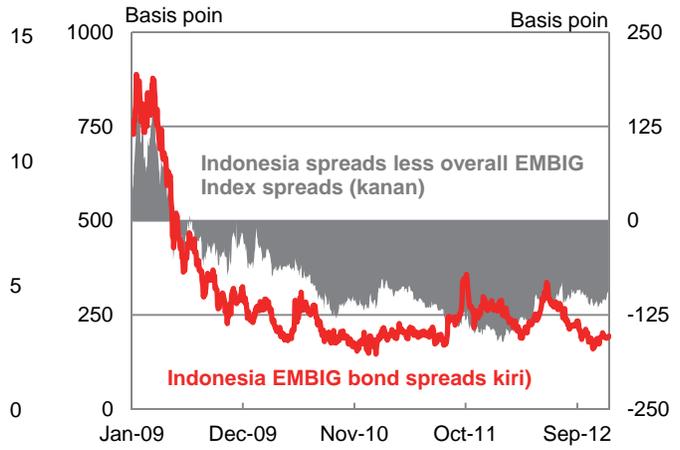
Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Lampiran gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal (persen, harian)



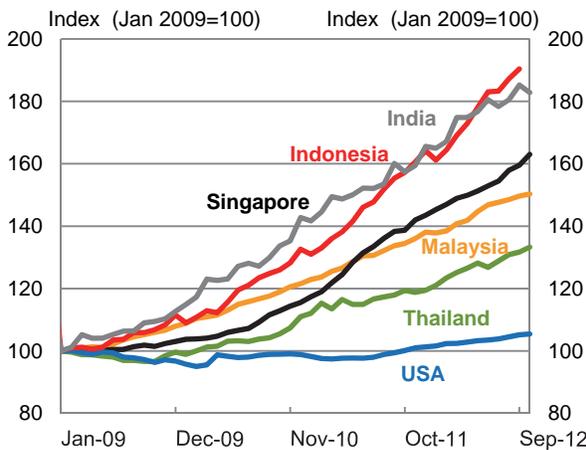
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Lampiran gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika (basis poin, harian)



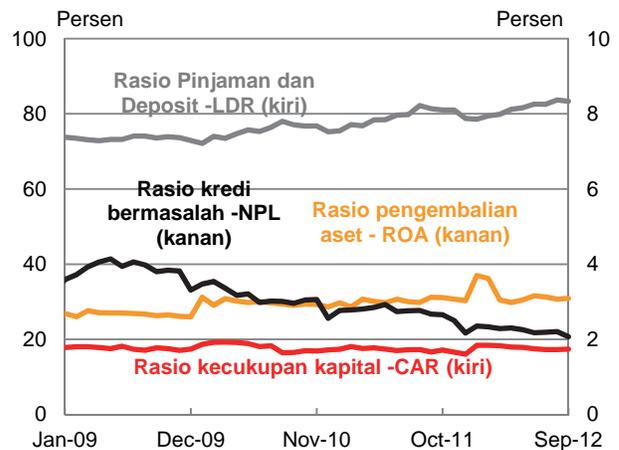
Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum (indeks, bulan Januari 2008=100)



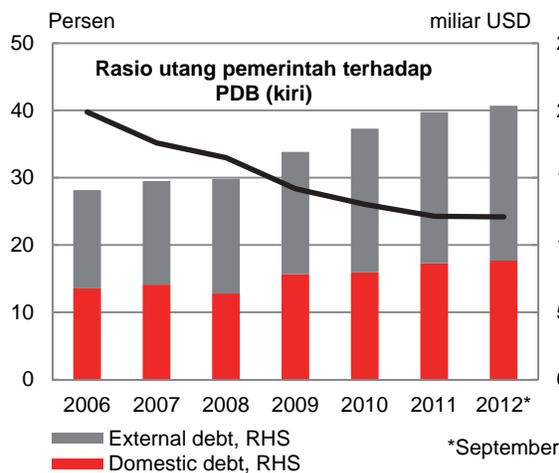
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan (bulanan, persen)



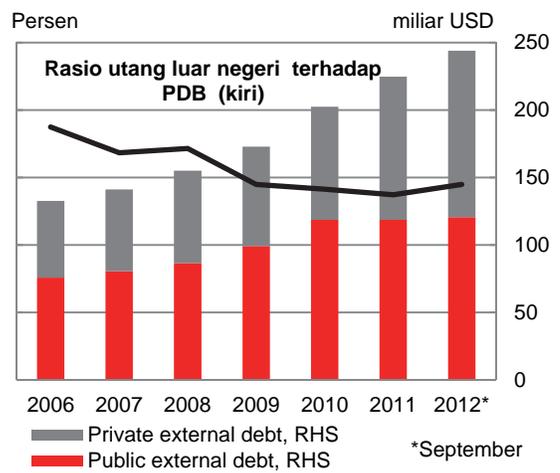
Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 23: Utang pemerintah (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 24: Utang luar negeri (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah  
(triliun Rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2012 (p)	2013
	Outcome	Outcome	Outcome	Budget Revision	MoF Semester I projections	Budget
<b>A. State revenue and grants</b>	<b>849</b>	<b>995</b>	<b>1.211</b>	<b>1.358</b>	<b>1.362</b>	<b>1.530</b>
1. Tax revenue	620	723	874	1.016	1.017	1,193
2. Non-tax revenue	227	269	331	341	345	332
<b>B. Expenditure</b>	<b>937</b>	<b>1.042</b>	<b>1.295</b>	<b>1.548</b>	<b>1.553</b>	<b>1.683</b>
1. Central government	629	697	884	1.070	1.071	1,154
2. Transfers to the regions	309	345	411	479	482	529
<b>C. Primary balance</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>-72</b>	<b>-79</b>	<b>-40</b>
<b>D. SURPLUS / DEFICIT</b>	<b>-89</b>	<b>-47</b>	<b>-84</b>	<b>-190</b>	<b>-191</b>	<b>-153</b>
(percent of GDP)	-1,6	-0,7	-1,1	2,2	-2,3	-1,7

Catatan: \* Berdasarkan laporan estimasi Semester I 2012 Kementerian Keuangan  
Source: Kementerian Keuangan

Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran  
(miliar USD)

	2009	2010	2011	2010				2011				2012		
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3			
<b>Balance of Payments</b>	<b>12,5</b>	<b>30,3</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>11,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,8</b>			
Percent of GDP	2,3	4,3	1,4	6,0	3,9	5,6	-1,8	-1,7	-0,5	-1,3	0,4			
<b>Current Account</b>	<b>10,6</b>	<b>5,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-7,7</b>	<b>-5,3</b>			
Percent of GDP	2,0	0,7	0,2	0,5	1,5	0,1	0,3	-1,1	-1,4	-3,5	-2,4			
Trade Balance	21,2	21,3	24,2	6,4	7,4	6,1	7,1	3,5	1,7	-2,1	0,6			
Net Income & Current Transfers	-10,6	-16,2	-22,5	-5,6	-4,5	-5,8	-6,4	-5,8	-4,9	-5,6	-5,9			
<b>Capital &amp; Financial Accounts</b>	<b>4,9</b>	<b>26,6</b>	<b>13,5</b>	<b>9,7</b>	<b>4,8</b>	<b>11,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>			
Percent of GDP	0,9	3,8	1,6	5,2	2,4	5,5	-1,5	0,2	1,1	2,3	2,7			
Direct Investment	2,6	11,1	11,5	4,4	3,8	2,5	2,1	3,1	1,6	3,7	3,6			
Portfolio Investment	10,3	13,2	4,0	1,4	3,3	4,9	-4,7	0,4	2,7	4,0	3,8			
Other Investment	-8,2	2,3	-2,1	3,8	-2,3	4,2	-0,8	-3,2	-1,9	-2,7	-1,5			
<b>Errors &amp; Omissions</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>			
<b>Foreign Reserves*</b>	<b>66,1</b>	<b>96,2</b>	<b>110,1</b>	<b>96,2</b>	<b>105,7</b>	<b>119,7</b>	<b>114,5</b>	<b>110,1</b>	<b>110,5</b>	<b>106,5</b>	<b>110,2</b>			

Catatan: \* Cadangan devisa pada akhir periode  
Sumber: BI danBPS

Lampiran tabel 3: Sekilas tentang indikator sosial Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>							
Penduduk ( <i>million</i> )	184	199	213	227	240	242	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	30,6	35,6	42,0	45,9	49,9	50,7	..
Rasio perempuan (% total penduduk)	50,0	50,0	50,0	50,1	50,1	50,1	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67,3	60,8	54,7	51,2	48,3	47,8	..
<b>Angkatan Kerja<sup>2</sup></b>							
Angkatan kerja, total ( <i>juta</i> )	75	84	98	106	117	117	..
Laki-laki	46	54	60	68	72	72	..
Perempuan	29	31	38	38	45	45	..
Kontribusi tenaga kerja sektorpPertanian (%)	55	43	45	44	38	36	..
Kontribusi tenaga kerja sektor industry (%)	14	19	17	19	19	21	..
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	44	..
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2,5	7,0	8,1	11,2	7,1	6,6	..
Laki-laki	2,5	5,4	7,2	9,3	6,1	5,9	..
Perempuan	2,7	9,8	9,6	14,7	8,7	7,6	..
<b>Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan<sup>3</sup></b>							
Konsumsi rumah tangga, median ( <i>Rp.000</i> )	..	..	104	211	374	421	446
Garis kemiskinan nasional ( <i>Rp.000</i> )	..	..	73	129	212	234	249
Jumlah penduduk miskin ( <i>juta</i> )	..	..	38	35	31	30	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	..	..	19,1	16,0	13,3	12,5	12,0
Di perkotaan	..	..	14,6	11,7	9,9	9,2	8,8
Di perdesaan	..	..	22,4	20,0	16,6	15,7	15,1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	..	..	15,5	13,3	11,0	10,2	9,5
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	..	..	12,6	12,8	9,5	9,7	8,8
GINI indeks	..	..	0,30	0,35	0,38	0,41	0,41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	..	..	9,6	8,7	7,9	7,4	7,5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	..	..	38,6	41,4	43,5	46,5	46,7
Pengeluar publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) <sup>4</sup>	..	..	..	4,4	3,9	3,9	4,2
<b>Kesehatan dan Gizi<sup>1</sup></b>							
Tenaga kesehatan ( <i>per 1,000 people</i> )	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	..	..
Jumlah tempat tidur rumah sakit ( <i>per 1,000 people</i> )	0,7	..	..	..	0,6	..	..
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5)	..	27	25	24	18	..	..
Tingkat kematian balita ( <i>per 1000 anak usia dibawah 5 tahun</i> ) <sup>5</sup>	98	..	46	..	44	..	..
Tingkat kematian bayi lahir ( <i>per 1000 kelahiran hidup</i> ) <sup>5</sup>	27	..	..	..	19	..	..
Tingkat kematian bayi ( <i>per 1000 kelahiran hidup</i> ) <sup>5</sup>	67	..	35	..	34	..	..
Rasio kematian persalian ( <i>perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup</i> )	600	420	340	270	220	..	..
Tingkat harapan hidup ( <i>total tahun</i> )	62	64	66	67	69	69	..
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran)	36	..	66	..	82	..	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 1 tahun)	0	..	72	..	76	..	..
Total health expenditure (% of GDP)	..	1,8	2,0	2,1	2,6	..	..
Public health expenditure (% of GDP)	..	0,6	0,7	1,0	1,3	..	..
<b>Air Bersih dan Kesehatan lingkungan</b>							
Persentase penduduk memiliki akses air bersih (% total penduduk)	70	74	78	80	82	..	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	91	92	..	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	74	..	..
Persentase penduduk memiliki akses kesehatan lingkungan (% total penduduk)	32	38	44	50	54	..	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	69	73	..	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	35	39	..	..
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>							
Pengurangan resiko bencana, nilai pengembangan (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	..	..	..	3,3	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) <sup>6</sup>	..	..	8,0	11,3	18,0	18,2	18,6

Sumber: 1 World Development Indicators, 2 BPS (Sakernas), 3 BPS (Susenas) dan World Bank, 4 MoF and kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya meliputi pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, PKH (kecuali tahun 2012 dari APBN-perubahan. 5 Survey Kependudukan dan Kesehatan Indonesia, 6 Inter-Parliamentary Union



